



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

#### Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| a. | BAB I    | PENDAHULUAN   |
| b. | BAB II   | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                                  |
| c. | BAB III  | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN |
| d. | BAB IV   | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS                                    |
| e. | BAB V    | PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN                      |
| f. | BAB VI   | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                   |
| g. | BAB VII  | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                 |
| h. | BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN         |
| i. | BAB IX   | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH                            |
| j. | BAB X    | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN                       |

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Nopember 2016  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**IRVAN RIVANO MUCHTAR**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI  
JAWA BARAT: (9/354/2016)



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan .....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-10
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II-11
2.1.4. Demografi .....	II-11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-13
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-19
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga.....	II-22
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-23
2.3.1. Layanan Urusan Wajib.....	II-23
2.3.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-52
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan .....	II-55
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-63
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-64
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-66
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-73
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-75



<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA</b>	
<b>PENDANAAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2. Neraca Daerah .....	III-7
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-7
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-8
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-12
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-14
3.3.1. Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama .....	III-14
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu .....	III-15
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	III-24
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2. Isu Strategis .....	IV-14
4.2.1. Telaahan Isu Internasional.....	IV-15
4.2.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 .....	IV-18
4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 .....	IV-20
4.2.4. Telaahan RPJPD Kabupaten Cianjur .....	IV-23
4.2.5. Telaahan Isu RTRW Kabupaten Cianjur .....	IV-32
4.2.6. Telaahan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 .....	IV-35
4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Cianjur 2016-2021.....	IV-46
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Visi .....	V-1
5.2. Misi .....	V-1
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-2
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VII-1</b>



**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI**

<b>KEBUTUHAN PENDANAAN.....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH</b>	<b>IX-1</b>
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>X-1</b>
10.1. Pedoman Transisi .....	X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan .....	X-1



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2015 .....	II-1
Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Tanah Setiap Kecamatan Di Kabupaten Cianjur.....	II-5
Tabel 2.3. Jumlah Luas Penggunaan Lahan Kab. Cianjur Tahun 2011-2014 .....	II-10
Tabel 2.4. Perkembangan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-12
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014 .....	II-12
Tabel 2.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Per Sektor Tahun 2011 dan 2015 (juta rupiah).....	II-15
Tabel 2.7. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 per Sektor Tahun 2011-2015 .....	II-16
Tabel 2.8. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2013 Provinsi Jawa Barat .....	II-17
Tabel 2.9. IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015.....	II-19
Tabel 2.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan tahun 2009-2013 .....	II-19
Tabel 2.11. Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Per Komponen Tahun 2011-2015 .....	II-20
Tabel 2.12. APK dan APM di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-20
Tabel 2.13. Angka Harapan Hidup, Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-21
Tabel 2.14. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 (jiwa) .....	II-22
Tabel 2.15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Cianjur Tahun 2012 - 2015 .....	II-23
Tabel 2.16. Jumlah Murid, guru dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 .....	II-24
Tabel 2.17. Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Dasar di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-24



Tabel 2.18.	Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-25
Tabel 2.19.	Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 .....	II-26
Tabel 2.20.	Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-26
Tabel 2.21.	Rasio Murid dengan Guru, Rasio Murid dengan Sekolah di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-27
Tabel 2.22.	Pendidikan Keagamaan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014.....	II-27
Tabel 2.23.	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur tahun 2012 - 2015 .....	II-28
Tabel 2.24.	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2015 .....	II-29
Tabel 2.25.	Indikator Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-29
Tabel 2.26.	Status Jalan di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2015.....	II-30
Tabel 2.27.	Kondisi Jalan Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015.....	II-31
Tabel 2.28.	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial Tahun 2015.....	II-35
Tabel 2.29.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mdi Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2014 .....	II-36
Tabel 2.30.	Persentase Penanganan Sampah dan penegakan hukuman lingkungan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015 .....	II-38
Tabel 2.31.	Hasil Pengujian Kualitas Air pada Sungai Cisokan Kecamatan Leles Tahun 2015 .....	II-39
Tabel 2.32.	Hasil Pengujian Kualitas Air pada Sungai Cipandak Kecamatan Naringgul Tahun 2015 .....	II-39
Tabel 2.33.	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015 Berdasarkan Parameter Pencemar Udara.....	II-41
Tabel 2.34.	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015 Berdasarkan Parameter Kebauan .....	II-41
Tabel 2.35.	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015 Berdasarkan Parameter Kebisingan .....	II-42



Tabel 2.36.	Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi pada PT. Pasic Indonesia Tahun 2015 .....	II-42
Tabel 2.37.	Status Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015 .....	II-45
Tabel 2.38.	Jumlah Prasarana Perhubungan di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 .....	II-47
Tabel 2.39.	Jumlah Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Perintis Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2015 .....	II-48
Tabel 2.40.	Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015 .....	II-48
Tabel 2.41.	Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2015 .....	II-49
Tabel 2.42.	Perkembangan Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2015.....	II-49
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015 .....	II-52
Tabel 2.44.	Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 .....	II-53
Tabel 2.45.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur Berdasarkan gol./ruang tahun 2015.....	II-54
Tabel 2.46.	Status SIM Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-54
Tabel 2.47.	Indikator kinerja Bidang Pertanian di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-55
Tabel 2.48.	Cakupan Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015 .....	II-58
Tabel 2.49.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dan Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-59
Tabel 2.50.	Data Rasio Elektrifikasi (RE) Di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2015 .....	II-60
Tabel 2.51.	Daftar Objek Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 .....	II-60
Tabel 2.52.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan di .....	II-64



	Kabupaten Cianjur Tahun 2014 s.d 2015 .....	
Tabel 2.53.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 s.d 2014 .....	II-65
Tabel 2.54.	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2013 Provinsi Jawa Barat	II-66
Tabel 2.55.	Indek Risiko Bencana Kabuapten Cianjur .....	II-67
Tabel 2.56.	Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015...	II-70
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2011-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-2
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-4
Tabel 3.3.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Cianjur	III-6
Tabel 3.4.	Neraca 2014-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-7
Tabel 3.5.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-9
Tabel 3.6.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-10
Tabel 3.7.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-12
Tabel 3.8.	Defisit Riil Periode Tahun 2013-2015 Kabupaten Cianjur .....	III-12
Tabel 3.9.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013-2015 Kabupaten Cianjur.....	III-13
Tabel 3.10.	Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015 Kabupaten Cianjur.....	III-14
Tabel 3.11.	Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah .....	III-16
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 Kabupaten Cianjur.....	III-24
Tabel 3.13.	Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Th. 2016-2021 Kabupaten Cianjur.....	III-25
Tabel 3.14.	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Cianjur .....	III-25



Tabel 3.15.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017-2021 Kabupaten Cianjur .....	III-26
Tabel 3.16.	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017-2021 Kabupaten Cianjur .....	III-29
Tabel 3.17.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017-2021 Kabupaten Cianjur .....	III-29
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat .....	IV-21
Tabel 4.2.	Prioritas Pembangunan Pada Tahapan Pembangunan Ketiga RPJPD Kabupaten Cianjur 2005-2025.....	IV-25
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	V-3
Tabel 6.1.	Faktor Internal dan Eksternal Kabupaten Cianjur .....	VI-3
Tabel 6.2.	Matriks SWOT untuk Menentukan Alternatif Strategi .....	VI-5
Tabel 6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021.....	VI-8
Tabel 7.1.	Pemetaan Program Prioritas Bupati dengan Program Pembangunan Daerah .....	VII-2
Tabel 7.2.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 .....	VII-5
Tabel 8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.....	VIII-2
Tabel 9.1.	Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cianjur.....	IX-2
Tabel 9.2.	Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Cianjur.....	IX-4
Tabel 9.3.	Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Cianjur.....	IX-16



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Cianjur .....	II-3
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Berdasarkan Struktur Usia .....	II-13
Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2011-2015 .....	II-14
Gambar 2.4. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015 .....	II-18
Gambar 2.5. Persentase Luas Areal Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-32
Gambar 2.6. Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya.....	II-32
Gambar 2.7. Persentase Akseptor KB Perempuan Usia 15 – 49 tahun Menurut Pemakaian Alat KB di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 .....	II-47
Gambar 2.8. Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2011- 2015 .....	II-50
Gambar 2.9. Populasi Ternak Kab. Cianjur Tahun 2014 .....	II-57
Gambar 2.10. Kunjungan wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015.....	II-61
Gambar 2.11. Produksi Ikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015.....	II-62
Gambar 2.12. Tranmigrasi Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 .....	II-63
Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019.....	IV-20
Gambar 4.2. Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 .....	IV-25
Gambar 6.1. Keterkaitan Sasaran dengan Program Prioritas (Sapta Cita) .....	VI-2
Gambar 6.2. Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021 .....	VI-12



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

---

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 yang juga diikuti oleh Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati baru masa jabatan 2016 sampai 2021. Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2016-2021 yaitu Bapak H. Irvan Rivano Muchtar dan Bapak H. Herman Suherman dilantik pada tanggal 18 Mei 2016 dengan mengusung visi **Cianjur Lebih Maju dan Agamis**. Sejak pelantikan bupati dan wakil bupati, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur dimulai dan ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 261 Undang-undang Nomor 23 Thun 2014, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis**; menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



2. **Pendekatan partisipatif;** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis;** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah pada saat kampanye, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ini memiliki makna bahwa RPJMD Cianjur 2016-2021 merupakan dokumen yang dihasilkan melalui proses yang holistik dan terintegrasi dengan 4 pendekatan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Perangkat Daerah sebagai pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus mendukung pelaksanaan RPJMD, melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi dari RPJMD.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

---

Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi:



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D); dan
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45 Seri D).

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 dilakukan dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Cianjur 2005-2025. Arah kebijakan dan sasaran pokok tahap ketiga RPJPD Kabupaten Cianjur 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan antar



pembangunan lima tahunan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019 dalam rangka mendukung perwujudan nawa cita sebagai agenda pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka penyusunan RPJMD Cianjur juga diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi khususnya pada tahun yang bersesuaian.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunannya. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cianjur serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

---

Sistematika RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan



- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
  - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
  - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
  - 4.1 Permasalahan Pembangunan
  - 4.2 Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
  - 5.1 Visi
  - 5.2 Misi
  - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  - 6.1 Strategi
  - 6.2 Arah Kebijakan
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

---

Penyusunan RPJMD Cianjur 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan arah 5



(lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Cianjur 2016-2021, yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD; dan
4. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus capaian kinerja perangkat daerah.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kabupaten Cianjur adalah 361.434,98 Ha dan berada di tengah Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara administrasi pemerintahan, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 32 Kecamatan, 354 Desa dan 6 Kelurahan, serta mencakup 2.751 Rukun Warga dan 10.402 Rukun Tetangga.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2015**

Kecamatan	Luas wilayah (Ha)
Agrabinta	19.265,32
Leles	11.432,03
Sindangbarang	15.907,56
Cidaun	29.551,23
Naringgul	28.132,43
Cibinong	23.547,77
Cikadu	18.866,44
Tanggeung	5.980,15
Pasir Kuda	11.514,95
Kadupandak	10.440,78
Cijati	4.902,15
Takokak	14.216,47
Sukanagara	17.404,94
Pagelaran	19.943,66
Campaka	14.374,76
Campakamulya	7.426,56
Cibeber	12.472,97
Warungkondang	4.515,75
Gekbrong	5.076,88
Cilaku	5.252,96
Sukaluyu	4.802,38



Kecamatan	Luas wilayah (Ha)
Bojongpicung	8.833,94
Haurwangi	4.617,83
Ciranjang	3.481,31
Mande	9.879,47
Karangtengah	4.852,51
Cianjur	2.614,70
Cugenang	7.615,39
Pacet	4.166,45
Cipanas	6.727,65
Sukaesmi	9.215,34
Cikalongkulon	14.402,25
<b>Total</b>	<b>361.434,98</b>

Sumber: RTRW Kab. Cianjur 2012-2031

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak diantara 6° 21' - 7° 25' Lintang Selatan dan 106° 42' - 107° 25' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Barat : berbatasan dengan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Sumber: RTRW Kab. Cianjur 2012-2031

**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Cianjur**

### 2.1.1.3 Topografi

Gambaran topografi menjabarkan mengenai kondisi ketinggian dan kontur wilayah Kabupaten Cianjur. Adapun karakteristik topografi yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Dataran : Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 - 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah Sukaresmi, Cicalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah Utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.



2. Perbukitan Berelief Halus: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 - 15% yang terdapat pada daerah Utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun, dan sebelah Timur Sindangbarang.
3. Perbukitan Berelief Sedang: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 - 25% yang tersebar pada daerah Utara Mandeh, sebelah Selatan Kadupandak, dan sebelah Selatan Cibeber.
4. Perbukitan Berelief Agak Kasar: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 – 40% yang tersebar pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, sebelah Utara Cidaun, sebelah Selatan Pagelaran, dan sebelah Barat Tanggeung.
5. Perbukitan Berelief Kasar: Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar -- sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40 % yang terdistribusi pada daerah Selatan Sukaresmi, sebelah Selatan Bojong Picung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul. Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hampir tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Besar, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Gunung Pondokcabang, Gunung Berenuk, dan Pasir Gook.

Letak Ketinggian Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu 7 – 2.962 mdpl, wilayah yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Cipanas dan Pacet yaitu 1.080 – 2.962 mdpl. Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Tanah di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Tanah Setiap Kecamatan Di Kabupaten Cianjur**

Kecamatan	DPL (m)	Kemiringan (%)
Agrabinta	7 – 600	0 – 40
Leles	7 – 600	0 – 25
Sindangbarang	7 – 500	0 – 40
Cidaun	7 – 500	0 – 40
Naringgul	800 – 2.300	15 – 40
Cibinong	141 – 800	3 – 40
Cikadu	141 – 950	15– 40
Tanggeung	350 – 1.200	3 – 40
Pasirkuda	350 – 1.200	3 – 40
Kadupandak	350 – 1.200	0 – 25
Cijati	350 – 1.200	0 – 25
Takokak	800 – 1.200	15 – 40
Sukanagara	700 – 1.010	15 – 40
Pagelaran	350 – 1.200	15 – 40
Campaka	475 – 700	15 – 40
Campakamulya	475 – 700	15 – 40
Cibeber	200 – 1.250	0 – 40
Warungkondang	300 – 900	0 – 40
Gekbrong	300 -900	0 – 30
Cilaku	436 – 675	0 – 30
Sukaluyu	200 – 316	0 – 30
Bojongpicung	200 – 450	0 – 40
Haurwangi	200 – 450	0 – 40
Ciranjang	200 – 316	0 – 40
Mande	250 – 500	0 – 40
Karangtengah	350 – 375	0 – 30
Cianjur	436 – 675	0 – 25
Cugenang	300 – 1.035	0 – 40
Pacet	1.080 – 2.962	3 – 40
Cipanas	1.080 – 2.962	3 – 40
Sukaresmi	1.080 – 1.450	3 – 40
Cikalongkulon	225 – 500	0 – 40
<b>Kabupaten Cianjur</b>	<b>7 – 2.962</b>	<b>0 – 40</b>

Sumber : Kab.Cianjur Dalam Angka Tahun 2014



#### 2.1.1.4 Hidrologi

Resapan air di Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 3 (tiga) jenis resapan yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu resapan air rendah, resapan air sedang, resapan air tinggi.

Sumberdaya air yang terdapat di Kabupaten Cianjur meliputi air permukaan (sungai-sungai), mata air, dan air tanah. Sumberdaya air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan lain-lain.

##### 1. Air Baku

Sumber air baku memegang peranan yang sangat penting dalam industri air minum. Air baku atau *raw water* merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengeolahan air bersih. Berdasarkan SNI 6773:2008 tentang Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air dan SNI 6774:2008 tentang Tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air pada bagian istilah dan definisi yang disebut dengan air baku adalah : "Air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum."

Sumber air baku bisa berasal dari sungai, danau, sumur air dalam, mata air dan bisa juga dibuat dengan cara membendung air buangan atau air laut. Evaluasi dan pemilihan sumber air yang layak harus berdasar dari ketentuan berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas air yang diperlukan;
- b. Kondisi iklim;
- c. Tingkat kesulitan pada pembangunan intake;
- d. Tingkat keselamatan operator;
- e. Ketersediaan biaya minimum operasional dan pemeliharaan untuk IPA;
- f. Kemungkinan terkontaminasinya sumber air pada masa yang akan datang;
- g. Kemungkinan untuk memperbesar intake pada masa yang akan datang.

Dalam jumlah yang kecil, air bawah tanah, termasuk air yang dikumpulkan dengan cara rembesan, bisa dipertimbangkan sebagai sebuah sumber air. Kualitas air bawah tanah secara umum sangat baik bagi air permukaan dan



dibeberapa tempat yang memiliki musim dingin bisa memanfaatkan salju sebagai sumber air. Hal ini bisa menghemat biaya operasional dan pemeliharaan karena secara umum kualitas air bawah tanah sangat baik sebagai air baku. Khusus untuk air bawah tanah yang diambil dengan cara pengeboran tentunya melalui perijinan. Hal ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi secara besar-besaran. Akibat dari eksploitasi secara besar-besaran bisa mengakibatkan kekosongan air dibawah tanah karena tidak seimbang antara air yang masuk dengan air yang diambil, sehingga menyebabkan pondasi bangunan yang berada di atasnya bisa turun atau settlement seperti yang terjadi di beberapa gedung di Jakarta, juga bisa mengakibatkan intrusi air laut yang masuk merembes menggantikan air tanah tersebut, akibatnya air menjadi asin dan tidak layak pakai seperti di utara Jakarta.

Disebutkan diatas bahwa tidak semua air baku bisa diolah, oleh karena itu dibuatlah ketentuan sebagai standar kualitas air baku yang bisa diolah. Dalam SNI 6773:2008 bagian Persyaratan Teknis kualitas air baku yang bisa diolah oleh Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) adalah :

- a. Kekeruhan, maximum 600 NTU (*nephelometric turbidity unit*) atau 400 mg/l SiO<sub>2</sub>;
- b. Kandungan warna asli (*apparent colour*) tidak melebihi dari 100 Pt Co dan warna sementara mengikuti kekeruhan air baku;
- c. Unsur-unsur lainnya memenuhi syarat baku air baku sesuai PP No. 82 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- d. Dalam hal air sungai daerah tertentu mempunyai kandungan warna, besi dan/atau bahan organik melebihi syarat tersebut diatas tetapi kekeruhan rendah (<50 NTU) maka digunakan IPA system DAF (*Dissolved Air Flotation*) atau system lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyediaan air bersih selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Dalam hal air bersih, sudah merupakan praktek umum bahwa dalam menetapkan kualitas dan karakteristik dikaitkan dengan suatu



baku mutu air tertentu (standar kualitas air). Untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang karakteristik air baku, seringkali diperlukan pengukuran sifat-sifat air atau biasa disebut parameter kualitas air, yang beraneka ragam. Formulasi-formulasi yang dikemukakan dalam angka-angka standar tentu saja memerlukan penilaian yang kritis dalam menetapkan sifat-sifat dari tiap parameter kualitas air.

Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakterilogis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, air menurut kegunaannya digolongkan menjadi:

- Kelas I : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- Kelas II : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- Kelas III : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

## 2. Air Permukaan

Sungai Citarum merupakan sungai utama yang mengalir ke bagian utara dengan beberapa anak sungainya di Kabupaten Cianjur antara lain Sungai Cibeet, Sungai Cikundul, Sungai Cibalagung, dan Sungai Cisokan. Sungai-sungai tersebut membentuk sub-DAS yang merupakan bagian dari DAS Citarum yang bermuara di Laut Jawa. Di bagian selatan terdapat Sungai Cibuni, Sungai Cisokan, Sungai Cisadea, Sungai Cijung, dan Sungai Cilaki yang merupakan subDAS Cibuni - Cilaki yang bermuara di Samudera Indonesia.



Terdapat 2 (dua) buah waduk yang memanfaatkan aliran Sungai Citarum yaitu Cirata, dan Saguling. Waduk Cirata mempunyai luas genangan 6.400 ha, dimana 3.400 ha menggenangi wilayah Kabupaten Cianjur. Genangan tersebut merupakan sumber air permukaan/penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan, pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sekitar 550 MW jam/tahun serta pengembangan budidaya perikanan darat dan pariwisata. Selain sungai, potensi air permukaan di Kabupaten Cianjur adalah adanya situ/rawa yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Tanggeung, Cibinong dan Kadupandak. Terdapat sekitar 16 situ/rawa mencakup luas + 33,50 Ha dengan perkiraan volume air 594.300 m<sup>3</sup> dan mampu mengairi sawah + 1.431 Ha.

### **3. Mata Air**

Zona mata air yang sangat vital atau berpotensi di Kabupaten Cianjur terutama berada pada kawasan lereng bagian timur Gunung Gede. Air yang berasal dari mata air dalam zona ini terutama ditampung oleh sungai Cilaku, Cisarua, Cicaringin, dan Cikundul. Sumber air bersih ini terutama dimanfaatkan untuk kepentingan domestik (rumah tangga), pertanian, dan waduk Cirata. Zona mata air yang berada pada lereng bukit di dataran tinggi Sukanagara-Campaka bagian utara selain untuk kepentingan domestik dan pertanian juga dimanfaatkan untuk waduk Cirata yang disalurkan melalui Sungai Cikondang dan Cisokan.

### **4. Air Tanah**

Potensi air tanah di Kabupaten Cianjur meliputi air tanah bebas dangkal, air tanah bebas dalam, dan air tanah pantai. Air tanah bebas dangkal umumnya merupakan daerah pedataran lembah dan pantai serta daerah depresi (Depresi Cianjur, Depresi Pagelaran, Depresi Kadupandak, dan lain-lain). Air tanah bebas dangkal tersebut terdapat hampir di semua pedataran dan sudah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. Air tanah bebas dalam (TMA lebih dari 10 meter) terutama pada daerah perbukitan yang berada



diantara wilayah mata air. Air tanah dangkal pantai meliputi pedataran sekitar pantai laut Samudera Indonesia dan Waduk Cirata.

Pada zona ini bermuara sejumlah sungai yang senantiasa mengendapkan partikel-partikel hasil erosi dalam berbagai ukuran dan mengandung air. Air dangkal pantai ini tersebar di sepanjang pantai selatan Cianjur.

#### **2.1.1.5 Klimatologi**

Secara umum Kabupaten Cianjur beriklim tropis lembab dengan suhu udara minimum 18 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Maret – April, sedangkan suhu maksimal adalah 24 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Oktober – November dengan kelembaban nisbi berkisar antara 80-90%. Pada bulan November – Maret angin bertiup ke arah tenggara yang biasanya berkaitan dengan musim kemarau . Adapun puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sedangkan puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember- Januari.

Kondisi curah hujan di Kabupaten Cianjur sangat bervariasi. Curah hujan rata-rata di wilayah pesisir berkisar antara 1.120,4 mm/tahun sampai dengan 3.543 mm/tahun. Namun demikian, beberapa wilayah di sebelah barat Kecamatan Sindangbarang memiliki curah hujan lebih tinggi, yakni berkisar antara 3.000 mm/tahun sampai 4.000 mm/tahun.

#### **2.1.1.6 Penggunaan Lahan**

Luas wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas daratan (lahan) dan perairan. Total luas wilayah keseluruhan adalah 361.434,98 Ha sedangkan luas lahan yang digunakan sebesar 350.148 Ha. Perkembangan penggunaan lahan mengalami pergeseran dari luas lahan sawah ke lahan bukan sawah seiring dengan pembangunan daerah seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Luas Penggunaan Lahan Kab. Cianjur Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Bukan Sawah (Ha)	Luas Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
1	2011	65.978	172.466	111.689	350.133
2	2012	66.180	171.470	112.498	350.148
3	2013	66.283	181.298	102.567	350.148
4	2014	65.909	199.250	84.985	350.148

Sumber : BPS Kab. Cianjur 2015

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan diantaranya daerah potensi pertanian tanaman pangan, daerah perdagangan, hotel dan restoran karena Kabupaten Cianjur banyak memiliki banyak kawasan objek wisata.

Pemanfaatan lahan utama di Kabupaten Cianjur terdiri dari pertanian, perkampungan/perumahan/pemukiman, hotel dan penginapan, industri, perkebunan, perairan/tambak dan lain-lain. Sebagian besar lahan pertanian ada di wilayah Cianjur Selatan, lahan sawah terbesar ada di wilayah Kecamatan Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta dan Cibeber. Dan untuk kawasan hotel dan penginapan sebagian besar berada di wilayah utara yaitu kawasan Puncak dan Cipanas.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Daerah rawan bencana terbagi atas tiga kategori, yaitu daerah rawan longsor, daerah rawan banjir, dan daerah rawan tsunami dan gelombang pasang. Daerah rawan longsor yang meliputi Kecamatan Agrabinta, Bojongpicung, Campaka, Campakamulya, Cianjur, Cibeber, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Cikalongkulon, Cilaku, Cipanas, Ciranjang, Cugenang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Karangtengah, Leles, Mande, Naringgul, Pacet, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukaluyu, Sukanagara, Sukaresmi, Takokak, Tanggeung, dan Warungkondang. Daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Ciranjang, Sukaluyu,



Haurwangi, Cilaku, Cibeber, Kadupandak, Cijati, Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun. Dan yang termasuk daerah rawan tsunami dan gelombang pasang meliputi kecamatan Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun.

#### 2.1.4 Demografi

Kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga 2015. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2015 berjumlah 2.243.904 Jiwa atau naik 1,95% dibanding tahun 2011 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap tahunnya sebesar 0,48%. Dilihat dari jenis kelamin, Jumlah laki-laki sebanyak 1.155.177 jiwa dan perempuan sebanyak 1.088.727 jiwa dengan sex ratio 106,10. Dengan demikian, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dengan Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Cianjur sebesar 621 orang per km<sup>2</sup>. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	2011	1.135.300	1.065.700	2.210.278	106,53	612,40
2	2012	1.141.393	1.072.496	2.231.107	106,42	615,9
3	2013	1.146.669	1.078.644	2.225.316	106,31	619,17
4	2014	1.151.352	1.084.036	2.235.418	106,21	621,97
5	2015	1.155.177	1.088.727	2.243.904	106,10	621

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur 2015

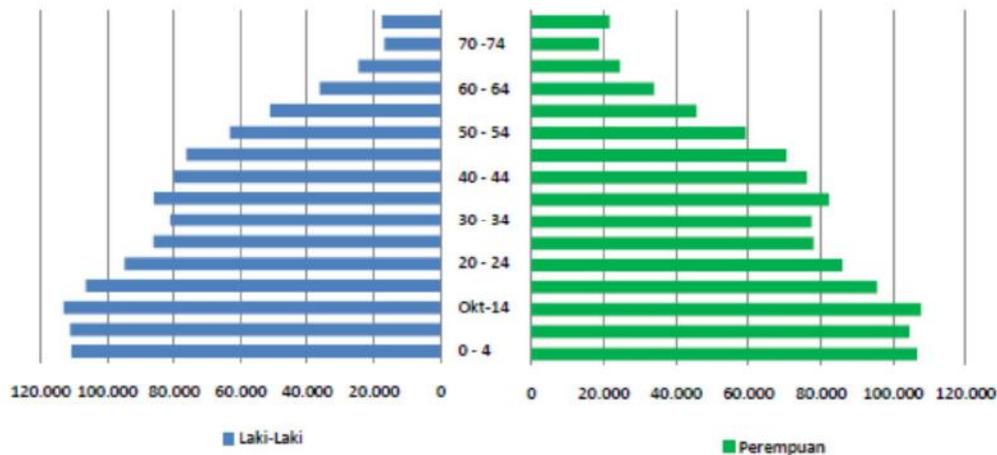
Struktur usia penduduk mengalami pergeseran dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Tahun 2011 kelompok non produktif 0-14 tahun didominasi kelompok usia 10 - 14 tahun sebanyak 225.394 jiwa, kelompok usia produktif 15-64 tahun di dominasi oleh kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 192.862 jiwa, sedangkan tahun 2014 kelompok usia non produktif 0-14 tahun didominasi oleh kelompok usia 10 -14 tahun

sebanyak 243.073 jiwa, kelompok usia produktif 15-64 tahun di dominasi oleh kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 179.148 jiwa.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014**

Golongan Umur	2011	2012	2013	2014
0-4	220.328	227.603	220.413	211.360
5-9	235.605	232.509	217.765	228.646
10-14	243.073	245.461	225.394	270.367
15-19	192.862	199.691	205.190	162.211
20-24	175.558	158.441	182.233	171.465
25-29	201.371	198.953	165.717	177.714
30-34	171.780	174.325	162.209	152.096
35-39	174.287	160.688	167.807	179.148
40-44	145.409	166.199	152.782	162.946
45-49	127.519	113.434	140.526	131.749
50-54	100.871	109.741	115.779	118.489
55-59	75.426	77.721	89.755	88.227
60-64	52.624	58.707	63.818	71.043
65+	93.504	107.634	115.928	109.957
<b>Jumlah</b>	<b>2.210.278</b>	<b>2.231.107</b>	<b>2.225.316</b>	<b>2.235.418</b>

Sumber: Cianjur Dalam Angka 2011-2015



**Gambar 2.2 Piramida Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**



Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur terbanyak berpendidikan SD/ sederajat, yaitu di Tahun 2014 sebanyak 577.195 jiwa, sedangkan jumlah yang paling sedikit, yaitu berpendidikan diploma/Akademi/universitas sebanyak 39.466 jiwa.

Jumlah pemeluk agama di Cianjur sebagian besar didominasi oleh penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 98,76% sementara pemeluk agama lain adalah minoritas tidak lebih dari 2%.

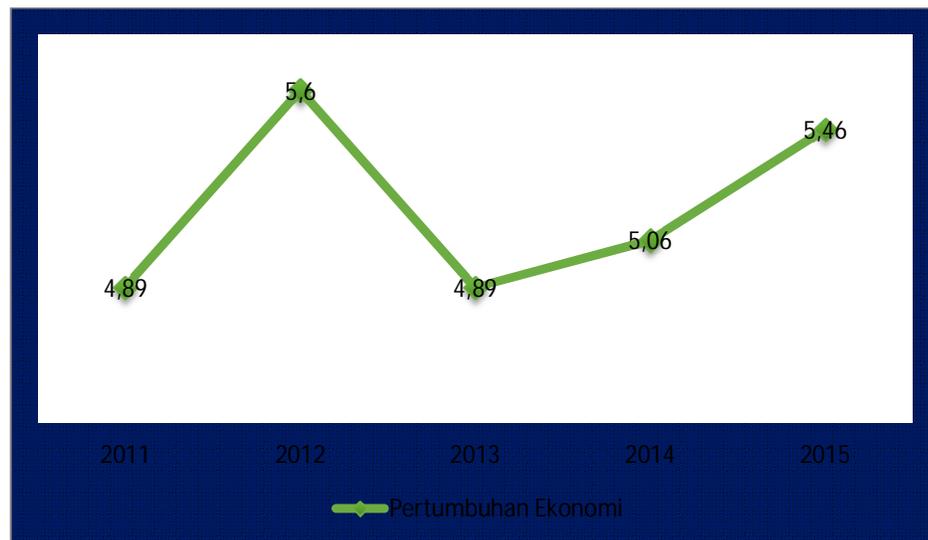
## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

---

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cianjur selama periode waktu tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar 5,18% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 5,08% dan 5,17%. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan kinerja perekonomian daerah terus mengalami peningkatan.



Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2011-2015



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 atas dasar harga konstan seri 2010 sebesar 20,660 trilyun rupiah dengan penyumbang terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,334 trilyun rupiah (35,50%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,731 trilyun rupiah (18,06%). Sedangkan nilai PDRB tahun 2015 atas harga konstan seri 2010 meningkat menjadi Rp. 25,355 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 4,695 trilyun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2011. Sektor penyumbang terbesar dalam PDRB tahun 2015 berdasarkan harga konstan seri 2010 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,071 trilyun rupiah (31,83%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,741 trilyun rupiah (18,70%). Gambaran lengkap terhadap nilai PDRB maupun kontribusinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Per Sektor**  
**Tahun 2011 dan 2015 (juta rupiah)**

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.333.650,50	7.569.602,80	7.774.806,50	7.905.678,90	8.070.824,20
B	Pertambangan dan Pengecilan	65.515,20	65.943,10	69.759,10	73.691,90	77.573,50
C	Industri Pengolahan	1.226.362,40	1.274.782,40	1.326.312,20	1.380.001,70	1.444.296,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.627,60	19.314,60	20.405,90	22.712,60	20.888,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.410,20	6.819,20	7.249,70	7.679,90	8.105,30
F	Konstruksi	1.640.878,20	1.847.904,80	1.948.633,90	2.047.572,30	2.166.491,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.731.400,40	3.951.603,50	4.194.749,00	4.453.849,80	4.741.071,40
H	Transportasi dan Pergudangan	1.646.430,50	1.766.299,80	1.837.383,80	1.967.303,50	2.144.803,20



Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.174.299,10	1.223.627,70	1.300.462,30	1.389.456,00	1.491.615,30
J	Informasi dan Komunikasi	562.987,00	634.244,90	711.257,60	822.463,80	919.583,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	452.810,60	472.057,40	504.634,10	537.182,20	575.007,80
L	Real Estate	432.629,20	452.288,20	478.788,20	508.209,70	540.014,20
M,N	Jasa Perusahaan	126.659,30	142.411,40	150.532,00	160.116,60	170.385,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	617.906,00	644.645,50	654.645,50	657.943,50	694.345,00
P	Jasa Pendidikan	756.326,00	838.294,00	921.201,20	1.034.288,50	1.116.691,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.952,90	138.686,10	152.243,20	176.324,00	202.013,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	734.346,70	768.539,10	830.095,40	897.516,50	971.656,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20.660.191,70	21.817.064,40	22.883.159,40	24.041.991,40	25.355.367,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		20.660.191,70	21.817.064,40	22.883.159,40	24.041.991,40	25.355.367,70

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur tahun 2015

**Tabel 2.7**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 per Sektor Tahun 2011-2015**

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,50	34,70	33,98	32,88	31,83
B	Pertambangan dan Penggalian	0,32	0,30	0,30	0,31	0,31
C	Industri Pengolahan	5,94	5,84	5,80	5,74	5,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,94	8,47	8,52	8,52	8,54



Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,06	18,11	18,33	18,53	18,70
H	Transportasi dan Pergudangan	7,97	8,10	8,03	8,18	8,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,61	5,68	5,78	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	2,72	2,91	3,11	3,42	3,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,16	2,21	2,23	2,27
L	Real Estate	2,09	2,07	2,09	2,11	2,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	0,65	0,66	0,67	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,99	2,95	2,86	2,74	2,74
P	Jasa Pendidikan	3,66	3,84	4,03	4,30	4,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,64	0,67	0,73	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,55	3,52	3,63	3,73	3,83
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2016

### 2.2.1.2 Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Cianjur secara khusus tidak pernah dipantau oleh BPS. Di Provinsi Jawa Barat, BPS hanya memunculkan data IHK meliputi 7 kota yaitu Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Depok. Laju Inflasi yang digunakan sebagai asumsi adalah laju inflasi Provinsi Jawa Barat.



**Tabel 2.8**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2013 Provinsi Jawa Barat**

Uraian	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata inflasi
Inflasi	6,46	3,10	3,86	8,88	5,57

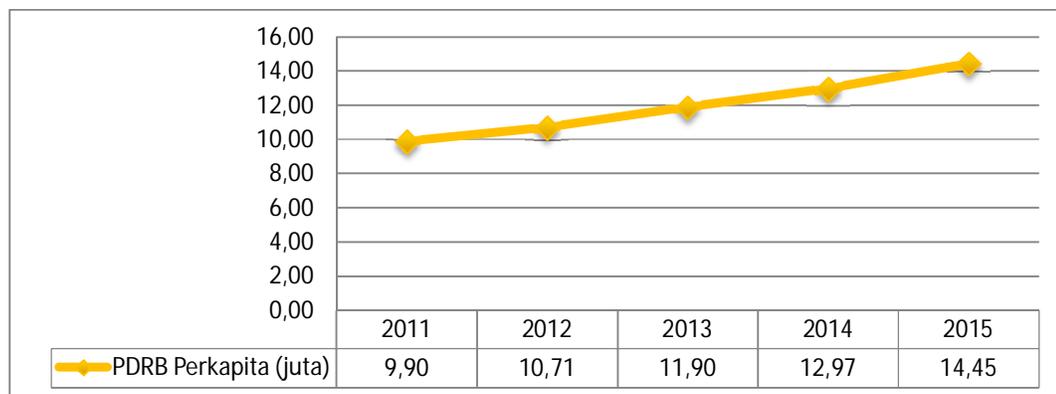
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) angka inflasi sampai bulan Oktober 2013

### 2.2.1.3 PDRB Per kapita

Pendapatan regional perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan/kemakmuran masyarakat dari aspek pendapatan. Pendapatan regional per kapita yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat perkembangan pendapatan penduduk. Laju pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan PDRB per kapita akan tinggi, demikian pula sebaliknya.

Pada tahun 2011, PDRB per kapita Kabupaten Cianjur atas harga berlaku mencapai 9,90 juta rupiah naik menjadi sebesar 14,45 juta rupiah pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 45,96% atau 4,55 juta rupiah.



Sumber: BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2015

**Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2015**



### 2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya ekonominya.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Cianjur, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Cianjur mencapai sebesar 58,6 poin meningkat menjadi 62,4 poin di tahun 2015, dengan kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,95 poin. Peningkatan nilai IPM tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten Cianjur dalam segala aspek kehidupan baik aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015**

Indikator	IPM dengan Metode Baru				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Pendidikan	0,473	0,4892	0,5081	0,5373	0,5463
Indeks Kesehatan	0,75	0,752	0,753	0,754	0,7566
Indeks Daya Beli	0,5665	0,5695	0,5722	0,5787	0,5874
<b>IPM</b>	<b>58,6</b>	<b>59,4</b>	<b>60,3</b>	<b>61,7</b>	<b>62,4</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Cianjur 2015

### 2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur selama periode 2009 sampai 2013 selalu menurun. Data jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan**  
**tahun 2009-2013**

Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2009	311.100	14,27%	192.176
2010	310.970	14,32%	202.438
2011	306.649	13,87%	235.202
2012	292.219	13,20%	250.032
2013	267.887	12,04%	264.580

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Cianjur Tahun 2014

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Rasio penduduk yang bekerja. Indikator ini mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

#### 2.2.2.1 Pendidikan

##### 1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indeks pendidikan terbentuk dari komponen Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). AHLS Kabupaten Cianjur tahun 2011 sebesar 10,07 tahun meningkat menjadi 11,83 tahun pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 1,76 tahun. Sedangkan RLS juga mengalami peningkatan, dari 6,28 tahun pada tahun 2011 menjadi 6,53 pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 0,25. Perkembangan komponen Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 2.11**  
**Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Per Komponen Tahun 2011-2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Lama Sekolah	10,07	10,62	11,54	11,82	11,83
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,28	6,39	6,50	6,52	6,53

Sumber: BPS Kab.Cianjur Tahun 2015

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK dan APM di tingkat SD/MI dan tingkat SMP/Mts masuk peringkat lima besardi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan APK dan APM Kabupaten Cianjur pada tingkat SMA/MA/SMK masih sangat rendah. Bahkan peringkat APK dan APM tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Cianjur berada paling bawah dari semua kota/kabupaten di Jawa Barat. Rendahnya APK dan APM secara umum lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat.

**Tabel 2.12**  
**APK dan APM di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

APK dan APM	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/MI	110,66	111,53	112,72	112,88	118,9
APK SMP/MTs	94,72	97,33	97,82	97,85	97,92
APK SMA/MA/SMK	48,59	53,36	56,13	58,26	58,42
APM SD/MI	95,91	92,73	93,03	98,92	98,96
APM SMP/MTs	85,6	89,76	90,41	96,08	96,72
APM SMA/MA/SMK	39	48,01	50,63	53,62	53,81

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2015

### 2.2.2.2 Kesehatan

#### 1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan gambaran pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pada tahun 2011 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Cianjur sebesar 68,86 tahun meningkat menjadi 69,18 tahun di tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 0,31 tahun selama



kurun waktu tersebut. Perkembangan Angka Harapan Hidup selama tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.13**  
**Angka Harapan Hidup, Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	68,86	68,96	69,04	69,08	69,18
Jumlah Kasus Kematian Bayi (kasus)	331	242	234	172	185
Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	70	48	42	49	49

Sumber: BPS Kab. Cianjur Tahun 2015

Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) antara lain adalah jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2011 jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 331 kasus, kemudian menurun menjadi 185 kasus di tahun 2015. Sedangkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 70 kasus di tahun 2011 menurun menjadi 49 kasus di tahun 2015. Rincian jumlah kematian bayi dan ibu dapat dilihat dalam tabel berikut.

### 2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS, penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 1.031.622 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja tersebut yang bekerja sebanyak 878.215 jiwa.



**Tabel 2.14**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan**  
**Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2012-2014 (jiwa)**

No	Kegiatan Utama	2014		Jumlah 2014	Jumlah 2013	Jumlah 2012
		Laki-laki	Perempuan			
A.	Angkatan Kerja	698.419	333.203	1.031.622	1.026.245	1.013.648
1	Bekerja	600.959	277.256	878.215	880.713	899.502
2	Pengangguran Terbuka	97.460	55.947	153.407	145.532	114.146
	Pernah Bekerja	56.154	38.054	94.208	50.219	51.248
	Tidak Pernah Bekerja	41.306	17.893	59.199	95.313	62.898
B.	Bukan Angkatan Kerja	116.082	430.188	546.270	536.624	538.426
1	Sekolah	58.964	48.979	107.943	84.799	110.945
2	Mengurus rumah tangga	13.561	356.187	369.748	367.367	347.154
3	Lainnya	43.557	25.022	68.579	84.458	80.327
<b>Jumlah</b>				<b>1.562.869</b>	<b>1.562.869</b>	<b>1.552.074</b>

Sumber: BPS, Cianjur Dalam Angka 2013- 2015

### 2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Tercatat sampai saat ini terdapat kurang lebih 774 grup/sanggar kesenian dan 9 buah situs bersejarah. Setiap tahun, festival seni dan budaya selalu diselenggarakan. Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Cianjur cukup banyak, yaitu berjumlah 872 lapangan olahraga, sedangkan jumlah gelanggang/balai remaja masih sedikit.

## 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1 Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

##### 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Selama tahun 2012-2015, Angka Partisipasi Sekolah di



setiap jenjang usia sekolah terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian peningkatan jumlah penduduk usia sekolah setiap tahunnya belum mampu diimbangi oleh penyediaan layanan pendidikan yang ada serta masih kurangnya aksesibilitas terhadap layanan pendidikan. Gambaran APS kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Cianjur Tahun 2012 - 2015**

Usia	2012	2013	2014	2015
7-12	98,17	98,19	99,13	110,49
13-15	86,29	87,57	90,96	98,06
16-18	45,97	53,64	61,36	

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur Tahun 2015

2. Jumlah Murid, guru dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini

Di Kabupaten Cianjur, jumlah murid di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) terus meningkat yang diikuti dengan penambahan sarana gedung sekolah TK dan tenaga pendidik. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah TK di Kabupaten Cianjur sebanyak 188 buah, pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 188 buah, sedangkan pada ajaran 2014/2015 menjadi 241 buah.

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Murid, guru dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Tingkat Pendidikan TK		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2011	174	599	5121
2012	174	629	5452
2013	188	693	5733
2014	188	793	5371
2015	241	810	5573

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur tahun 2015



3. Jumlah Murid, Guru dan Sarana Sekolah Dasar (SD)
- Partisipasi penduduk Kabupaten Cianjur yang bersekolah di Jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan terus-menerus. Peningkatan jumlah murid diikuti juga dengan peningkatan jumlah tenaga pendidik yang mengajar di jenjang SD pada tahun ajaran 2012/2013 sampai 2013/2014. Jumlah fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Cianjur dari tahun ajaran 2012/2013 hingga tahun 2013/2014 bertambah 8 buah, tahun ajaran 2013/2014 hingga tahun 2014/2015 bertambah 1 buah. Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah fasilitas SD di Kabupaten Cianjur ada sebanyak 1252 buah yang terdiri dari SD Negeri dan Swasta.

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Dasar**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Tingkat Pendidikan SD		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2011	1243	11241	251850
2012	1247	11419	317635
2013	1233	11945	269781
2014	1251	13154	272230
2015	1252	13274	225646

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur tahun 2015

4. Jumlah Murid dan Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Jumlah Murid di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2014/2015 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Cianjur dalam mesukseskan program dasar 9 tahun meningkat. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah fasilitas pendidikan SMP di kabupaten Cianjur ada 208 unit, sedangkan pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah fasilitas pendidikan SMP di kabupaten Cianjur ada 239 unit.

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Tingkat Pendidikan SMP		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2011	156	3001	65270
2012	156	3396	95890
2013	208	3132	140070
2014	239	3859	143910
2015	239	4169	119019

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur tahun 2015

5. Jumlah Murid dan Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jumlah murid di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2012/2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun ajaran 2013/2014. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid di jenjang SMA sebanyak 14.886 murid sedangkan pada tahun ajaran 2013/2014 naik menjadi 16.009 murid. Jumlah fasilitas pendidikan jenjang SMA pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 55 unit, mengalami kenaikan 12 unit dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Fasilitas pendidikan SMA belum tersebar merata.

**Tabel 2.19**  
**Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA)**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Tingkat Pendidikan SMA		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2011	42	1174	14431
2012	42	869	16177
2013	43	911	14886
2014	55	940	16009
2015	126	1141	20638

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur tahun 2015



6. Jumlah Murid dan Sarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Jumlah murid di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun ajaran 2013/2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah murid di jenjang SMK sebanyak 34.318 murid sedangkan pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid di jenjang SMK sebanyak 18.952. Jumlah fasilitas pendidikan di jenjang SMK pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 55 buah, mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yaitu sebanyak 69 buah.

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Murid, guru dan Sarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Tingkat Pendidikan SMK		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2011	66	1412	14431
2012	66	1062	30253
2013	65	1442	18952
2014	55	1695	34318
2015	125	2385	40801

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Cianjur tahun 2015

7. Rasio Murid dengan Guru, Rasio Murid dengan Sekolah
- Rasio Murid dengan Guru, Rasio Murid dengan Sekolah, Rasio Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah, dan Guru Yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2012– 2015 disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Rasio Murid dengan Guru, Rasio Murid dengan Sekolah**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
Rasio murid : guru (Negeri dan swasta)			
TK/RA	-	1:4	1:80



Uraian	2012	2013	2014
SD/MI	1:260	1:61	1:18
SMP/MTs	1:97	1:32	1:25
SMA/SMK/MA	1:17	1:29	1:37
<b>Rasio murid : Sekolah (Negeri dan swasta)</b>			
TK/RA	1:44	1:17	1:124
SD/MI	1:217	1:350	1:246
SMP/MTs	1:342	1:353	1:558
SMA/SMK/MA	1:340	1:358	1:699
<b>Rasio Jumlah Sekolah:JumlahPenduduk Usia Sekolah</b>			
TK/RA	1:137	1:143	1:129
SD/MI dan SMP/MTs	1:539	1:305	1:233
SMA/SMK/MA	1:1.238	1:974	1:766

Sumber:Dinas Pendidikan Kab. Cianjur Tahun 2015

Selain data dan informasi terkait pendidikan yang telah diuraikan diatas, berikut ini disajikan juga data terkait pendidikan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Cianjur memandang hal ini penting untuk disajikan sebab terkait visi dan misi pembangunan selama beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.22**  
**Pendidikan Keagamaan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014**

No	Pendidikan Keagamaan	2011	2012	2013	2014
1	Sekolah				
a.	Raudatul Athfal (RA)		148	147	147
	Negeri		0		
	Swasta		148		
b.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	219	220	220	220
	Negeri	2	2	2	2
	Swasta	217	218	218	218
c.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	110	120	119	119
	Negeri	7	7	7	7
	Swasta	103	113	112	112
d.	Madrasah Aliyah (MA)	46	50	50	50
	Negeri	3	3	3	3
	Swasta	43	47	47	47
e.	P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)		1	1	1
	Negeri		0	0	0
	Swasta		1	1	1
2	Siswa/Mahasiswa				
a.	Raudatul Athfal (RA)		4.878	2.484	2.484
	Negeri				
	Swasta				
b.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)		109.169	31.602	31.602
	Negeri				



No	Pendidikan Keagamaan	2011	2012	2013	2014
	Swasta				
c.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)		29.611	29.611	29.611
	Negeri				
	Swasta				
d.	Madrasah Aliyah (MA)		11.082	11.802	11.802
	Negeri				
	Swasta				
3	Guru/Dosen				
a.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1.776	2.097	2.097	2.097
	Negeri	364			
	Swasta	1.412			
b.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1.787	1.787	1.725	1.725
	Negeri	283	283		
	Swasta	1.504	1.504		
c.	Madrasah Aliyah(MA)	567	567	439	439
	Negeri	149	149		
	Swasta	418	418		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Cianjur

### 2.3.1.2 Kesehatan

Di Kabupaten Cianjur, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

**Tabel 2.23**  
**Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur tahun 2012 - 2015**

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Poskesdes	Posyandu	Praktek Dokter	Pustu
2012	2	45	90	2.748		115
2013	2	45	90	2.748		116
2014	2	45	90	2.846		116
2015	3	45	90	2.846	366	116

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Cianjur Tahun 2015

**Tabel 2.24**  
**Tenaga Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2015**

Tenaga Kesehatan	Tahun 2015
Dokter Umum	109
Dokter Spesialis	44
Dokter Gigi	28
Perawat	901
Bidan	874
Ahli Kesehatan Masyarakat	17
Apoteker	19
Ahli Gizi	33



Tenaga Kesehatan	Tahun 2015
Sanitarian	30
Keterampilan Fisik	6
Keteknisian Medis	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Cianjur 2015

**Tabel 2.25**  
**Indikator Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	63.40	54.12	81.55	96.60
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	87.17	89.85	84.27	92.3
Cakupan Kunjungan Bayi	87.62	92.58	92.29	97.53
Cakupan Desa UCI	90	90	92.29	74.7
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	87.12	100	100%	100
Prevalensi gizi buruk	1.2	1.44	0.7	0.10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA (+)	80.15	69.24	58.32	76.10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita dg DBD yg ditangani	100	100	100%	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	36.49	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	101.463	185.855	243.621	-
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1:1.117.782	1:1.125.150	1:1.125.209	3:2.383.973

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2015

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Jaringan Jalan di Wilayah Kabupaten Cianjur

Jaringan jalan sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Dengan adanya jaringan jalan tersebut, akses masyarakat kepada fasilitas publik ataupun mobilitas perekonomian akan semakin mudah dan efisien yang pada gilirannya akan mendorong tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

Jaringan Jalan yang terdapat di wilayah Kab. Cianjur menurut status terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan Jalan desa. Pada tahun



2015, Panjang jalan Nasional sepanjang 212,45 km, Provinsi 137,85 km, sedangkan Jalan Kabupaten 1.301,697 Km, dengan kondisi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Status Jalan di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2015**

Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi Jalan (%) Tahun 2015	
		Mantap	Tidak Mantap
Jalan Nasional	212,45	100	0.00
Jalan Provinsi	137,85	96.74	3,26
Jalan Kabupaten	1.301,697	35.89	64,11
Jalan Desa	6.056,006	20,09	79,01

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kab. Cianjur Tahun 2015

Jalan di Kabupaten Cianjur terdiri dari beberapa kondisi yaitu kondisi baik, sedang, rusak, rusak berat, dan kondisi mantap. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten merupakan kondisi baik dan sedang. Data pada tahun 2011 menunjukkan jalan dalam kondisi mantap mencapai 40,42%, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 38,61%. Lalu pada tahun 2013 kondisi mantap naik menjadi 40,57%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 35,56%, dan situasi ini membaik pada tahun 2015 menjadi 35,89%. Kondisi jalan kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015**

Jenis Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
Baik (km)	231,491	251,689	212,303	196,276	244,963
Sedang (km)	294,692	250,920	315,807	266,677	222,168
Rusak (km)	378,422	327,880	380,412	423,149	439,439
Rusak Berat (km)	361,415	453,358	383,975	415,595	395,127
<b>Kondisi Mantap (%)</b>	<b>40,42</b>	<b>38,61</b>	<b>40,57</b>	<b>35,56</b>	<b>35,89</b>

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kab. Cianjur Tahun 2015

Selain jalan, jembatan juga sangat berperan penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Jumlah jembatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 689 buah dengan panjang 3.699,65 km.

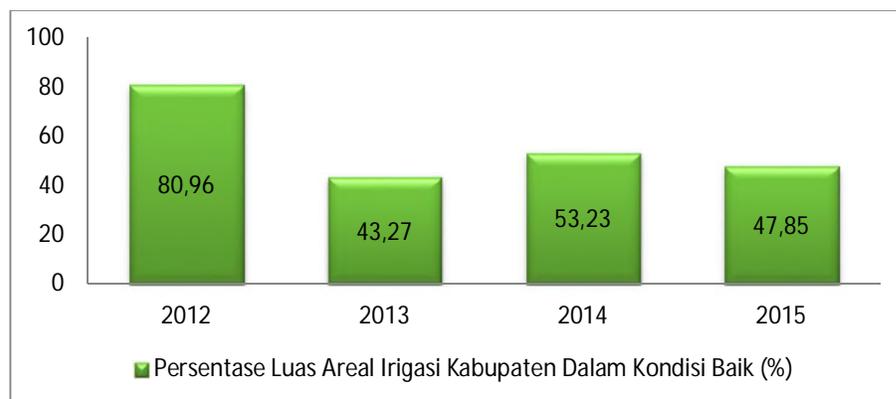


## 2. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan bagian infrastruktur penting untuk mendukung peningkatan produksi pertanian yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian di Kabupaten Cianjur. Daerah Irigasi (D.I) yang ada di Kabupaten Cianjur terbagi dalam kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2015. Dengan jumlah daerah irigasi kewenangan pusat sebanyak 1 daerah irigasi dengan luasan sebesar 5.484 hektar dan kewenangan provinsi sebanyak 7 daerah irigasi dengan luasan sebesar 7.844 hektar sedangkan kewenangan Kabupaten sebanyak 161 daerah irigasi dengan luasan 31.798 hektar.

Dari 161 daerah irigasi kewenangan Kabupaten terbagi dalam irigasi teknis sebanyak 19 daerah irigasi dengan luasan 11.563 hektar, irigasi semi teknis sebanyak 40 daerah irigasi dengan luasan 7.497 hektar dan irigasi sederhana sebanyak 102 daerah irigasi dengan luasan 15.438 hektar.

Irigasi dalam kondisi baik sejak beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan dikarenakan bertambahnya jumlah daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah dari yang semula 18 daerah irigasi yang dikelola pemerintah daerah pada tahun 2012 kemudian menjadi 68 daerah irigasi pada tahun 2013-2014 dan 161 daerah irigasi pada tahun 2015.



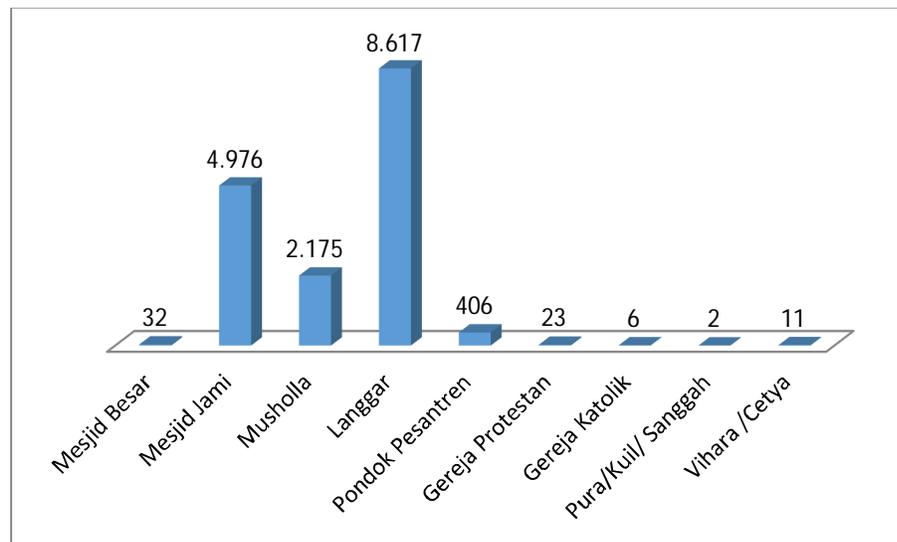
Sumber: LPPD Kab. Cianjur Tahun 2015

**Gambar 2.5 Persentase Luas Areal Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**



3. Ketersediaan tempat ibadah

Salah satu hasil pembangunan bidang keagamaan ditunjukkan dengan adanya ketersediaan sarana ibadah yang memungkinkan penduduk beragama untuk melakukan ibadahnya secara lancar dan mudah. Berikut ini adalah jumlah sarana ibadah menurut jenisnya pada setiap kecamatan.



Sumber: BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2015

**Gambar 2.6 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya**

4. Tempat Pemakaman Umum

Luas lokasi areal pemakaman yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan, dimana Tahun 2011 luasnya **203,006 m<sup>2</sup>** sedangkan di tahun 2015 meningkat menjadi **204,706 m<sup>2</sup>**.

5. Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Adapun rumah layak huni di Kabupaten Cianjur sampai tahun 2015 adalah sebesar 88,25%.

6. Drainase

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi sistem



drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan untuk mendukung pengembangan pariwisata pada tahun 2014 adalah 48,33 km, mengalami peningkatan 0.70 km dari sebelumnya yaitu sepanjang 47.63 km.

7. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat telah dibangun gedung-gedung pemerintahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 41 unit.

8. Penataan Ruang

Upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik dapat ditunjukkan dengan keberadaan ruang terbuka hijau dan jumlah bangunan yang telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kawasan RTH di Kabupaten Cianjur belum mencapai target karena kurangnya lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cianjur, di areal perkotaan. Padahal, RTH yang ditargetkan hanya sekitar 20% dari luas kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 luas eksisting RTH di kawasan perkotaan seluas 3.876,3 ha dari total luas kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur (ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku), Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang, Sukanagara, Pacet, Cipanas dan Cidaun.

### 2.3.1.4 Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman penduduk yang lebih baik dilakukan melalui penataan lingkungan permukiman khususnya pembangunan Jalan lingkungan, jalan setapak dan jembatan gantung.

1. Jalan Lingkungan, Setapak dan Jembatan Gantung

Dari total jalan lingkungan di Kabupaten Cianjur sepanjang 2.509,15 km, sampai dengan tahun 2015 telah dibangun sepanjang 911,07 km (36,31%), dan dari



total jalan setapak di Kabupaten Cianjur sepanjang 2.248,07 km, sampai dengan tahun 2015 telah dibangun sepanjang 936,97 km (41,67%). Sedangkan dari jumlah jembatan gantung di Kabupaten Cianjur sebanyak 220 unit sampai dengan tahun 2015 telah terbangun sebanyak 105 unit (47,72%).

2. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Cianjur semakin meningkat. Pada tahun 2012 dari total 593.618 rumah tangga yang ada, rumah tangga bersanitasi sebanyak 309.809 (52,19%), meningkat menjadi sebanyak 403.411 (58,58%) dari total 688.693 rumah tangga yang ada di tahun 2015.

3. Air Baku

Kebutuhan air baku sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 60 liter/orang/hari atau 0,06 m<sup>3</sup>/orang/hari dan dalam setahun dibutuhkan sebanyak 21,9 m<sup>3</sup>/orang/tahun.

Ketersediaan air baku di Kabupaten Cianjur dalam setahun harus terpenuhi sebanyak 49.141.498 m<sup>3</sup>, akan tetapi saat ini sampai tahun 2015 masih belum terpenuhi secara maksimal. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari baru mencapai 57,87% atau sebanyak 28.438.184,66 m<sup>3</sup>/jiwa/tahun.

4. Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan kumuh perkotaan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 648/Kep.196-Tarkim/2014 seluas 34,40 Ha yang tersebar di wilayah perkotaan Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cipanas (di 3 kelurahan dan 2 desa).

### 2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kondisi stabilitas keamanan daerah terutama yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cianjur relatif cukup aman dan terkendali, sehingga apa yang dikhawatirkan misalnya konflik-konflik yang berbasis



isu SARA, anarkisme, separatisme atau konflik-konflik horizontal lainnya tidak terjadi. Hal ini merupakan keberhasilan dari para aparat Pemerintah Kabupaten Cianjur terutama yang menangani masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum disamping itu juga peran serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk selalu menjaga stabilitas daerahnya.

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama, baik aparat pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional baik dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Badan Satuan POL PP selalu mengadakan koordinasi dengan instansi/aparat terkait baik secara formal, non formal, rapat koordinasi maupun mediasi tim-tim terpadu diantaranya koordinasi dengan Kepolisian Resort Cianjur, Kodim, Kejaksaan Negeri serta Unsur Muspida.

#### 2.3.1.6 Sosial

Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Cianjur yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Cianjur tahun 2012-2014 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial Tahun 2015**

Deskripsi	2015
Anak Jalanan	208
Penghuni Panti Asuhan	1.869
Gepeng (gembel dan Pengemis)	131
Jumlah Penderita HIV/AIDS	23
Jumlah Pecandu Narkoba	2.562
Fakir Miskin	211.066
Bayi Terlantar	1766
Anak Terlantar	3.908
Lanjut Usia Terlantar	8.043
Penyandang Cacat	5077

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Cianjur Tahun 2015



Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun 2014 meningkat 5 buah dari tahun 2012, dimana di tahun 2012 berjumlah 30 buah sedangkan di tahun 2014 menjadi sejumlah 35 buah.

### 2.3.1.7 Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja dari tahun 2012 – 2014 mengalami penurunan dari 88,74 menjadi 85,13. Data mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Cianjur pada usia diatas 15 Tahun dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.29**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

TPAK/TPT	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angka Kerja	88,74	85,82	85,13	89,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,26	14,18	14,87	10,06
Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja	65,31	65,66	65,38	60,30

Sumber: BPS Kab. Cianjur Tahun 2015

### 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah sudah cukup tinggi di tahun 2015 47,31% dan partisipasi perempuan di lembaga swasta jauh lebih tinggi mencapai 72,29%. Hal ini menunjukkan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan nilai yang sangat kecil yaitu 0,0012 di tahun 2015, yang menunjukkan sangat rendahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Cianjur.



### 2.3.1.9 Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Pola pangan harapan sudah mencapai nilai 65,67 di tahun 2015, hal ini menunjukkan adanya situasi pangan cukup beragam serta cukup baik dalam hal komposisi dan mutu gizinya.

### 2.3.1.10 Pertanahan

Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Cianjur baru mencapai 10,52%. Lahan yang bersertifikat sebesar 1,052,472.00 m<sup>2</sup> dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 10,008,068.00 m<sup>2</sup> di tahun 2015.

### 2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Selain masalah pencemaran, masalah pengelolaan sampah juga sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sarana pengangkut sampah ada 21 unit dengan kondisi baik sebanyak 2 buah, kondisi sedang 17 buah dan kondisi rusak 2 buah. Untuk cakupan wilayah penanganan sampah di kabupaten Cianjur baru 11 kecamatan yaitu Haurwangi, Ciranjang, Karangtengah, Sukaluyu, Cugenang, Pacet, Gekbrong, Cilaku, Warungkondang, Cianjur dan Cipanas.

**Tabel 2.30**  
**Persentase Penanganan Sampah dan penegakan hukuman lingkungan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Persentase Penanganan Sampah	4,2	5	5	5
Terpantaunya Kualitas Air Sungai di Kabupaten Cianjur	20 titik	20 titik	20 titik	20 titik



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015

## 1. Baku Mutu Air

Kondisi eksisting terkait pencemaran air maupun udara saat ini belum terlalu mengkhawatirkan, akan tetapi walaupun begitu perlu adanya perhatian secara khusus melalui program dan kegiatan karena dari parameter yang ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat pencemaran baik air maupun udara berada diatas baku mutu sehingga kalau dibiarkan akan berdampak terhadap lingkungan.

Pencemaran air akan menurunkan kualitas air permukaan atau air sungai akibat dari adanya air limbah yang bersumber dari limbah perusahaan maupun limbah rumah tangga yang tidak melalui pengolahan air limbah (IPAL)

Dalam pencemaran air, dari parameter Biological Oxygen Demand (BOD) menunjukkan bahwa hasil laboratorium dari sampel yang diambil di 20 titik lokasi sungai yang tersebar di Kabupaten Cianjur menunjukkan sebagian besar terdapat pencemaran air yang melebihi ambang batas baku mutu. Berdasarkan hasil analisis, pencemaran air disebabkan oleh 2 dua faktor yaitu dari limbah industri dan limbah Domestik. Saat ini limbah domestik masih sangat dominan (sekitar 90%) dan sangat sulit untuk penanganannya karena melibatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam merubah prilaku.

Salah satu sampel Pencemaran air berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan tahun 2015, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.31**  
**Hasil Pengujian Kualitas Air pada Sungai Cisokan Kecamatan Leles Tahun 2015**

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
	<b>FISIKA</b>				
1	Padatan Terlarut Total (TDS)	mg/L	1.000	80,00	SNI 06-6989.27-2015
2	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	50	10,00	SNI 06-6989.3-2004
	<b>KIMIA</b>				
1	Arsen (As) *	mg/L	1	<0,05797	USEPA Methode No 200.7
2	Boron (B)	mg/L	1	<0,07232	USEPA Methode No 200.7



NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
3	BOD <sup>5</sup>	mg/L	3	5,20 <sup>^</sup>	SNI 6989.7272:2009
4	COD	mg/L	25	15,0213	SNI 6989.2:2009
5	Derajat Keasaman(PH)	-	6,0-9,0	8,13	SNI 06-6989.11-2004
6	Deterjen (MBAS)	mg/L	0,2	0,4974 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.51-2005
7	Fenol	mg/L	0,001	0,0200 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.21-2004
8	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0,0205	SNI 6989.16:2009
9	Kobal (Co)	mg/L	0,2	0,0998	SNI 6989.68:2009
10	Krom Heksavalen (Cr-VI)	mg/L	0,05	0,2018 <sup>^</sup>	SNI 6989.71:2009
11	Minyak dan Lemak	mg/L	1	<2,21	SNI 6989.10:2011
12	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	10	5,8987	SNI 6989.79:2011
13	<b>Nitrit (NO<sub>2</sub>-N)</b>	mg/L	0,06	0,0587	SNI 06-6989.9-2004
14	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	<4	3,80 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.14-2004
15	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	<0,01320	USEPA Methode No 200.7
16	Selenium (Se)	mg/L	0,05	<0,01797	USEPA Methode No 200.7
17	Seng (Zn)	mg/L	0,05	<0,0052	SNI 6989.7:2009
18	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	<0,0240	SNI 6989.77:2011
19	Sulfida (S <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	0,002	0,0369 <sup>^</sup>	SNI 6989.70:2009
20	Tembaga (CU)	mg/L	0,02	0,0482 <sup>^</sup>	SNI 6989.68:2009
21	Timbal (pb)	mg/L	0,03	0,0431	SNI 6989.8:2009
22	Total Fasfat Sebagai P	mg/L	0,2		SM 4500-P.D**
<b>MIKROBIOLOGI</b>					
1	Caliform	jml/100 ml	5.000	2,1 X 10 <sup>4</sup> <sup>^</sup>	SM 9221 B**
2	E. Coli	jml/100 ml	1.000	7,5 X 10 <sup>3</sup> <sup>^</sup>	SM 9221 E**

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

Tabel 2.32

Hasil Pengujian Kualitas Air pada Sungai Cipandak Kecamatan Naringgul Tahun 2015

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
<b>FISIKA</b>					
1	Padatan Terlarut Total (TDS)	mg/L	1.000	20,00	SNI 06-6989.27-2005
2	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	50	8,00	SNI 06-6989.3-2004
<b>KIMIA</b>					
1	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	mg/L	1	<0,05797	USEPA Methode No 200.7
2	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	mg/L	1	<0,07232	USEPA Methode No 200.7
3	BOD <sup>5</sup>	mg/L	3	5,80 <sup>^</sup>	SNI 6989.72:2009
4	COD	mg/L	25	17,6789	SNI 6989.2:2009
5	Derajat Keasaman(PH)	-	6,0-9,0	7,61	SNI 06-6989.11-2004
6	Deterjen (MBAS)	mg/L	0,2	0,4040 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.51-2005



NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
7	Fenol	mg/L	0,001	0,1200 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.21-2004
8	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0,0205	SNI 6989.16:2009
9	Kobal (Co)	mg/L	0,2	0,0277	SNI 6989.68:2009
10	Krom Heksavalen (Cr-VI)	mg/L	0,05	0,0694 <sup>^</sup>	SNI 6989.71:2009
11	Minyak dan Lemak	mg/L	1	<2,21	SNI 6989.10:2011
12	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	10	5,315	SNI 6989.79:2011
13	<b>Nitrit (NO<sub>2</sub>-N)</b>	mg/L	0,06	0,0821 <sup>^</sup>	SNI 06-6989,9-2004
14	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	>4	3,20 <sup>^</sup>	SNI 06-6989.14-2004
15	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	<0,01320	USEPA Methode No 200.7
16	Selenium (Se)	mg/L	0,05	<0,01797	USEPA Methode No 200.7
17	Seng (Zn)	mg/L	0,05	<0,0052	SNI 6989.7:2009
18	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	<0,0240	SNI 6989.77:2011
19	Sulfida (S <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	0,002	3,0363 <sup>^</sup>	SNI 6989.70:2009
20	Tembaga (CU)	mg/L	0,02	0,0544 <sup>^</sup>	SNI 6989.6:2009
21	Timbal (pb)	mg/L	0,03	0,0665 <sup>^</sup>	SNI 6989.8:2009
22	Total Fوسفat Sebagai P	mg/L	0,2	0,0565	SM 4500-P.D**
<b>MIKROBIOLOGI</b>					
1	Caliform	jml/100 ml	5.000	2,9 X 10 <sup>4</sup> <sup>^</sup>	SM 9221 B**
2	E. Coli	jml/100 ml	1.000	9,3 X 10 <sup>3</sup> <sup>^</sup>	SM 9221 E**

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

## 2. Baku Mutu Udara

Jenis Contoh Uji yang dilakukan untuk menganalisis tingkat pencemaran udara yaitu udara ambien dan udara indoor serta udara emisi. Dari indikator tersebut yang menunjukkan tingkat pencemaran diatas ambang baku mutu adalah indikator emisi dengan parameter tingkat kebisingan. Untuk Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena seiring dengan perkembangan waktu saat ini semakin banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menjadi sumber pencemar di kabupaten cianjur.

Pengukuran kualitas udara dilakukan untuk memantau kondisi udara di lokasi titik sampel sehingga apabila terjadi pencemaran udara dari suatu kegiatan, dikemudian hari dapat dibandingkan dengan data awalnya. Pengambilan titik sampel kualitas udara ambient dan tingkat kebisingan dilakukan pada satu



titik dilokasi titik sampel, dengan parameter (1) Pencemar udara adalah kimia dan fisika, (2) Kebauan dan (3) kebisingan.

Salah satu sampel Pencemaran udara berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan tahun 2015, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.33**  
**Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015**  
**Berdasarkan Parameter Pencemar Udara**

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
	<b>KIMIA</b>				
1	Nitrogen Dioksida ( $NO_2$ )	$\mu g/Nm^3$	400	< 10	SNI 19-7119.2-2005
2	Sulfur Dioksida ( $SO_2$ )	$\mu g/Nm^3$	900	< 17,15	SNI 19-7119.7-2005
3	Karbon Monoksida ( $CO$ )	$\mu g/Nm^3$	30.000	< 1.145	Direct Reading
4	Oksidan ( $O_3$ )	$\mu g/Nm^3$	235	< 15,61	SNI 19-7119.8-2005
	<b>FISIKA</b>				
1	Timbal (Pb)	$\mu g/Nm^3$	0	0,1	SNI 19-7119.4-2005
2	Debu (TSP)	$\mu g/Nm^3$	0	17,7	SNI 19-7119.3-2005

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

**Tabel 2.34**  
**Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015**  
**Berdasarkan Parameter Kebauan**

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
1	Hidrogen Sulfida ( $H_2S$ )	ppm	0,02	<0,001	JLS K-0108-1995
2	Amoniak ( $NH_3$ )	ppm	2	<0,025	SNI 19-7119.1-2005

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

**Tabel 2.35**  
**Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada Taman Ramayana Cianjur Tahun 2015**  
**Berdasarkan Parameter Kebisingan**

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result	METODA ACUAN Method Reference
1	Kebisingan	Db	50	60,75 <sup>^</sup>	Kep-48/MENLH/11/1996



Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

**Tabel 2.36**  
**Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi pada PT. Pasic Indonesia Tahun 2015**

NO	PARAMETER Parameter	SATUAN Unit	BAKU MUTU * Specification	HASIL PENGUJIAN Testing Result
	<b>FISIKA</b>			
1	Opasitas	%	35	5
2	Partikel	mg/m <sup>3</sup>	350	6,52
	<b>KIMIA</b>			
1	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	0,5	< 0,02
2	Gas klorida(Cl <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	10	< 0,02
3	Hidrogen Klorida (HCl)	mg/m <sup>3</sup>	5	< 0,02
4	Hidrogen Fluorida(HF)	mg/m <sup>3</sup>	10	< 0,02
5	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	1.000	1,88
6	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	800	< 1
7	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/m <sup>3</sup>	35	< 0,1

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Kota Bandung

### 3. Cagar Biosfer

Cagar Biosfer (Biosfere Reserve) erat kaitannya dengan Program MAB (Man And the Biosphere) di UNESCO, maksud dasar pembentukannya adalah untuk menyeimbangkan tujuan yang tampaknya bertentangan antara pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi serta pemeliharaan nilai-nilai yang terkait dengan budayanya. Secara singkat misi Program MAB yang dilahirkan pada tahun 1968 ini adalah mempromosikan dan mendemonstrasikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam dengan pendekatan ekosistem/bioregional.

Kawasan Cibodas dengan area inti (core area) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer Cibodas sejak tahun 1977, mencakup kawasan konservasi, lansekap alami, dan kawasan budidaya, yang perlu dikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan bersinergi antara berbagai Instansi yang berwenang, melalui peran dan tanggungjawab agar dapat memberi manfaat dalam mendukung dan menyelaraskan



konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pendidikan.

Cagar Biosfer sebagai situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program MAB-UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati serta pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal.

Cagar Biosfer mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

- a. Pelestarian keanekaragaman biologi dan budaya;
- b. Penyediaan model pengelolaan lahan dan lokasi eksperimen untuk pembangunan berkelanjutan;
- c. Penyediaan tempat untuk riset, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pelatihan.

Sebuah Cagar Biosfer didefinisikan sebagai suatu kawasan konservasi ekosistem daratan dan pesisir/laut atau kombinasi, lebih dari satu tipe ekosistem yang secara internasional diakui keberadaannya sebagai bagian dari Program MAB-UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Cagar Biosfer melayani perpaduan tiga fungsi yaitu :

- a. Kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis, dan plasma nutfah;
- b. Menyuburkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik secara ekologi maupun budaya;
- c. Mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Untuk mengintegrasikan berbagai fungsi tersebut, kegiatannya diatur menurut sistem pembagian wilayah (*Zonation*), yang meliputi area inti (*core area*) untuk pelestarian, zona penyangga (*buffer zone*), dan kawasan terluar yang merupakan area transisi (*transition area*) atau kawasan untuk kerjasama dengan masyarakat lokal.

Adapun pembagian Zonasi tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang satu sama lain berhubungan yaitu :



- a. Zona Inti (*Core Area*)  
Areal ini merupakan kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan luas yang memadai, mempunyai perlindungan hukum jangka panjang, untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.
- b. Zona Penyangga (*Buffer Zone*)  
Adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.
- c. Zona Transisi (*Transition Zone*)  
Adalah wilayah terluar dan terluas yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona penyangga.

Gabungan zona penyangga dan area transisi dapat menjadi koridor dan dapat menjamin keberfungsian ekologi area inti. Disamping melestarikan keanekaragaman hayati alami di area inti, praktek-praktek pengelolaan Cagar Biosfer harus memperhatikan juga keanekaragaman hayati dalam zona penyangga dan area transisi.

Untuk keperluan efektifitas pengelolaan, wilayah Cagar Biosfer harus mempunyai "batas" yang jelas, bukan pal batas. Kepastian tentang batas kawasan Cagar Biosper diperlukan dalam implementasi pedoman pengelolaan Cagari Biosper dan identifikasi para pemangku kepentingan, guna menghindari terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari.

### **2.3.1.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

1. Penduduk yang Memiliki KTP



Kepemilikan KTP pada tahun 2015 mencapai 83,31% atau sejumlah 1,355,705 orang pemilik KTP baik KTP Elektronik maupun KTP Non Elektronik dari 1,627,262 orang yang wajib memiliki KTP.

2. Penduduk Berakte Kelahiran

Penduduk yang memiliki akte kelahiran baru sekitar 1,258,651 orang dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2,217,460 orang. Warga yang tidak memiliki akta kelahiran mayoritas di wilayah Cianjur Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan administrasi kependudukan di tempat agar mudah terjangkau oleh masyarakat yang dilakukan di wilayah kecamatan, melalui kegiatan sosialisasi kependudukan kepada masyarakat.

3. Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga

Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Cianjur untuk memiliki KK sudah tinggi, hal ini terlihat dari telah dibuatnya 828.656 KK dari jumlah keluarga sebanyak 970.553 kepala keluarga. Ini berarti sebanyak 85,37% kepala keluarga di Kabupaten Cianjur sudah memiliki Kartu Keluarga.

**Tabel 2.37**  
**Status Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014
Kepemilikan Kartu Keluarga	73.41	75.68	89.38

Sumber: Lakip Kabupaten Cianjur Tahun 2014

Pada Tabel diatas dapat dilihat indikator kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2014 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 73.41% di tahun 2012 menjadi 89.38% di tahun 2014. Selama tahun 2014 Kartu Keluarga yang diterbitkan sebanyak 207.649 dokumen, 90% dari jumlah tersebut sebanyak 186.884 dokumen berupa perbaikan dokumen Kartu Keluarga karena adanya perubahan elemen data penduduk sedangkan 10% dari jumlah Kartau Keluarga yang diterbitkan sebanyak



20.765 dokumen merupakan Kartu Keluarga yang diterbitkan karena adanya perkawinan atau pindah datang ke Kabupaten Cianjur.

Dengan demikian hasil kepemilikan kartu keluarga sampai dengan tahun 2014 setelah diakumulasi dengan hasil pada tahun 2013 sebanyak 751.525 KK dari total jumlah Keluarga yang wajib memiliki Kartu Keluarga sebanyak 840.772 KK. Meskipun mengalami peningkatan namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu masih ditemukan permasalahan terkait dengan keterbatasan peralatan termasuk belum optimalnya kapasitas jaringan Sistem Informasi Kependudukan (SIK), terbatasnya sumber aparatur dan tenaga operator. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan di tingkat Kabupaten juga menyebabkan tidak optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Cianjur mengingat kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas dan sulit dijangkau terutama di wilayah Cianjur bagian selatan sehingga prosesnya pun akan memakan waktu yang lebih lama dan menimbulkan rasa enggan dari masyarakat untuk memiliki kartu keluarga.

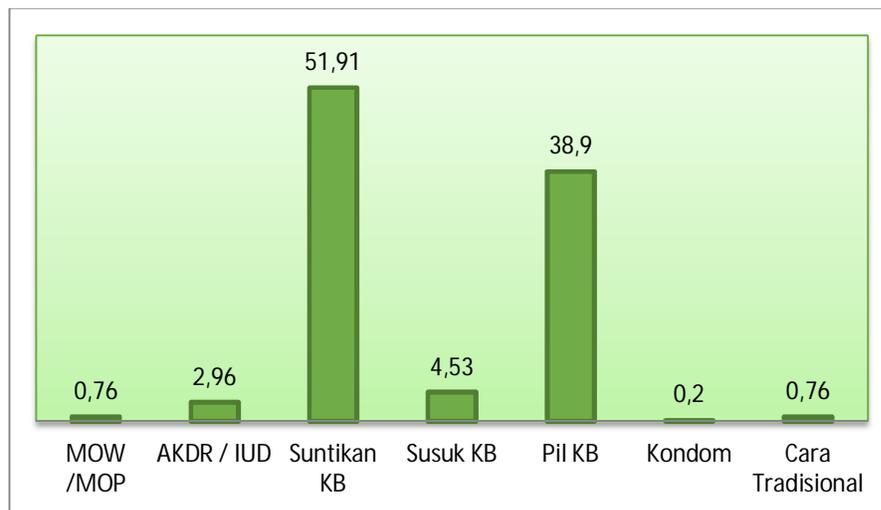
#### **2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya ditunjukkan oleh berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan, penerapan teknologi tepat guna, PKK dan posyandu aktif. Lembaga ekonomi perdesaan sampai dengan 2014 ini telah mencapai 127 unit yang terdiri dari kelembagaan BUMDes, pasar desa dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat. Sedangkan keberhasilan dalam teknologi tepat guna ditunjukkan dengan terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di 32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur. Adapun PKK yang aktif sebanyak 7.184 orang sedangkan jumlah posyandu aktif sebesar 2.855 unit yang tersebar di 32 Kecamatan yang ada.

#### **2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Peserta KB aktif yang ada di Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 berjumlah 409.752 pasangan dari pasangan usia subur sebanyak 578.182 pasangan (70,87%). Dengan rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,34. Berdasarkan pemakaian alat KB, peserta KB Kabupaten Cianjur sebagian besar masih menggunakan kontrasepsi suntik dan pil, sedangkan jenis kontrasepsi yang paling sedikit digunakan yaitu MOW/Tubectomy.



Sumber: BPS Kab.Cianjur Tahun 2015

**Gambar 2.7 Persentase Akseptor KB Perempuan Usia 15 – 49 tahun Menurut Pemakaian Alat KB di Kabupaten Cianjur Tahun 2014**

### 2.3.1.15 Perhubungan

#### 1. Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan meliputi shelter/pangkalan/halte dan terminal angkutan penumpang. Kabupaten Cianjur sampai saat ini baru memiliki 4 tempat terminal yaitu Terminal Rawabango (type B), Terminal Pasirhayam (type B), Terminal Cipanas (type C), dan Terminal Ciranjang (type C) serta 18 halte/shelter/pangkalan.

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Prasarana Perhubungan di Wilayah Kabupaten Cianjur**



**Tahun 2011-2015**

No	Prasarana Perhubungan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terminal	4	4	4	4	4
2	Halte/Shelter/Pangkalan	-	-	18	18	18

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

2. Jumlah Angkutan Darat

Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Cianjur sebanyak 4.887 unit yang melayani penumpang umum sebanyak 44.152.527 orang di tahun 2015. Adapun angkutan umum dibagi menjadi dua kategori yaitu Angkutan Umum Dalam Trayek dan Angkutan Perintis dengan rincian jumlah angkutan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Perintis**  
**Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2015**

No	JENIS ANGKUTAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angkutan Umum Dalam Trayek	4.158	4.181	4.181	4.181	4.248
2.	Angkutan Perintis	23	0	0	67	0
<b>JUMLAH</b>		<b>4.181</b>	<b>4.181</b>	<b>4.181</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>

Sumber : Dishubkominfo,2015

3. Jumlah Trayek Angkutan Penumpang Umum

Menurut Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.21/Kep.320-Dishubkominfo/2014 tentang Perubahan Atas keputusan bupati Cianjur Nomor: 551.21/kep.154-Pe/2009 tentang Jaringan Trayek Dan Alokasi Angkutan Penumpang Umum terdapat 109 Trayek Angkutan Penumpang Umum, sebagai mana tabel berikut.

**Tabel 2.40**



**Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum  
di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2015**

No	Trayek Angkutan Umum	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jaringan Trayek Angkutan Tetap	73	73	73	83	99
2	Jaringan Trayek Angkutan Perintis	17	17	17	7	10

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

4. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan meliputi ketersediaan rambu, marka, pagar pengaman, paku jalan, dan PJU. Berikut ini data fasilitas perlengkapan jalan :

**Tabel 2.41**  
**Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cianjur**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Fasilitas Pengembangan Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rambu (buah)	1.079	1.480	1.756	2.292	3.298
2	Marka (m')	90.773	90.773	92.773	104.637	109.837
3	Pagar Pengaman Jalan (m')	407	453	453	453	453
4	Paku Jalan (buah)	-	-	-	-	790
5	PJU (buah)	556	682	682	702	722

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

**2.3.1.16 Komunikasi Dan Informatika**

Pemerintah saat ini telah menerapkan sistem komunikasi dan informasi berbasis internet ditandai dengan adanya website milik pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah telah melaksanakan beberapa pameran/expo dan memanfaatkan stasiun radio untuk menginformasikan program-program pembangunan maupun hasil pembangunan.



### 2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jumlah koperasi aktif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan data 2015 yang menunjukkan 470 unit koperasi aktif. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang berjumlah 349 unit. Sedangkan jumlah UMKM cenderung lebih stabil dan tidak mengalami perubahan yaitu 67.000.

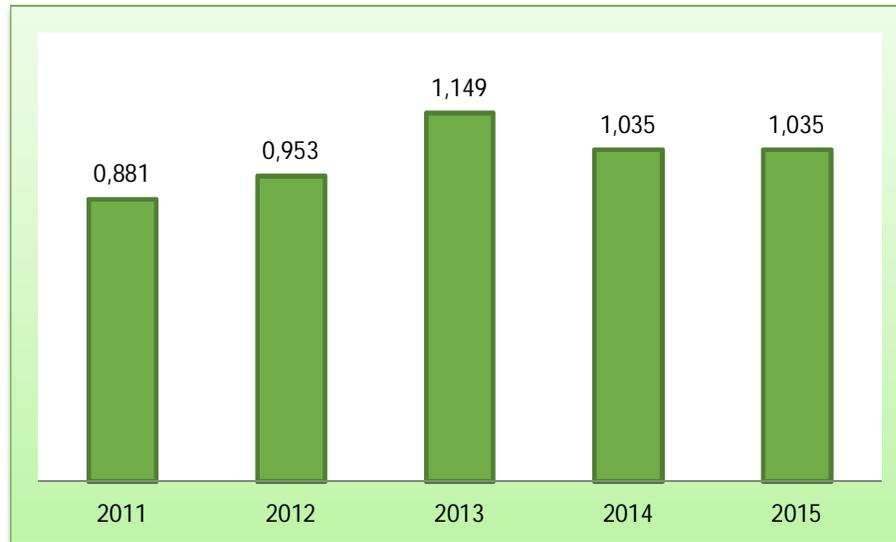
**Tabel 2.42**  
**Perkembangan Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi (unit)	1.361	1.376	1.387	1.417	1.427
2	Anggota koperasi (orang)	75.280	75.580	75.800	76.400	76.600
3	Jumlah Koperasi aktif (unit)	349	380	410	440	470
4	Jumlah UMKM	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap (orang)	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM dan Lakip Tahun 2015

### 2.3.1.18 Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Cianjur menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir dengan nilai investasi tahun 2015 sebesar 1,56 triliun rupiah. Data investasi PMA dan PMDN disajikan dalam tabel berikut:



Sumber: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

**Gambar 2.8 Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

#### 2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh ketersediaan sarana olahraga yang memadai. Gelanggang remaja berjumlah sebanyak 220 buah, sedangkan jumlah lapangan olahraga sebanyak 580 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.

#### 2.3.1.20 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti: Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten". Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Buku Kabupaten Dalam Angka Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Cianjur terdiri dari kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dll. Sedangkan Buku PDRB Kabupaten Untuk mengetahui sejauhmana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Cianjur.



### **2.3.1.21 Kebudayaan**

Kabupaten Cianjur mempunyai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Untuk mewujudkan pelestarian budaya yang ada Pemerintah telah melaksanakan penyelenggaraan festival seni budaya yang rutin setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 15 kali event. Selain itu, terdapat sekitar 38 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya turut serta dilestarikan.

### **2.3.1.22 Perpustakaan**

Untuk mendorong minat baca masyarakat, Pemerintah telah mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya perpustakaan daerah sebanyak 1 buah dengan koleksi buku sejumlah 15.210 eksemplar, kendaraan perpustakaan keliling sebanyak 2 unit, dan perpustakaan desa sebanyak 47 buah. Adapun jumlah pengunjung di perpustakaan yang ada di Kabupaten Cianjur sebanyak 337.464 pengunjung di tahun 2015.

### **2.3.1.23 Kearsipan**

Pengelolaan Arsip secara baku telah diterapkan hampir di seluruh unit organisasi pemerintahan Kabupaten Cianjur dengan tingkat capaian sebesar 91,78%. Sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi kearsipan di Bidang Pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip tersebut telah dilaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia kepada 107 pengelolaan kearsipan di berbagai unit organisasi yang ada.

## **2.3.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan oleh berbagai keberhasilan diantaranya ketepatan waktu dalam penetapan APBD maupun pertanggungjawabannya, peningkatan opini BPK dari yang sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian



(WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan 2016. Selain itu, rasio belanja langsung terhadap total APBD terus mengalami peningkatan, dari 34,8% menjadi 40,45% pada tahun 2015 yang menunjukkan adanya peningkatan pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Namun dari sisi pengelolaan aset daerah masih perlu ditingkatkan, sampai pada tahun 2015 baru tercapai 60,50% aset yang telah terinventarisasi.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015**

Indikator kinerja OPD	Capaian Setiap Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Perda APBD tepat waktu	20-Jan	28-Des	27-Des	27-Des	27-Des
Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	31-Juli	10-Agustus	15-Juli	15-Juli	02-Juli
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah	34,8	40.00	40.20	40.40	40.45
Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah	41,20	60.00	59.80	59.60	59.00
Inventarisasi Aset Daerah	57,50	57.50%	60.00%	60.50%	60.50%

Sumber: DPKAD Kab. Cianjur Tahun 2015

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari total 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2013, 42 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 8 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Anggota DPRD berjenis kelamin perempuan merupakan wakil rakyat dari Partai PDI Perjuangan, Partai demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.

**Tabel 2.44**  
**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik**  
**dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur Tahun 2014**

Partai Politik	Anggota			Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
PDI Perjuangan	5	2	7	14
Partai Demokrat	8	2	10	20
Partai Golkar	8	-	8	16
Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3	6
Partai Keadilan Sejahtera	4	1	5	10
Partai Kebangkitan Bangsa	4	-	4	8
Partai Bulan Bintang	1	1	2	4
Partai Hanura	3	1	4	8
Partai Gerindra	4	1	5	10
Partai Amanat Nasional	1	-	1	2
Partai Nasdem	1	-	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Sekwan DPRD Kab. Cianjur Tahun 2015

### 3. Kepegawaian

Tenaga kerja berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai tahun 2015 berjumlah 15.030 orang yang terbagi kedalam berbagai golongan kepangkatan dan tersebar diberbagai dinas, badan, lembaga teknis, kecamatan, kelurahan dan desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 tercatat sebanyak 15.030 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur**  
**Berdasarkan gol./ruang tahun 2015**

No	Golongan Ruang	Jumlah	%
1	I a	6	0,04
2	I b	25	0,17
3	I c	107	0,71



No	Golongan Ruang	Jumlah	%
4	I d	30	0,2
5	II a	467	3,11
6	II b	555	3,69
7	II c	701	4,66
8	II d	327	2,18
9	III a	1.988	13,23
10	III b	2.383	15,85
11	III c	1.359	9,04
12	III d	1.336	8,89
13	IV a	4.837	32,18
14	IV b	871	5,8
15	IV c	38	0,25
Jumlah		15.030	100

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015

**Tabel 2.46**  
**Status SIM Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Sistem Informasi Manajemen Pemda	53	5	28	10
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LPPD Kab. Cianjur Tahun 2011-2015

#### 4. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Cianjur yang telah disusun terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011, dan RPJMD 2011-2016 yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam



Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan/Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Cianjur. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

#### 2.3.3.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Cianjur. Sektor ini memberi kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Cianjur dibandingkan sektor-sektor lain. Produksi pertanian yang diwakili oleh produksi padi sangat dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga mengalami fluktuasi produksi. Pada tahun 2015 nilai produksi mencapai 864.358 ton, sedangkan produksi perkebunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai produksi pada tahun 2015 mencapai 44.499,11 ton. Untuk produksi peternakan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai produksi pada tahun 2015 mencapai 71.002 ton, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.47**  
**Indikator kinerja Bidang Pertanian**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

No.	Indikator kinerja Bidang Pertanian	Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun: Padi (ton)	761.167	903.546	925.966	913.793	864.358
2	Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun produk	33.440	35.355,44	40.277,62	44.433,12	44.499,11



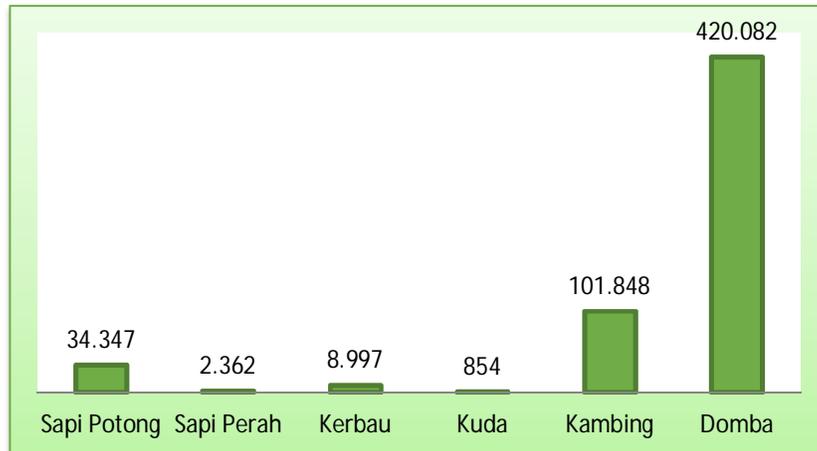
No.	Indikator kinerja Bidang Pertanian	Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	perkebunan (ton)					
3	Peningkatan Produksi Peternakan (ton)	63.179	64.243	62.555	68.424	71.002

Sumber: LKPJ AMJ Kab. Cianjur Tahun 2015

Luas tanam padi sawah di Kabupaten Cianjur mencapai 152.317 ha, luas tanam terbanyak berada di Kecamatan Takokak mencapai 9.246 ha, kemudian di Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Cilaku masing 7.647 ha dan 7.509 ha Sementara itu luas panen padi sawah terbesar berada di kecamatan Sukaluyu mencapai 2.404 ha kemudian di Kecamatan Campaka dan Kecamatan Haurwangi masing-masing 1.771 ha dan 1.683 ha

Luas areal perkebunan di Kabupaten Cianjur mencapai 50 ribu ha lebih, yang terdiri dari perkebunan besar negara seluas 5.050,64 ha, perkebunan besar swasta seluas 9.400,22 ha dan perkebunan rakyat mencapai 36.466,83 ha. Apabila diurutkan 5 terbesar tanaman perkebunan terluas yaitu teh seluas 23.613,30 ha, kelapa 8.574,55 ha dan karet 5.846,67 ha.

Pada tahun 2014 populasi ternak besar yaitu sapi potong sebanyak 34.347 ekor, sapi perah berjumlah 2.362 ekor dan populasi kerbau mencapai 8.997 ekor. Populasi ternak Sapi terbanyak ada di Kecamatan Cikalongkulon sebanyak 11.852 ekor, kemudian di kecamatan Agrabinta dan Leles masing-masing 5.798 ekor dan 2.709 ekor, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Cianjur Dalam Angka Tahun 2015

**Gambar 2.9 Populasi Ternak Kab. Cianjur Tahun 2014**

### 2.3.3.2. Kehutanan

Dalam penyusunan rencana tata ruang, dipertimbangkan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya sehingga suatu wilayah dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Rencana pola ruang kabupaten cianjur tahun 2031 dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 217.653,87 Ha (60,22%) dan kawasan budidaya sebesar 143,781,64 Ha (39,78%)

Kawasan lindung di kabupaten Cianjur sebesar 53.781,07 Ha, yang terdiri dari kawasan lindung di luar kawasan hutan sebesar 8.269,52 Ha dan kawasan Lindung di dalam kawasan hutan sebesar 45.511,55. Kawasan Lindung di dalam kawasan hutan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan luas kawasan lindung di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani, BKSDA dan Taman Nasional serta Cagar Biosfer Cibodas (CBC) yang merupakan situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program MAB-UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dengan perikehidupan masyarakat serta konsep pengelolaan pembangunan berkelanjutan, melalui upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Cagar Biosfer Cibodas mencakup luasan sekitar 114.779 Ha, secara administratif berada di Kabupaten Cianjur, Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Cagar Biosfer Cibodas meliputi:

1. Area Inti :Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 22.851,030 ha;



2. Area Transisi : Permukiman dan lahan budidaya lainnya seluas 80.104 ha.  
Lokasi Cagar Biosfer Cibodas sangat strategis diantaranya yaitu:
  1. Sebagai penyangga kehidupan bagi kota-kota disekitarnya (Jabotabekpuncur)
  2. Hulu 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS); Ciliwung, Citarum, Cimandiri, Cisadane;
  3. Penyuplai air bagi 5 (lima) PLTA; Jatiluhur, Saguling, Cirata, Cimandiri dan Cisokan;
  4. Menjaga kelestarian keaneragaman hayati tertinggi di Pulau Jawa.

Selanjutnya peningkatan kawasan lindung dan budidaya adalah melalui kompensasi lahan penggantian dari aktivitas kegiatan diluar kabupaten karena sering diarahkan ke kabupaten Cianjur sebagai pengganti lahan yang dipakai. Dibawah ini merupakan persentase cakupan kawasan lindung di luar kawasan hutan, diantaranya :

**Tabel 2.48**  
**Cakupan Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha)	8.258	8.265,09	8.265,27	8.269,52	8.269,52
Kawasan lindung di dalam kawasan hutan (ha)	44.411,76	44.956,46	44.956,46	45.511,55	45.511,55
Total luas kawasan lindung (ha)	52.668,76	53.221,55	53.221,73	53.781,07	53.781,07
Persentase cakupan kawasan lindung diluar kawasan hutan	15,67	15,52	15,53	15,38	15,71

Sumber: Lakip Kabupaten Cianjur Tahun 2015

Adapun luas lahan kritis dan lahan yang direhabilitasi sebesar 8.331,22 Ha selama periode tahun 2012-2015. Adapun tingkat kerusakan hutan masih terjadi dengan tingkat kerusakan pada tahun 2015 sebesar 0,03%, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Cianjur dapat dikendalikan.



**Tabel 2.49**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dan Kerusakan Kawasan Hutan**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	641	3.332	3.624,23	733,99
Kerusakan Kawasan Hutan	1.47	0.27	0.40	0.03

Sumber: Lakip Tahun 2014 (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur) dan LPPD Kab. Cianjur Tahun 2011-2015.

### 2.3.3.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Selain sumberdaya alam berupa keindahan alam Kabupaten Cianjur juga memiliki potensi kandungan bahan tambang yang terdiri dari :

1. Bahan Tambang Logam yaitu : Bijih Emas, Pasir Besi, TimahHitam dan Seng tersebar di Kecamatan Campaka, Tanggeung, Naringgul, Kadupandak, Sindangbarang, Cidaun, Agrabinta dan Campaka.
2. Bahan Tambang Non Logam yang terdiri dari Diatomea, Galena, Lempung, Pasir, Trass, Pasir dan Batu, Andesit, Batu gamping, Bentonit, Oker, Granit, Felsfar, Kaolin, Batu setengah Permata, Batu Templek, Marmer dan Batu Terkersikan yang tersebar di kecamatan Bojongpicung, Mande, Cibeber, Campaka, Karang Tengah, Cibinong, Tanggeung, Pagelaran, Cidaun, Cugenang, Cianjur, Warungkondang, Cilaku, Pacet, Sukanagara, Tanggeung, Cikalongkulon, Agrabinta.
3. Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di Kabupaten Cianjur sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 82,74% dengan jumlah rumah tangga yang telah terpasang listrik mencapai 515.692 KK.
4. Tingkat keberhasilan penanganan listrik pedesaan dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga yang mendapat akses layanan listrik. Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses listrik baik yang bersumber dari PLN maupun Non PLN terus mengalami peningkatan dari 357.729 KK pada tahun 2012 menjadi 403.110 KK pada tahun 2013 dan 484.620 KK pada tahun 2014 menjadi 515.692 KK pada tahun 2015.



5. Dalam perkembangannya, rasio elektrifikasi (RE) pada tahun 2012 hingga 2015 terus mengalami kenaikan dengan capaian 54,30% pada tahun 2012 menjadi 63,97% pada tahun 2013, kemudian menjadi 77,01% pada tahun 2014 hingga 82,74% pada tahun 2015.
6. Pelaksanaan jaringan listrik di Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh Dinas PSDAP Kab. Cianjur, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan PLN, meski demikian perlu adanya sumber energy alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya dan angin.

**Tabel 2.50**  
**Data Rasio Elektrifikasi (RE) Di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	644.498	639.873	612.974	630.191	629.321	623.276
2	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	334.611	373.461	357.729	403.110	484.620	515.692
3	Rasio Elektrifikasi (RE) (%)	53,73	57,65	54,3	63,97	77,01	82,74

Sumber: Profil data dan statistic Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

#### 2.3.3.4. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 1.906.025 orang pada tahun 2014 menjadi 2.110.958 orang pada tahun 2015, peningkatan jumlah wisatawan yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari data yang diperoleh dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Data jumlah objek wisata dan jarak dari kota cianjur serta jumlah kunjungan wisata dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

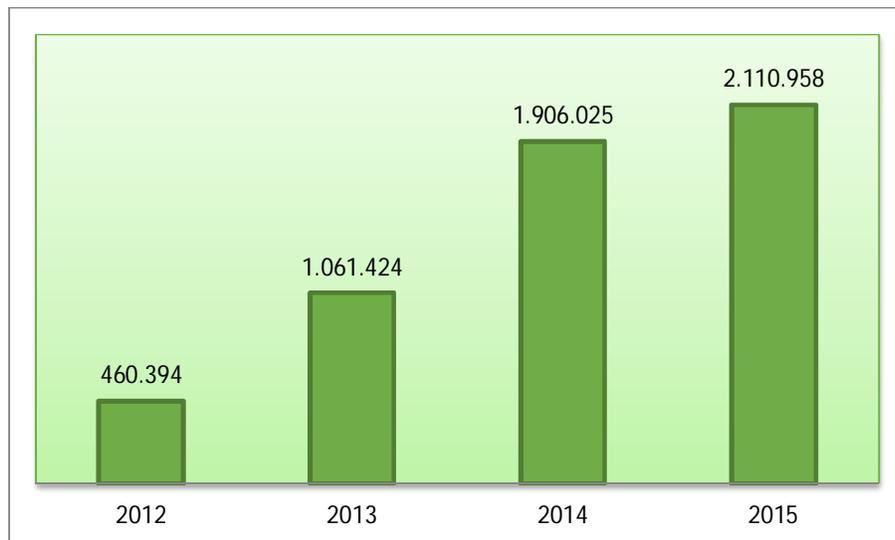
**Tabel 2.51**  
**Daftar Objek Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2014**

No	Nama Daya Tarik Wisata	Lokasi	Jarak dari Kota Cianjur
1	Taman Nasional GunungGede Pangrango	Kec. Cipanas	17



No	Nama Daya Tarik Wisata	Lokasi	Jarak dari Kota Cianjur
2	Kebun Raya Cibodas	Kec. Cipanas	17
3	Taman Bunga Nusantara	Kec. Sukaresmi	20
4	Kota Bunga	Kec. Cipanas	
6	Makam Dalem Cikundul	Kec. Cikalongkulon	20
7	Waduk Cirata	Kec. Cikalongkulon, Mande, Ciranjang	
8	Situs Megalith Gunung Padang	Kec. Campaka	40
9	Curug Citambur	Kec. Pagelaran	85
10	Pantai Apra	Kec. Sindangbarang	100
11	Pantai CJayanti	Kec. Ciadun	130
12	Bumi Perkemahan Mandala Kitri	Kec. Cipanas	17
13	Wana Wisata Mandalawangi	Kec. Cipanas	17
14	Istana Cipanas	Kec. Cipanas	12
15	Wisata Tirta Jangari	Kec. Mande	20
16	Wisata Tirta Calingcing	Kec. Ciranjang	20
17	Sumber Air Panas Sukasirna	Kec. Agrabinta	135
18	Agrowisata Perkebunan Teh Gedeh	Kec. Pacet	20
19	The Jhons Aquatic Resort	Kec. Cianjur	3
20	Arung Jeram Bantar Caringin	Kec. Haurwangi	20
21	Wisata Sejarah Dalem Pasir	Kec. Haurwangi	20

Sumber : Profil Kab. Cianjur Tahun 2014

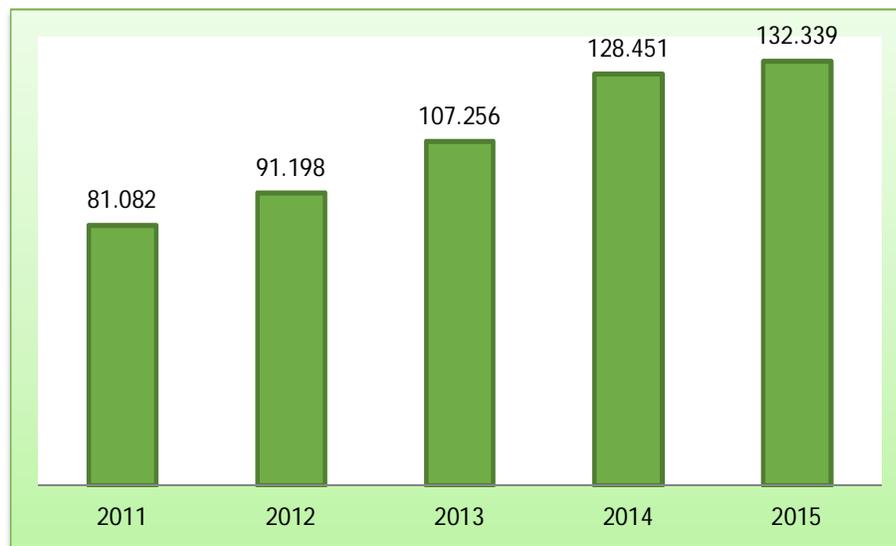


Sumber: LPPD Kab. Cianjur Tahun 2011-2015 Dan Lakip Tahun 2015

**Gambar 2.10 Kunjungan wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

### 2.3.3.5. Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Cianjur selalu mengalami peningkatan dari 81.082 ton pada tahun 2011 menjadi 132.339 ton pada tahun 2015 dengan jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat sebesar 26,86 Kg. Produksi perikanan ini berasal dari perikanan air tawar yang sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Mande, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Cikalongkulon karena di wilayah tersebut berada di kawasan danau Cirata dan perikanan tangkap yang terdapat di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang dan Cidaun.



Sumber: LKPJ AMJ Kab. Cianjur Tahun 2011-2016

**Gambar 2.11 Produksi Ikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

### 2.3.3.6. Perdagangan

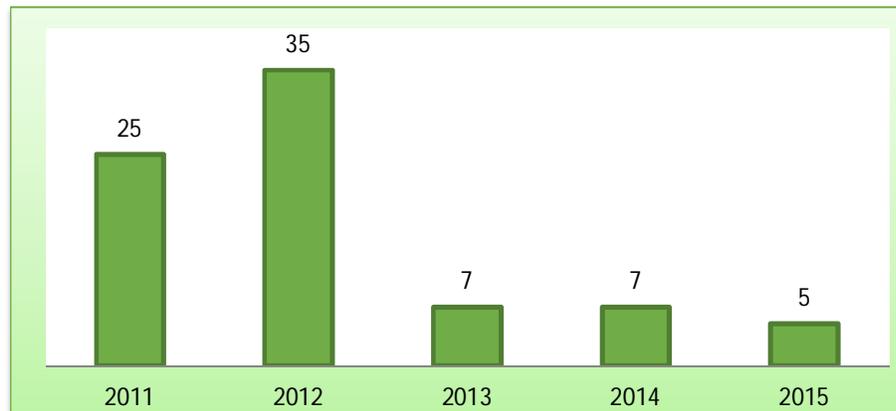
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cukup signifikan terhadap total PDRB dimana pada tahun 2015 mencapai 18,46%. Sektor perdagangan ini ditunjang oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer Bergeraknya roda perekonomian.

### 2.3.3.7. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cukup signifikan terhadap total PDRB dimana pada tahun 2015 mencapai 5,9%. Sektor ini didukung oleh adanya pembinaan UKM disektor industri dengan meningkatkan kemampuan SDM dan pangsa pasar dan meningkatnya permintaan konsumen dengan cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 543 pengrajin

### 2.3.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya pemindahan penduduk miskin dari Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang sering menerima calon transmigran asal Kabupaten Cianjur adalah di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Selama tahun 2011-2015 jumlah transmigran umum asal Kabupaten Cianjur sebanyak 79 KK.



Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

**Gambar 2.12 Tranmigrasi Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

---

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik dan internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan



ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator daya saing daerah adalah sebagai berikut:

#### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

##### 2.4.2.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

###### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung rata - rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk

**Tabel 2.52**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan**  
**di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 s.d 2015**

NO	Uraian	2014	2015
1.	Makanan	284,030	336,448
2.	Bukan Makanan	202,759	217,381
	<b>Total</b>	<b>486,789</b>	<b>553,869</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2015

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata - rata konsumsi per kapita per bulan di Kabupaten Cianjur tahun 2015 sebesar Rp. 553.869,00 atau



lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi per kapita per bulan tahun 2014 yaitu Rp. 486.789.

2. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Komposisi pengeluaran konsumsi non pangan dan pangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah selain PDRB per kapita. Di bawah ini tabel persentase konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Cianjur tahun 2011-2015.

**Tabel 2.53**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan**  
**Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 s.d 2014**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Makanan	62,59	57,98	59,50	58,35	60,75
2.	Bukan Makanan	37,41	42,02	40,50	41,65	39,25
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat adanya perkembangan persentase pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan. Persentase pengeluaran non pangan yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Dalam kurun waktu 2011-2015, persentase pengeluaran untuk bukan makanan masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk makanan (pangan) namun kecenderungan persentase pengeluaran untuk non makanan di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan penduduk perlu ditingkatkan.

3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petanidiperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk



biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Seperti halnya inflasi, analisis NTP dilakukan terbatas dalam lingkup regional (provinsi) dan gabungan (nasional).

**Tabel 2.54**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2008 s.d 2013**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	108,97	119,17	129,77	144,18	156,01	<b>173,11</b>
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	112,72	122,58	130,67	137,42	143,20	<b>157,31</b>
3.	<b>Rasio</b>	<b>96,14</b>	<b>97,21</b>	<b>99,29</b>	<b>104,90</b>	<b>108,93</b>	<b>110,04</b>

Ket: \*) 2007=100 \*\*) 2012=100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat \*) : NTP sampai dengan bulan November 2013

Dari tabel di atas, terlihat bahwa NTP Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan selama kurun waktu 5 tahun. NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2015 telah mencapai 105,07. Kenaikan NTP tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani di Jawa Barat.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

##### **2.4.2.1. Penataan Ruang**

###### **1. Ketaatan Terhadap RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument arahan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Cianjur selama ini telah dinilai baik, dengan ditunjukkan oleh rata-rata persentase tingkat ketaatan sebesar 100%.



## 2. Risiko Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Kabupaten Cianjur memiliki tingkat risiko bencana alam dan Non Alam, Risiko bencana alam di Kabupaten Cianjur adalah :

**Tabel 2.55**  
**Indek Risiko Bencana Kabuapten Cianjur**

No	Jenis Bencana	Nilai	Kelas
1	Indeks Risiko Bencana Banjir	36	Tinggi
2	Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi	22	Tinggi
3	Indeks Risiko Bencana Tsunami	24	Tinggi
4	Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor	24	Tinggi
5	Indeks Risiko Bencana Gunung Api	16	Tinggi
6	Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	36	Tinggi
7	Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	36	Tinggi
8	Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim	20	Tinggi
9	Indeks Risiko Bencana Kekeringan	36	Tinggi
10	Multi Ancaman	250	Tinggi

Sumber : indek risiko bencana indonesia 2013

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan menganalisa parameter-parameter risiko bencana seperti: tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan parameter-parameter risiko tersebut diperoleh bahwa tingkat risiko masing-masing desa adalah berbeda-beda sesuai dengan jenis masing-masing risiko bencana. Tingkat risiko bencana alam di Kabupaten Cianjur adalah:

### a. Risiko Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana yang kerap mempunyai dampak selain terhadap manusia, termasuk kerusakan infrastruktur. Di Kabupaten Cianjur bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana yang memerlukan prioritas penanganan. Bencana ini akan



berdampak pada masyarakat tidak saja yang tinggal dan beraktifitas di kawasan terancam tetapi kepada masyarakat yang tinggal di luar kawasan rissiko bencana gempa bumi. Dari 360 Desa/kelurahan terdapat 145 desa yang memiliki tingkat risiko tinggi, 185 desa dengan risiko gempa bumi sedang, dan 29 desa memiliki risiko rendah.

b. Risiko Bencana Gunung Api

Kabupaten Cianjur bagian utara merupakan daerah yang memiliki ketinggian sampai 2900 mdpl yaitu Gunung Api Gede Pangrango, Gunung Api ini masih aktif dan memiliki risiko bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, dan kerusakan alam dan infrasutruktur. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana gunung api di Kabupaten Cianjur, dari 61 desa yang berada dalam Kawana Rawan Bencana Gunung Gede Pangrango diperoleh bahwa ada 2 desa yang memiliki risiko tinggi, 46 desa dengan risiko sedang, dan 13 desa dengan risiko rendah.

c. Risiko Bencana Tsunami

Kabupaten Cianjur bagian selatan merupakan daerah yang berbatasan dengan laut yaitu Samudera Hindia. Daerah ini merupakan garis pertemuan dua lempeng bumi yaitu lempeng India dan lempeng Eurasia kedua lempeng bumi ini bergerak sangat aktif sehingga banyak terjadi kejadian gempa bumi yang bersumber di dasar laut. Gempa bumi yang bersumber dari dasar laut ini berpotensi menimbulkan pergerakan massa air laut ke daratan (Tsunami).

Di Kabupaten Cianjur, terdapat 39 desa di 6 kecamatan yang terletak di daerah pesisir cianjur selatan. 24 Desa memiliki potensi tinggi, 12 Desa Sedang dan 3 Desa rendah memiliki potensi bencana tsunami.

d. Risiko Bencana Banjir

Kabupaten Cianjur memiliki tingkat risiko terhadap bencana Banjir, Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, nama-nama desa yang memiliki indeks risiko baik tinggi, sedang dan rendah dibandingkan



dengan desa lainnya di Kabupaten Cianjur, terdapat 41 Desa yang memiliki risiko banjir yang terletak 22 Kecamatan

e. Risiko Bencana Longsor

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat pergerakan tanah atau biasa disebut dengan tanah longsor yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, terdapat 156 desa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap longsor, dan 144 desa dengan tingkat risiko sedang, dan 59 desa memiliki tingkat risiko yang relatif rendah.

f. Risiko Bencana Angin Puting Beliung

Bencana angin Puting Beliung merupakan salah satu bencana yang selalu mengancam daerah yang berada di perbukitan dan lereng. Cianjur merupakan salah satu daerah yang berada di perbukitan dan lereng. di Kabupaten Cianjur memiliki potensi bencana puting beliung tinggi, dari 360 desa terdapat 227 Desa Tinggi, 102 Desa sedang dan 31 Desa rendah yang terletak 22 Kecamatan.

g. Risiko Bencana Kekeringan

Bencana Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana yang kerap mempunyai dampak selain terhadap kesehatan manusia, tanaman serta hewan juga secara ekonomis para petani akan kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak terjadinya urbanisasi.

Di Kabupaten Cianjur bencana kekeringan merupakan salah satu bencana yang memerlukan prioritas penanganan. Bencana ini akan berdampak pada masyarakat tidak saja yang tinggal dan beraktifitas di kawasan terancam tetapi kepada masyarakat yang tinggal di luar kawasan rawan bencana kekeringan. Dari 360 Desa/kelurahan terdapat 192 Desa tingkat risiko tinggi, 150 Desa Tingkat Risiko sedang dan 18 Desa Tingkat risiko rendah.



h. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu jenis bencana yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan serta hasil-hasilnya dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Di Kabupaten Cianjur bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang berprioritas. Bencana ini akan berdampak tidak saja pada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas dikawasan terancam tetapi juga masyarakat sekitar Cianjur pada umumnya. Peta Risiko Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Cianjur terdapat 119 desa yang memiliki nilai indeks risiko tinggi, 139 desa dengan ancaman sedang dan 29 desa berada di tingkat rendah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Cianjur.

i. Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman

Demikian pula halnya dengan Bencana Kebakaran Gedung Dan Permukiman berpotensi mengakibatkan selain kerusakan Infrastruktur berupa gedung, permukiman dan lingkungan juga dapat mengakibatkan kerugian material bahkan korban jiwa manusia. Untuk dari 32 kecamatan hanya 9 kecamatan yang memiliki potensi risiko bencana kebakaran dan pemukiman,

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kejadian Bencana Banjir	1	2	14	15	19
2	Kejadian Bencana Gempa Bumi	-	-	-	1	4
3	Kejadian Bencana Tsunami					
4	Kejadian Bencana Longsor	10	4	24	36	25
5	Kejadian Bencana Gunung Api	-	-	-	-	-
6	Kejadian Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman	-	64	116	74	125
7	Kejadian Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	-	-	-	-	-
8	Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	4	2	3	6	19



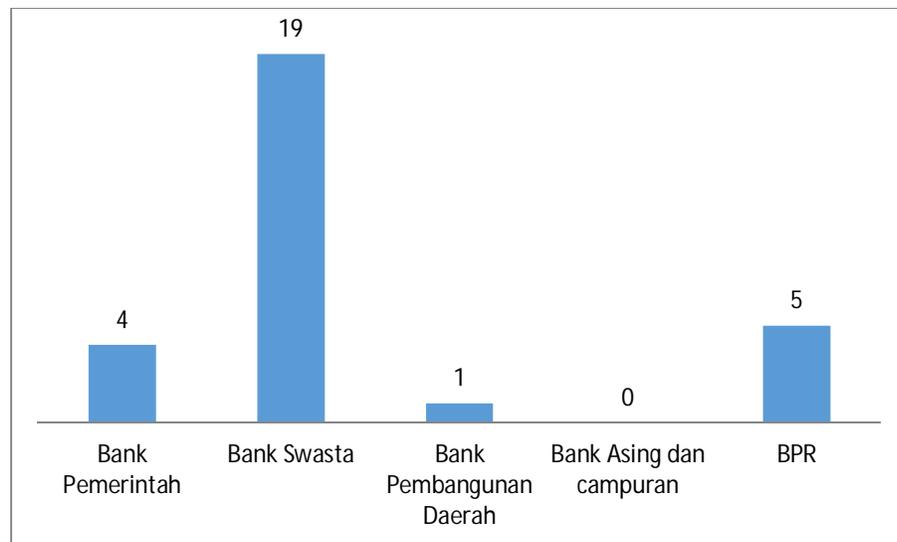
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
9	Kejadian Bencana Kekeringan	3	-	-	2	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur

#### 2.4.2.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

##### 1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.



Sumber: Jabar Dalam Angka, Tahun 2016

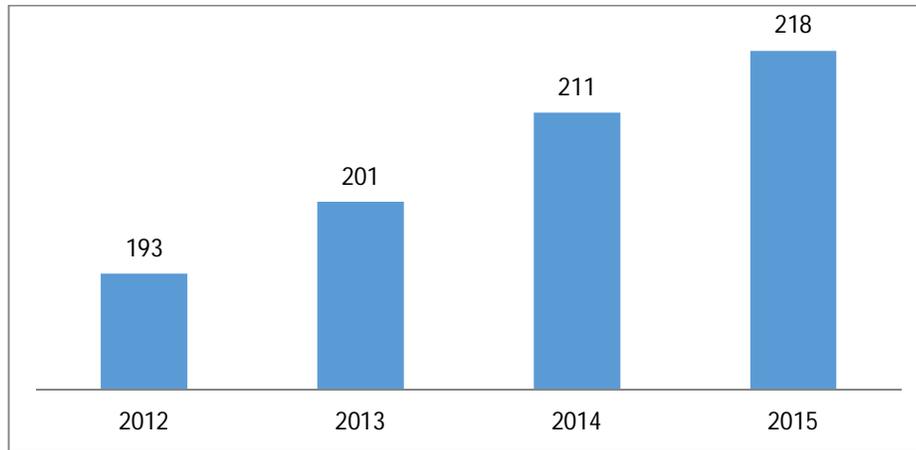
**Gambar 2.13 Jumlah jaringan Bank Umum menurut kelompok di Kab. Cianjur Tahun 2015**

##### 2. Jumlah Restoran/Rumah Makan

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran/Rumah Makan adalah tempat



menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

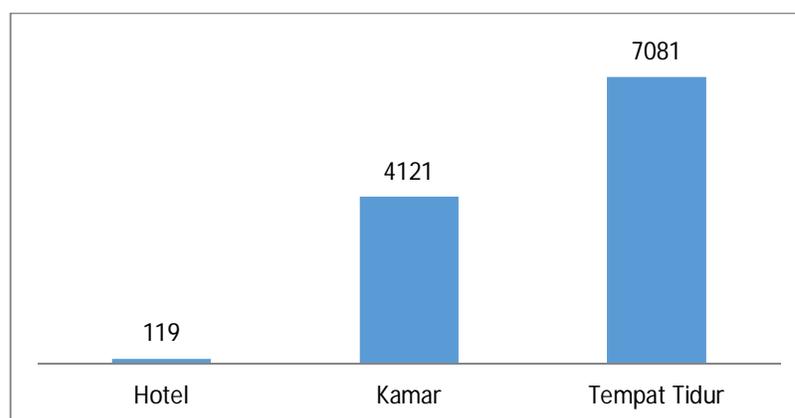


Sumber: Jabar Dalam Angka, Tahun 2016

**Gambar 2.14 Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2015**

### 3. Jumlah Akomodasi Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata serta dapat meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.



Sumber: Profil Kab. Cianjur Tahun 2011-2015

**Gambar 2.15 Jumlah Akomodasi Hotel di Kab. Cianjur Tahun 2015**

#### **2.4.2.3. Lingkungan Hidup**

Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak sedangkan Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air bersih dapat dibedakan menjadi air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam. Adapun Persentas Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2012 Rumah Tangga Pengguna air Bersih sebesar 20.98% sedangkan di tahun 2015 meningkat menjaddi 64.51%.

#### **2.4.2.4. Komunikasi Dan Informatika**

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Tingkat elektrifikasi kabupaten Cianjur menurut ESDM Provinsi Jabar tercatat sebesar 82% yang berasal dari listrik PLN maupun non PLN. Jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN listrik sebanyak 536.279 KK. Sedangkan untuk listrik perdesaan, persentase penduduk yang telah menggunakan listrik juga terus meningkat, tercatat di tahun 2015 terdapat sebesar 57,03% penduduk pedesaan telah menggunakan listrik.

#### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

##### **2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

1. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah berkaitan dengan daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan



persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing untuk Kabupaten Cianjur pada Tahun 2015 sebanyak Rp. 943.971.250.000 (PMA) dan sebanyak Rp. 615.070.000.000 (PMDN), dengan rata-rata lama proses perijinan yang telah dilaksanakan yaitu selama 5 hari.

2. Pengeanaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak daerah dan retribusi daerah dihasilkan dari wajib pajak hotel dan penginapan serta Restoran (rumah makan/warung makan) yang ada di Kabupaten Cianjur. Selain itu pajak dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan BPHTB. Sedang wajib retribusi dihasilkan dari Retribusi jasa usaha seperti pasar, parkir, ijin trayek dan retribusi lain yang sifatnya hasilnya sewaktu-waktu atau tidak menetap. Adapun hasil pajak daerah tahun 2014 di Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp.106.313.853.547,65, sedangkan untuk hasil retribusi daerah tahun 2014 sebesar Rp.20.947.022.216,00.

3. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta



perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha isebanyak 4 (empat) buah.

#### **2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **2.4.4.1. Ketenagakerjaan**

###### **1. Ratio Ketergantungan**

Ratio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase ratio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin rendahnya persentase ratio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnyabeban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur yang berusia 0-14 tahun yaitu sebanyak 710.373 orang dan jumlah penduduk yang berusia diatas 65 tahun yaitu sebanyak 109.957 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 1.415.088.

Ini berarti ratio ketergantungan pada tahun 2014 sebesar 58 persen yang artinya setiap 100 orang berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan beban sebanyak 58 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang tidak produktif lagi (65+ tahun).



## **BAB III** **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** **SERTA KERANGKA PENDANAAN**

### **3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

---

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan, sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.



Analisis Kinerja keuangan masa lalu ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur , dijabarkan sebagai berikut:

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Daerah

Secara umum Komponen Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pendapatan dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan

rupiah)

No	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	PENDAPATAN	1,771,273	2,035,531	2,247,859	2,628,334	3,114,053	15.19



No	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>147,346</b>	<b>215,803</b>	<b>266,101</b>	411,539	454,637	33,72
	Pendapatan Pajak Daerah	46,061	58,244	<b>72,706</b>	112,457	122,681	28,76
	Pendapatan Retribusi Daerah	18,634	20,742	<b>20,752</b>	24,898	27,422	10,37
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,863	6,371	7,106	7,999	7,333	2,15
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75,786	130,445	165,538	266,185	297,202	42,87
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.171,748</b>	<b>1,430,477</b>	<b>1,522,548</b>	1,595,594	1,729,841	10,43
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	106,190	113,219	<b>119,418</b>	89,331	72,358	-8,03
	Dana Alokasi Umum	965,472	1,168,372	<b>1,305,617</b>	1,407,470	1,443,963	10,79
	Dana Alokasi Khusus	100,085	148,886	<b>97,513</b>	98,794	213,520	32,92
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>452,179</b>	<b>389,251</b>	<b>459,210</b>	<b>621,201</b>	<b>929,574</b>	22,24
	Pendapatan Hibah	6,499	95,470	-	6,114	4,268	
	Dana Bagi Hasil Pajak Prov	52,635	77,174	89,819	148,579	189,480	30,18
	Dana Penyesuaian	316,907	221,006	298,168	354,292	456,849	13,11
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	76,135	90,975	<b>71,223</b>	112,217	172,152	27,19
	Dana Desa					106,824	

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab.Cianjur 2011-2015

Berdasarkan data selama tahun 2011-2015 Perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur cukup baik dan mengalami peningkatan serta berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah yaitu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 15,19%.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011-2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,72%, dengan pertumbuhan paling tinggi dari pos Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 42,87%.

Pendapatan Kabupaten Cianjur terutama bersumber berasal dari Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Danba Perimbangan Kabupaten Cianjur setiap tahun selalu mengalami peningkatan



dengan periode 2011-2015 rata-rata pertumbuhan terakhir sebesar 10,43%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 32,92%. Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Cianjur dari Lain-lain Pendapatan yang Syah. Tingkat pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Syah Kabupaten Cianjur cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,24%.

## 2. Belanja Daerah

Mengukur kinerja APBD selain dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum Komponen Belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Belanja dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	1,777,609	1,973,181	2,152,134	2,587,216	3,050,237	14.5
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,119,351	1,284,564	1,435,233	1,587,082	1,852,130	13.4
2.1.1	Belanja Pegawai	930,093	1,041,449	1,122,778	1,273,629	1,346,500	9.7
2.1.2	Belanja Bunga		-	-	0	0	
2.1.3	Dana Subsidi	4,286	4,094	-	0	0	
2.1.4	Belanja Hibah	57,696	156,269	213,585	181,901	139,441	42.3
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42,164	18,573	23,041	10,059	4,822	-35.1



NO.	URAIAN	REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	697	696	126	2,200	2,199	389.2
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	78,547	60,054	73,341	116,319	359,135	66.5
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,868	3,429	2,362	2,974	32	-36.4
			-	-	0	0	
2.2	Belanja Langsung	658,257	688,617	716,901	1,000,134	1,198,107	17.0
2.2.1	Belanja Pegawai	64,217	56,465	61,512	54,887	55,807	-3.1
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371,531	309,512	345,488	476,960	560,976	12.6
2.2.3	Belanja Modal	222,510	322,641	309,901	468,288	581,323	29.1

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2011-2015

Memperhatikan Tabel 3.2, diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp1,11 Triliun (2011) hingga Rp 1,85 Triliun (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 13,4%.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp 658 juta (2011) hingga Rp1,19 Triliun (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 17,01%.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, Secara umum Komponen Pembiayaan Kabupaten Cianjur terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;



- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN	108,212	90,593	117,707	158,109	184,227	16,12
3.1	Penerimaan Pembiayaan	121,392	101,881	152,943	214,941	199,227	16,82
3.1.1	Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( Silpa )	121,392	101,881	152,943	213,432	199,227	16,74
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	1,509	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13,180	11,287	35,236	56,832	15,000	46.4
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	2,000	6,500	15,500	23,000	15,000	94.3
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	11,180	4,787	19,736	33,832	-	56.6
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2011-2015

Pada Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan didominasi oleh SiLPA tahun lalu, pertumbuhan SiLPA perkembangannya cenderung mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 16,74%. Namun begitu dalam 2 (dua) tahun terakhir ini SiLPA mengalami penurunan sebesar 6,6%, ini mengindikasikan bahwa penyusunan



perencanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur semakin baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat meningkatkan kemampuan operasional beberapa perusahaan daerah.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Cianjur serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tahun 2014-2015.

**Tabel 3.4**  
**Neraca 2014-2015 Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TAHUN	TAHUN	PERTUMBUHAN
	2014	2015	
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	395,587.13	40,069.39	-0.90
Investasi Jangka Panjang	104,063.41	115,758.99	0.11
Aset Tetap	4,458,300.14	3,870,424.89	-0.13
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	0,00	(1,182,292.11)	
Aset Lainnya	61,776.77	43,418.58	-0.30
(Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya)	0,00	(22,047.69)	
<b>Jumlah Aset</b>	<b>5,019,727.45</b>	<b>4,429,849.56</b>	<b>-0.12</b>
<b>Kewajiban</b>	-	-	
Kewajiban Jangka Pendek	27,899.02	28,491.88	0.02
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>27,899.02</b>	<b>28,491.88</b>	<b>0.02</b>
<b>Ekuitas</b>	-	-	
Ekuitas Dana Lancar	367,688.11	-	-1.00
Ekuitas Dana Investasi	4,624,140.32	-	-1.00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4,991,828.44</b>	<b>4,401,479.97</b>	<b>-0.12</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>5,019,727.45</b>	<b>4,429,971.85</b>	<b>-0.12</b>

Sumber : CALK Kab.Cianjur 2015

## 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU



Pengelolaan Keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Cianjur pada periode sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. **Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Cianjur, yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :





**Tabel 3.5**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALIASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BELANJA	1.876,142	1.777,609	94.7	2.093,791	1.973,181	94.2	2.346,359	2.152,134	91.7	2.763,131	2.587,216	93.6	3.309,319	3.050,237	93.63	93.6
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.138,141	1.119,351	98.3	1.316,413	1.284,564	97.6	1.531,586	1.435,233	93.7	1.653,649	1.587,082	96.0	2.015,037	1.852,130	95.97	96.3
2.1.1	Belanja Pegawai	938,018	930,093	99.2	1.065,351	1.041,449	97.8	1.205,143	1.122,778	93.2	1.334,012	1.273,629	95.5	1.496,456	1.346,500	95.47	96.2
2.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	-		-	-		0	0		0	0		0.0
2.1.3	Dana Subsidi	4,302	4,286	99.6	5,034	4,094	81.3	-	-		0	0		0	0		36.2
2.1.4	Belanja Hibah	60,573	57,696	95.3	159,747	156,269	97.8	-	213,585		184,050	181,901	98.8	148,012	139,441	98.83	78.1
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47,519	42,164	88.7	19,278	18,573	96.3	222,618	23,041	10.3	10,498	10,059	95.8	5,924	4,822	95.82	77.4
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,240	697	56.2	1,240	696	56.1	940	126	13.5	2,200	2,200	100.0	2,200	2,199	99.99	65.1
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	79,645	78,547	98.6	60,572	60,054	99.1	76,838	73,341	95.4	117,747	116,319	98.8	359,872	359,135	98.79	98.2
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6,844	5,868	85.7	5,192	3,429	66.1	2,597	2,362	0.9	5,142	2,974	57.8	2,573	32	57.85	71.7
		-	-		-	-		-	-		0	0		0	0		0.0
2.2	Belanja Langsung	738,001	658,257	89.2	777,378	688,617	88.6	814,773	716,901	88.0	1,109,482	1,000,134	90.1	1,294,282	1,198,107	90.14	89.2
2.2.1	Belanja Pegawai	68,485	64,217	93.8	59,668	56,465	94.6	64,644	61,512	95.2	60,900	54,887	90.1	61,139	55,807	90.13	92.8
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389,085	371,531	95.5	336,201	309,512	92.1	374,072	345,488	92.4	532,007	476,960	89.7	615,941	560,976	89.65	91.8
2.2.3	Belanja Modal	280,430	222,510	79.3	381,509	322,641	84.6	376,057	309,901	82.4	516,575	468,288	90.7	617,203	581,323	90.65	85.5



Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat realisasi mengalami kenaikan periode tahun 2011 sebesar Rp 1,13 triliun hingga pada tahun 2015 sebesar Rp 1,85 triliun, namun penyerapan belanja tidak langsung dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 96,3%.

Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar Rp 658 juta atau realisasi terhadap anggaran sebesar 89,2 % sampai dengan tahun 2015 besaran belanja langsung sebesar Rp 1,1 triliyun atau dengan penyerapan anggaran sebesar 90,14%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 89,2%, atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Cianjur tertuang pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,352,707</b>	<b>1,540,097</b>	<b>1,637,746</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,117,714</b>	<b>1,269,091</b>	<b>1,340,874</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1,117,714</b>	<b>1,269,091</b>	<b>1,340,874</b>
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	805,793	838,536	917,937
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	307,541	426,175	418,557
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,380	4,380	4,380
5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi			
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>234,994</b>	<b>271,006</b>	<b>296,872</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>61,034</b>	<b>54,834</b>	<b>55,807</b>
5.2.1.01	Honorarium PNS	31,376	33,126	34,638
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,989	19,985	8,475
5.2.1.03	Uang Lembur	1,669	1,723	2,308
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	-	-	10,387
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>133,702</b>	<b>172,330</b>	<b>191,988</b>
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,946	16,297	34,125
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,647	51,405	67,333



KODE	URAIAN	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	675	1,383	23
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,380	7,174	9,930
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13,324	22,439	19,565
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,531	508	449
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1,642	2,039	2,616
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,383	10,598	9,289
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2,376	2,033	1,248
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	550	939	1,095
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1,424	3,510	2,016
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,650	47,378	40,284
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	171	164	284
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,005	6,463	3,732
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>40,258</b>	<b>43,842</b>	<b>49,077</b>
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan tanah (kantor)	628	-	2,959
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7,692	9,548	4,088
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	907	837	2,645
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,349	1,441	1,461
5.2.3.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2,126	940	8,741
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,227	8,575	10,523
5.2.3.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2,884	1,537	850
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15,446	20,963	17,809

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Cianjur 2011 -2015

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan pemenuhan aparatur. Selanjutnya disajikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tabel 3.7 sebagai berikut:



**Tabel 3.7**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	BELANJA (UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PERSENTASE
		( Rp)	( Rp)	(%)
1	Tahun Anggaran 2013	1,352,707	2,152,109	62,9
2	Tahun Anggaran 2014	1,540,097	2,587,216	59,5
3	Tahun Anggaran 2015	1,532,862	3,050,237	50,3

Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 prosentasenya sebesar 62,9% dan tahun 2015 prosentasenya menurun menjadi sebesar 50,3%.

Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa dari periode pertahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Maka dari tahun ke tahun harus dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tahun 2013-2015 dapat dijelaskan secara serial pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Defisit Riil Periode Tahun 2013-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		
		2013	2014	2015
1	PENDAPATAN DAERAH	2,247,859	2,628,334	3,114,053
2	BELANJA DAERAH	2,152,134	2,587,216	3,050,237



NO	URAIAN	REALISASI		
		2013	2014	2015
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35,236	56,832	15,000
A.	Defisit Riil	60,489	(15,714)	48,816
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :		-	-	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	152,943	213,432.44	199,226.85
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	1,508.69	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	152,943	214,941	199,227
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		213,432	199,227	248,043

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Kabupaten Cianjur dapat di rinci pada tabel 3.9 sebagai berikut berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun Anggaran 2013-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	RATA-RATA PERTUMB
		(Rp)	( Rp )	( Rp )	(%)
1	Jumlah SiLPA	213,432	199,227	248,043	
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	0
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	0
SiLPA riil (1-2-3)		213,432	199,227	248,043	

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Kabupaten Cianjur harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.



### 3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

#### 3.3.1 Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap pengeluaran priodik dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

**Tabel 3.10**  
**Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
I.	BELANJA	1,284,371	1,504,639	1,787,221	18.8
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,191,054	1,385,409	1,700,009	22.7
1	Gaji Dan Tunjangan	805,793	838,536	917,937	6.77
2	Tambahan Penghasilan PNS	307,541	426,175	418,557	18.39%
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,380	4,380	4,380	0.00%
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	689	761	941	17.06%



NO	URAIAN	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	72,652	115,558	358,195	134.51%
B.	BELANJA LANGSUNG	93,316	119,230	87,212	0.46%
1	Honorarium PNS	31,376	54,887	34,638	19.02%
2	Honorarium Non PNS	27,989	19,985	8,475	-43.10%
3	Belanja Jasa Kantor	8,228	10,651	11,090	16.78%
4	Belanja Premi Asuransi	675	1,383	166	8.38%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,380	7,174	9,930	12.01%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13,324	22,439	19,565	27.80%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,531	508	449	-39.26%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,642	2,039	2,616	26.24%
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	171	164	284	34.41%
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35,261	56,832	15,000	-6.22%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15,500	23,000	15,000	6.80%
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	19761.208	33,832	0	-14.40%
JUMLAH (I + II)		1,319,632	1,561,472	1,802,221	16.87%

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

### 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi Data Masa lalu Kabupaten Cianjur atau RPJMD periode sebelumnya sebelumnya yaitu mengenai pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Cianjur periode tahun 2012 – 2015 dan mengacu pada analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama kebutuhan pembangunan Kabupaten Cianjur maka selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2015 mendatang dengan kecenderungan kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah tiap tahun yang terus meningkat, dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :



**Tabel 3.11**  
**Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur**  
**Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan	1.808.747,60	1.960.755,30	2.112.763,00	2.264.770,70
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)				
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	134.560,15	149.938,67	159.317,18	171.695,69
	Total Penerimaan	1.943.307,75	2.107.693,97	2.272.080,18	2.436.466,39
4.	Dikurangi : Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	984.873,40	1.070.451,60	1.156.029,80	1.241.608,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>958.434,35</b>	<b>1.037.242,37</b>	<b>1.116.050,38</b>	<b>1.194.858,39</b>

Sumber : RPJMD Kabupaten Cianjur 2011-2016

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sumber penerimaan daerah kabupaten/kota terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) Kelompok -lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.



Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
- c. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan



- masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
  - d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
  - e. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
  - f. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
  - g. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
  - h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi berkaitan dengan peningkatan penerimaan berbagai alokasi dana dari pemerintah pusat maupun propinsi setiap tahunnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana bagi hasil pajak propinsi, dana bantuan keuangan propinsi.
  - i. Meningkatkan kerja sama dengan KPP Pratama Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).
  - j. Mempersiapkan kelembagaan dan sistem operasional dalam rangka pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada kabupaten/kota pada tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 11 jenis meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,



pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolannya oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada waktu mendatang, prioritas kebijakan pendapatan asli daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
- b. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun corporate social responsibility (CSR).
- c. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, seandainya ada upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan retribusi serta peningkatan, pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan PAD harus disertai dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang murah.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi :

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Cianjur.



- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja daerah juga tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung program-program strategis daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2011-2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Cianjur yang terdiri dari urusan wajib dan



- urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan.
- b. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik.
  - c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Cianjur.
  - d. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
  - e. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
  - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
  - g. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
  - h. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi



sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.

- i. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- j. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- k. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years).
- l. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
  - 4) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak



diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran



pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD
- b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- c. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

### 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi rincian pendapatan kurun waktu 2011-2015. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 yaitu data APBD Tahun 2016 maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 ditunjukkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	APBD	RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
		TAHUN		TAHUN				
		2016		2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN DAERAH	3,272,057	5.8	3,374,516	3,630,595	3,808,975	3,997,932	4,214,576
1.1	Pendapatan Asli Daerah	424,738	4.0	482,085	495,191	514,796	535,979	561,351
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	134,760	4.3	138,445	142,557	148,838	156,279	164,093
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,162	6.1	24,106	25,552	27,104	28,767	30,561
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,999	2.2	7,798	7,966	8,137	8,312	8,491



NO	URAIAN	APBD	RATA – RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
		TAHUN		TAHUN				
		2016		2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258,817	3.8	311,736	319,116	330,718	342,621	358,206
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,892,327</b>		<b>1,932,918</b>	<b>2,102,781</b>	<b>2,227,745</b>	<b>2,352,942</b>	<b>2,478,360</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78,861	(7.1)	78,861	69,998	65,952	62,140	58,548
1.2.2	Dana Alokasi Umum	<b>1,569,947</b>	<b>6.7</b>	1,576,444	1,744,528	1,843,614	1,942,700	2,041,786
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	243,520	8.1	277,613	288,255	318,179	348,102	378,026
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	954,992		<b>959,514</b>	<b>1,032,623</b>	<b>1,066,434</b>	<b>1,109,011</b>	<b>1,174,865</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	193,400	13.6	197,268	244,909	272,267	299,624	326,982
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<b>480,774</b>	<b>2.4</b>	418,809	418,809	418,809	427,576	459,619
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	0	11.4	98,024	128,491	134,945	141,398	147,851
1.3.5	Dana Desa	240,413	-	240,413	240,413	240,413	240,413	240,413
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	40,405	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3,272,057</b>	-	<b>3,374,516</b>	<b>3,630,595</b>	<b>3,808,975</b>	<b>3,997,932</b>	<b>4,214,576</b>

## 2. Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA menggunakan data SILPA kurun waktu ditunjukkan melalui 3.13 dimana diketahui nilai dan tingkat penurunan SiLPA yang yaitu 6,6%, di harapkan tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Th. 2016-2021**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2016	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021



1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	162,609	-6,6	152,039	142,157	132,916	124,277	116,199
---	---	---------	------	---------	---------	---------	---------	---------

Berdasarkan data tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Cianjur dalam jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021, disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	3,272,057	3,374,516	3,630,595	3,808,975	3,997,932	4,214,576
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	162,609	152,039	142,157	132,916	124,277	116,199
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA	3,434,665	3,526,555	3,772,752	3,941,891	4,122,209	4,330,775

### 3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2015 sebagaimana ditunjukkan melalui tabel 3.9 Adapun hasil proyeksi untuk lima tahun kedepan dengan periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat melalui tabel 3.15 berikut ini:

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017-2021**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021



1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2,029,534	2,121,314	2,196,719	2,272,148	2,347,598
	Gaji, Tunjangan, Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi	1,619,650	1,695,608	1,761,609	1,827,610	1,893,611
	Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Desa	405,943	421,866	431,370	440,897	450,446
	Belanja Bantuan Kpd Parpol	941	941	941	941	941
	Belanja Tidak Terduga	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	26,242	27,036	27,831	28,625	29,419
	Kewajiban kpd Pihak ke 3	16,581	17,250	17,919	18,587	19,256
	Belanja Jasa Kantor (Air, Listrik, Telp)	9,660.65	9,786.34	9,912.04	10,037.74	10,163.43
3	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Penyertaan Modal	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	<b>Belanja Wajib dan Mengikat (Prioritas I)</b>	2,065,776	2,158,350	2,234,550	2,310,773	2,387,018

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai



dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah



Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi/misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti; belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan serta di tahun 2020 terdapat dana pilkada berbentuk hibah sebesar Rp 50 M.

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas disajikan pada Tabel 3.16 sebagai berikut.

**Tabel 3.16**  
**Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017-2021**



Kabupaten Cianjur

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	PROYEKSI									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.
<b>PRIORITAS I</b>	58.6	2,065,776	57.2	2,158,350	56.7	2,234,550	56.1	2,310,773	55.1	2,387,018
Belanja Langsung	0.7	26,242	0.7	27,036	0.7	27,831	0.7	28,625	0.7	29,419
Belanja Tidak Langsung	57.6	2,029,534	56.2	2,121,314	55.7	2,196,719	55.1	2,272,148	54.2	2,347,598
Pengeluaran Pembiayaan	0.3	10,000	0.3	10,000	0.3	10,000	0.2	10,000	0.2	10,000
<b>PRIORITAS II</b>	40.7	1,435,279	42.1	1,589,902	42.7	1,683,842	42.2	1,738,937	44.4	1,922,257
Belanja Langsung	40.7	1,435,279	42.1	1,589,902	42.7	1,683,842	42.2	1,738,937	44.4	1,922,257
<b>PRIORITAS III</b>	0.7	25,500	0.6	24,500	0.6	23,500	1.8	72,500	0.5	21,500
Belanja Tidak Langsung	0.7	25,500	0.6	24,500	0.6	23,500	1.8	72,500	0.5	21,500
<b>Jumlah</b>	100	3,526,555	100	3,772,752	100	3,941,891	100	4,122,209	100	4,330,775

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kab.Cianjur Tahun Anggaran 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.17 berikut ini:

**Tabel 3.17**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017-2021**  
**Kabupaten Cianjur**

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	3,526,555	3,772,752	3,941,891	4,122,209	4,330,775
1	Pendapatan Daerah	3,374,516	3,630,595	3,808,975	3,997,932	4,214,576
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)	152,039	142,157	132,916	124,277	116,199
B	BELANJA	3,516,555	3,762,752	3,931,891	4,112,209	4,320,775
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,055,034	2,145,814	2,220,219	2,344,648	2,369,098
	PRIORITAS I	2,029,534	2,121,314	2,196,719	2,272,148	2,347,598
a	Gaji, Tunjangan, Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi	1,619,650	1,695,608	1,761,609	1,827,610	1,893,611
b	Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Desa	405,943	421,866	431,370	440,897	450,446
c	Belanja Bantuan kpd Parpol	941	941	941	941	941
d	Belanja Tidak Terduga	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600
	PRIORITAS III	25,500	24,500	23,500	72,500	21,500
a	Belanja Hibah	23,000	22,000	21,000	70,000	19,000
b	Belanja Bantuan Sosial	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		-	-	-	-	-
2	BELANJA LANGSUNG	1,461,521	1,616,938	1,711,672	1,767,562	1,951,676



No	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
		-	-	-	-	-
	PRIORITAS I	26,242	27,036	27,831	28,625	29,419
a	Belanja Jasa Kantor (air, telp., Listrik)	9,661	9,786	9,912	10,038	10,163
b	Kewajiban kpd Pihak ke 3	16,581	17,250	17,919	18,587	19,256
	PRIORITAS II	1,435,279	1,589,902	1,683,842	1,738,937	1,922,257
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	PRIORITAS I	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
a	Penyertaan Modal	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C)	-	-	-	-	-



## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

---

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berikut ini diuraikan hasil identifikasi permasalahan di Kabupaten Cianjur dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. Pendidikan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka peningkatan peran dan fungsi stakeholders guna peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dan peningkatan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing antara lain:

- a. Belum diselenggarakannya integrasi dan pemanfaatan data pokok pendidikan secara optimal dan sistematis.



- b. Belum optimalnya upaya terobosan untuk menyelesaikan persoalan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berdampak pada rendahnya angka melanjutlan dari SD/MI atau yang sederajat ke SMP/mts atau yang sederajat dalam upaya penuntasan pendidikan dasar 9 tahun.
  - c. Belum tersistemasiannya upaya menumbuhkembangkan budaya belajar di kalangan peserta didik guna meningkatkan efektifitas program wajib belajar 12 tahun.
  - d. Belum mantapnya pengembangan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan dunia usaha atau industri dalam rangka menyalurkan dan mendayagunakan lulusan yang dihasilkan.
  - e. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan belum memadai;
  - f. Belum optimalnya pemasayarakatan perpustakaan dan minat baca pada masyarakat disertai dengan masih rendahnya minat baca masyarakat.
  - g. Masih rendahnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam penyediaan sarana prasarana perpustakaan.
2. Kesehatan
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Cianjur antara lain:
- a. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan yang diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH) menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 mencapai AHH 69,18 yang masih lebih rendah dibandingkan dengan AHH Jawa Barat yang mencapai 70,25 poin.
  - b. Masih tingginya kesenjangan layanan kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar wilayah, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan.
  - c. Belum terumusikannya upaya terobosan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan yang dapat menjangkau ke wilayah-wilayah pelosok dan terpencil serta mengurangi kesenjangan layanan kesehatan lainnya.



- d. Masih lemahnya kelembagaan/pranata pendayagunaan tenaga kesehatan yang meliputi penyebaran, kompetensi, sistem pengembangan karir, standar profesi, serta sistem penghargaan dan sanksi.
  - e. Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) terkendala oleh ketersediaan lahan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan aspek-aspek administratif lainnya.
  - f. Perwujudan Rumah Sakit Umum di Kecamatan Pagelaran yang melayani penduduk di Wilayah Tengah dan Selatan Kabupaten Cianjur masih harus dilengkapi dengan syarat-syarat pembangunan rumah sakit umum daerah.
  - g. Masih kurangnya tenaga medis di daerah terpencil.
  - h. Kurang optimalnya penyediaan sarana, prasarana, alat, obat dan tenaga terlatih dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit menular maupu penyakit tidak menular.
  - i. Masih rendahnya penerapan pelayanan prima pada masyarakat.
3. Pekerjaan Umum
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur yang diarahkan pada pengembangan wilayah secara lebih merata dan terpadu antara lain:
- a. Belum diselenggarakannya proses mengartikulasikan standar inti untuk kegiatan pembinaan serta pengelolaan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kapasitas institusional pengelola, penerima manfaat, serta pelaku pembangunan lainnya.
  - b. Belum optimalnya koordinasi pengembangan infrastruktur yang mendukung sistem aktivitas dan pergerakan wilayah guna keterpaduan perkembangan sosial ekonomi antar wilayah.
  - c. Belum optimalnya pembinaan jalan (meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta



- penelitian dan pengembangan) dalam upaya pembentukan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.
- d. Belum berkembangnya pemanfaatan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan di mana beberapa bagian wilayah di Kabupaten Cianjur berada di kawasan rawan bencana yang menyulitkan pengembangan infrastruktur.
  - e. Belum optimalnya kapasitas pemerintah dalam pembangunan jalan (meliputi koordinasi pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan) untuk mewujudkan pengembangan jalan kolektor primer, pengembangan jalan lokal primer, dan pengembangan jaringan jalan strategis (JJS) kabupaten.
4. Penataan Ruang
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang yang diarahkan pada persiapan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pengembangan wilayah antara lain:
- a. Belum adanya peraturan tata ruang yang lebih rinci untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sesuai dengan fungsi yang diembannya.
  - b. Belum memadainya prasarana dan sarana yang dapat menunjang fungsi pusat-pusat pertumbuhan PKW, PKL, PPK serta PPL.
  - c. Belum adanya penetapan deliniasi kawasan lindung secara fisik di lapangan, arahan untuk perwujudannya serta pengawasan perwujudannya.
  - d. Belum optimalnya lembaga yang mengkoordinasikan upaya penataan daerah.
  - e. Belum adanya peraturan ruang daerah yang mengatur pengembangan kawasan strategis kabupaten.
  - f. Terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang.



5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat antara lain:
  - a. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam dalam pengurangan risiko bencana.
  - b. Kurang optimalnya sistem ketenteraman ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan dukungan sarana dan prasarana trantib.
  - c. Masih rendahnya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
  - d. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur hukum.
  - e. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum masih tinggi.
6. Sosial  
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penanganan permasalahan sosial antara lain:
  - a. Masih rendahnya aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - b. Belum terwujudnya pengaturan dan pengurusan penanganan masalahmasalah sosial ke dalam kebijakan yang efektif, serasi, terpadu, dan menuju suatu kinerja program yang optimal.
  - c. Masih lemahnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam perwujudan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan.
  - d. Belum terumuskannya strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.



7. Tenaga Kerja

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam perlindungan dan perluasan lapangan kerja antara lain:

- a. Belum adanya dukungan kebijakan yang memberi kemudahan dalam pengembangan industri padat karya.
- b. Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan yang menentukan dan mengukur besarnya masalah kesempatan kerja dan masalah ketenagakerjaan disertai perumusan kebijakan usaha yang sistematis dan tepat.
- c. Terjadinya pengurangan lapangan kerja formal yang memberi tekanan pada kesejahteraan pekerja informal.
- d. Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain karena tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angka kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Cianjur belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
- e. Belum dimanfaatkannya UKM dalam kerangka penciptaan lapangan kerja melalui terbukanya akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UKM, seperti pembiayaan dan kredit, akses pasar, teknologi dan perbaikan manajemen.
- f. Masih lemahnya dukungan kebijakan pasar kerja yang koheren dan terintegrasi dengan sistem hubungan industrial, strategi industrialisasi dan sistem jaminan sosial yang baik, diantaranya yaitu suplai yang besar dari buruh terampil, aksesibilitas yang luas terhadap informasi mengenai pasar kerja, dan penarikan sumber dana untuk jaminan sosial yang didistribusikan secara merata.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peningkatan



potensi diri sumber daya aparat tentang pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak antara lain:

- a. Koordinasi pengembangan kelembagaan PUG, pembangunan perempuan, serta perlindungan anak masih lemah.
  - b. Koordinasi perwujudan kebijakan yang responsif gender di berbagai bidang belum terselenggara.
  - c. Masih rendahnya partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan serta belum adanya wadah yang dapat mendengar dan menyuarakan pendapat dan harapan anak.
  - d. belum optimalnya perwujudan kebijakan-kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan ketidakpatutan, perlindungan, jaminan hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa dan melaksanakan ajaran agamanya.
  - e. Belum optimalnya peran Gugus Tugas Trafficking dan Perdagangan Orang tingkat Kabupaten dalam penanggulangan dan pencegahan perdagangan anak.
  - f. Belum dibentuknya gugus tugas perlindungan anak di tingkat Kabupaten.
9. Lingkungan Hidup
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan pranata sosial dalam perwujudan kelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Belum terwujudnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
  - b. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan, sumberdaya air, sumberdaya hayati, dan non hayati yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  - c. Makin meningkatnya lahan kritis akibat eksploitasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya.
  - d. Belum optimalnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.



10. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan fasilitasi untuk upaya penurunan tingkat kelahiran melalui pelayanan KB dan pemberian advokasi dan peningkatan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja serta penataan administrasi kependudukan antara lain:

- a. Makin kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana di tingkat desa.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.
- c. Masih rendahnya kesadaran ber KB khususnya pada keluarga miskin/kurang mampu/keluarga pra sejahtera.
- d. Masih kurang optimalnya ketersediaan alat, obat kontrasepsi bagi keluarga miskin di tingkat kabupaten.
- e. Belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat berkaitan dengan masalah kependudukan dan keluarga berencana.
- f. Belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan penegakkan hak reproduksi.
- g. Sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

11. Perhubungan

Pelayanan perhubungan di Cianjur masih menemui beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) pada jaringan jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya; dan
- b. Belum optimalnya fungsi terminal tipe B yang berperan sebagai pusat sistem transportasi sebagai pendukung fungsi koleksi dan distribusi Center Business District (CBD) Cianjur.



12. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Dalam upaya pengembangan kelembagaan KUMKM dihadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kemampuan pelaku KUMKM melakukan inovasi dalam wirausaha, akses permodalan, promosi pemasaran, penguasaan teknologi tepat guna (TTG), dan pengembangan inkubator bisnis.
- b. Kurang kondusifnya peluang penumbuhkembangan pelaku KUMKM (wirausaha) baru.
- c. Kurangnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
- d. Daya saing produk koperasi UMKM masih rendah.

13. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi terkait penanaman modal, antara lain:

- a. Kurang ter-update-nya profil investasi daerah.
- b. Masih rendahnya investor untuk menanamkan investasi di Cianjur Selatan.
- c. Pembangunan infrastruktur belum merata di Cianjur Selatan.

14. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga, antara lain:

- a. Pembangunan keolahragaan saat ini berkaitan dengan pembinaan keolahragaan yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlit yang menjadi tulang punggung Kabupaten Cianjur dan pentas kompetensi olahraga nasional;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasana kepemudaan untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

15. Kebudayaan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan budaya antara lain:



- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya.
  - b. Masih rendahnya kesadaran untuk menjaga, merawat dan promosi warisan budaya lokal.
16. Kehidupan Beragama dan Aktualisasi Akhlakul Karimah
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kehidupan beragama dan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam pembangunan Kabupaten Cianjur antara lain:
- a. Belum adanya pengaturan pengembangan sarana dan prasarana ibadah yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengembangan umat beragama itu sendiri serta mampu menciptakan kerukunan hidup di antara umat beragama.
  - b. Belum kuatnya perwujudan sikap toleransi serta masih berkembangnya sikap fanatisme berlebihan atas keyakinan/agama yang dianut dapat memicu munculnya masalah dalam kerukunan antar umat beragama.
  - c. Kurangnya pembinaan generasi muda agar memiliki budaya kuat berintikan nilai-nilai agama yang dinamis dan relevan dengan realitas kemajuan di era globalisasi.
  - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama sehingga perwujudan landasan moral, spiritual, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih lemah.
  - e. Masih lemahnya upaya penumbuhkembangan motivasi diri para pelaku pembangunan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam pembangunan.
17. Pertanian
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, antara lain:
- a. Para pelaku usaha kurang terampil mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.



- b. Pengembangan produk agribisnis yang memanfaatkan keunggulan lokal dan menata sentra-sentra agribisnis unggulan belum optimal.
  - c. Daya dukung infrastruktur belum optimal dalam menunjang produksi dan pemasaran pertanian.
18. Perikanan
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan perikanan, antara lain:
- a. Belum optimal mengidentifikasi potensi kawasan pesisir dan kelautan secara rinci yang memudahkan penciptaan iklim kondusif untuk investasi sebagai dasar bahan promosi investasi.
  - b. Belum berkembangnya sarana dan prasarana penunjang produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pengembangan potensi pesisir dan kelautan dalam rangka peningkatan produksi daerah dan pemenuhan konsumsi lokal.
  - c. Masyarakat masih cenderung bercorak agraris sehingga kurang mampu memanfaatkan potensi kawasan pesisir dan kelautan yang menjadi tempat tinggalnya.
  - d. Keterbatasan tenaga penyuluh perikanan.
  - e. Kualitas sumber daya manusia petani ikan masih rendah.
  - f. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran.
  - g. Kurang dapat memanfaatkan akses permodalan.
19. Kepariwisata
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola pembangunan pariwisata antara lain:
- a. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan, pemeliharaan, dan kenyamanan destinasi pariwisata.
  - b. Kurang tertatanya objek wisata.
  - c. Sarana dan prasarana pendukung belum sesuai dengan standar pariwisata.
  - d. Kurangnya promosi pariwisata.
  - e. Infrastruktur menuju destinasi wisata belum memadai.



- f. Kurangnya event pariwisata.
  - g. Belum ada invstasi di bidang pariwisata.
20. Perdagangan
- Dalam upaya pengembangan tata kelola pembangunan bidang perdagangan dihadapi permasalahan sebagai berikut:
- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana perdagangan serta belum tertatanya pasar rakyat.
  - b. Kurang terjaminnya perlindungan konsumen dalam penggunaan produk dan standarisasi produk–produk yang dipasarkan.
  - c. Belum adanya regulasi tentang penataan dan pemberdayaan PKL.
  - d. Belum adanya sentra-sentra perdagangan.
  - e. Belum adanya pengaturan penjualan per komoditi.
  - f. Belum adanya sarana, prasarana dan SDM kemeterologian.
21. Perindustrian
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola pembangunan perindustrian antara lain:
- a. Kurang tertatanya kluster industri yang mengakomodasi kemampuan inovasi dan diversifikasi produk industri, komoditi lokal, kemudahan akses perijinan dan permodalan bagi industri kecil.
  - b. Kurangnya kemitraan industri kecil dan industri menengah.
  - c. Belum adanya regulasi tentang rencana pengembangan industry kabupaten (RPIK) berupa Perda.
  - d. Belum adanya sentra industri.
  - e. Belum tersedianya kawasan peruntukan industry dan zona industri.
  - f. Masih rendahnya daya saing produk IKM.
22. Kepegawaian
- Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur, antara lain:
- a. Belum terselenggaranya penilaian kompetensi yang menjamin tersedianya informasi progresif yang akurat, handal, dan komprehensif



mengenai taraf kemampuan kritis sumber daya manusia yang dimiliki organisasi pemerintah daerah.

- b. Belum optimalnya kesiapan aparatur Negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja organisasi pemerintah daerah yang prima.
- c. Penetapan formasi pegawai belum terselenggara secara optimal.
- d. Belum diterapkannya budaya kerja untuk pengembangan jati diri, sikap dan perilaku aparatur negara sebagai pelayanan masyarakat, pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok, memperbaiki kebijakan publik, memperbaiki pelaksanaan manajemen dan pelayanan masyarakat, memperbaiki pelaksanaan pengawasan, evaluasi kinerja dan penegakan hukum secara konsisten.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah antara lain:

- a. Struktur pemerintahan belum menunjukkan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, sistem manajemen pemerintahan yang berkembang secara efektif, pelayanan publik di Daerah yang efisien, serta transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik yang meningkat.
- b. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten, di antaranya meliputi masih adanya tumpang tindih tupoksi dalam penyelenggaraan kewenangan antar instansi dan unit kerja dalam pemerintah kabupaten, belum optimalnya sarana prasarana pemerintah, masih adanya ketidaksesuaian antara sifat pekerjaan dengan bentuk organisasi, masih adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dengan besaran organisasi, serta kelembagaan pemerintah yang belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional.



23. Hukum & HAM

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM, antara lain:

- a. Masih lemahnya pengembangan kelembagaan yang mencakup aspek formulasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan penetapan peraturan; aspek peranan dan tanggungjawab lembaga Negara, pemerintah, dan masyarakat; aspek sistem organisasi lembaga pemerintah di berbagai sektor, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat; aspek insentif dalam pembangunan yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat dalam pembangunan; dan aspek kerangka legal yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang beraneka ragam.
- b. Masih lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan upaya-upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
- c. Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang baru, sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Belum dipahaminya budaya hukum sebagaimana seharusnya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

24. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Dalam upaya penciptaan pranata kelembagaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah yang dihadapi adalah:

- a. Masih rendahnya kapasitas pemerintah Kabupaten dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- b. Belum dimanfaatkannya sistem informasi lingkungan sebagai acuan bagi pembuat keputusan atau kebijaksanaan lingkungan terutama saat mengkaji apakah proyek/kegiatannya akan merusak lingkungan di mana program-program pembangunan belum berorientasi pada pola



pembangunan yang berkelanjutan berbasis kelestarian dan daya dukung lingkungan. atau tidak, dan apakah ada dampak penting yang perlu ditanggulangi agar dampak tersebut dapat dikurangi atau dihindarkan dengan cara menerapkan IPTEK/teknologi.

- c. Belum berkembangnya upaya alih teknologi untuk pengembangan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4.2. ISU STRATEGIS

---

isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penentuan isu strategis merupakan hasil telaahan terhadap berbagai hal, antara lain:

1. Permasalahan pembangunan Cianjur
2. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional (provinsi) yang mempengaruhi Kabupaten Cianjur.
3. Isu strategis dari daerah sekitarnya yang mempengaruhi Kabupaten Cianjur.
4. Isu strategis/kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur, yaitu:
  - a. RPJPD Kabupaten Cianjur
  - b. RTRW Kabupaten Cianjur
  - c. Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021



#### 4.2.1. Telaahan Isu Internasional

Beberapa isu strategis di tingkat internasional yang juga mempengaruhi pembangunan di Indonesia dan perlu diantisipasi/direspon oleh pemerintah daerah, yaitu:

##### 1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen untuk melanjutkan pencapaian dan tetap mengejar berbagai perbaikan di segala aspek kehidupan manusia dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*. Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)* pada Tahun 2015, maka SDGs dimulai Tahun 2015 hingga Tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

- a. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
- b. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
- d. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
- e. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
- f. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.



- g. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
  - h. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
  - i. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
  - j. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
  - k. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
  - l. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
  - m. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
  - n. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
  - o. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
  - p. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
  - q. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.
2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)



Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020.

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 Priority Integration Sectors (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Tujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan kompetitif.

#### **4.2.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:



TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan nawacita disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1.  
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

#### 4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018 merupakan salah satu dokumen yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013-2018 yaitu:

**"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap



berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

**Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

**Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat**

**Visi: “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”**

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi Pertama,</b> Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;</li> <li>3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK</li> <li>4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga</li> </ol>
<b>Misi Kedua,</b> Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur</li> <li>2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian</li> <li>3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi</li> <li>4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan</li> <li>5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional</li> </ol>
<b>Misi Ketiga,</b> Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.</li> <li>2. Terwujudnya pemerintahan yang modern.</li> <li>3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK.</li> <li>3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur.</li> <li>4. Meningkatnya stabilitas</li> </ol>



Misi	Tujuan	Sasaran
	oleh aparaturnya yang kompeten. 4. Meningkatkan stabilitas di daerah.	tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
<b>Misi Keempat,</b> Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.	1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana. 2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
<b>Misi Kelima,</b> Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.	1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga; 3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.	1. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu. 3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, pembangunan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 10 prioritas (*common goal*) sebagaimana terdapat dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, meliputi:

1. CG 1: Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.
2. CG 2: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan.
3. CG 3: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku.
4. CG 4: Meningkatkan Ekonomi Pertanian.
5. CG 5: Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian.
6. CG 6: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan.
7. CG 7: Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan.
8. CG 8: Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan.
9. CG 9: Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan.



10. CG 10: Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK.

#### 4.2.4. Telaahan RPJPD Kabupaten Cianjur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Cianjur 2005-2025.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 adalah:

**”Dengan Iman dan Takwa Berorientasi Budaya dan Akhlaqul Karimah,  
Cianjur Menuju Kabupaten Unggulan Bidang Agribisnis dan Pariwisata”**

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur 2005-2025 sebagai berikut:

Misi ke-1. Mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berdaya saing adalah mewujudkan masyarakat Cianjur yang memiliki jati diri berpengetahuan tinggi, halus budi bahasa, dan memiliki kualitas jasmani yang baik; mewujudkan masyarakat Cianjur yang berkomitmen dengan karakteristik akhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; serta menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi tinggi, serta jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) sehingga pada akhirnya membentuk manusia yang berdaya saing.

Misi ke-2. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) adalah meningkatkan

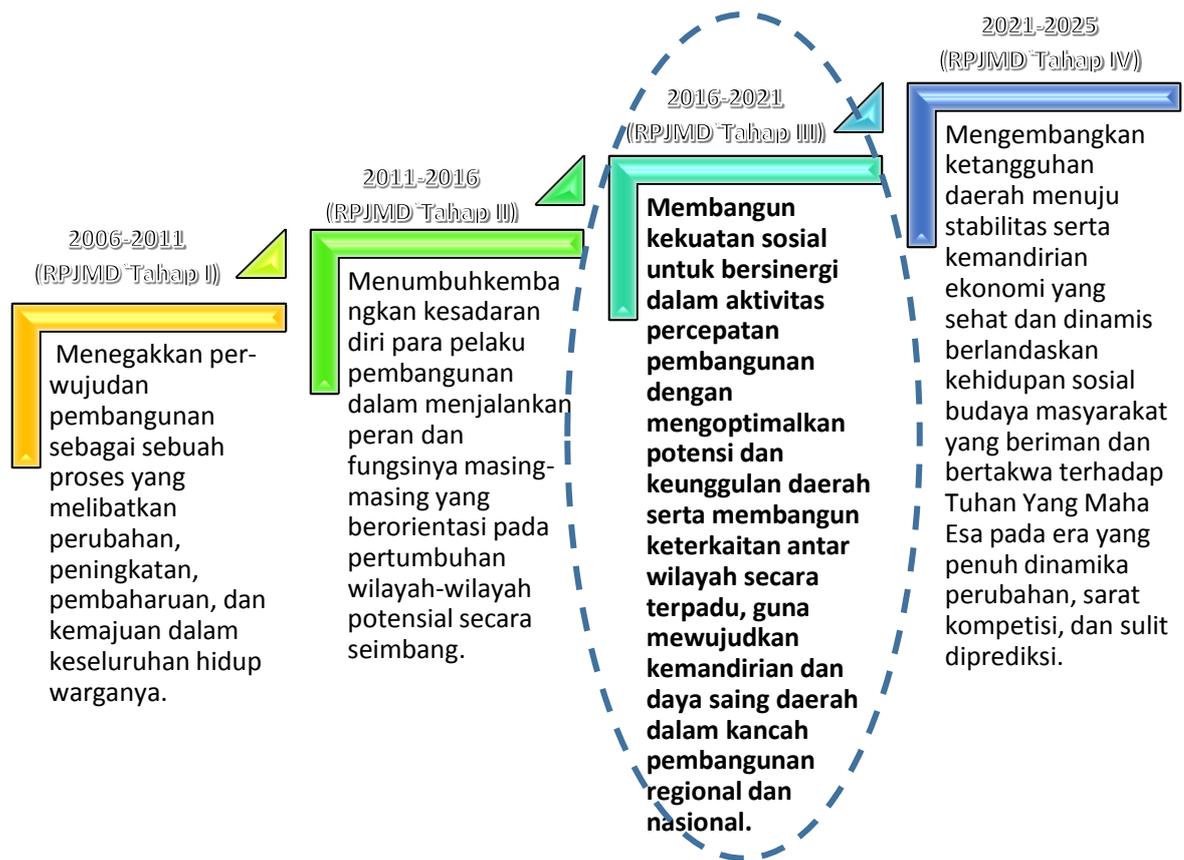


pelayanan bagi semua *stakeholders*; meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif; meningkatkan kinerja lembaga dan aparat di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik; menyediakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta kondusif bagi masyarakat; meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik; menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat; mendorong proses demokrasi di masyarakat; serta menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Misi ke-3. Mengembangkan Kabupaten Cianjur sebagai produsen utama komoditas pertanian melalui penguatan sistem agribisnis yang efisien, progresif, aman, dan berkelanjutan adalah meningkatkan produk pertanian dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas tinggi dengan cara membuka peluang seluas-luasnya bagi bangkitnya para produsen komoditas pertanian yang mengembangkan sistem pertanian secara efisien, progresif, aman, dan berkelanjutan.

Misi ke-4. Mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal adalah meningkatkan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menguatkan ekonomi daerah dan mengembangkan kegiatan industri sektor terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya, lingkungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta mendorong keterlibatan masyarakat.

**Gambar 4.2**  
**Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang**  
**Daerah**  
**Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025**



Tahapan dan skala prioritas utama RPJPD Kabupaten Cianjur untuk tahap ketiga yang memayungi RPJMD 2016-2021, secara garis besar diprioritaskan pada upaya membangun kekuatan sosial untuk bersinergi dalam aktivitas percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah serta membangun keterkaitan antar wilayah secara terpadu, guna mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dalam kancah pembangunan regional dan nasional. Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan ketiga ini adalah:



**Tabel 4.2.**  
**Prioritas Pembangunan Pada Tahapan Pembangunan Ketiga RPJPD**  
**Kabupaten Cianjur 2005-2025**

Bidang	Uraian
Sosial	Meningkatkan profesionalisme dan memperluas kekuatan pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta) dalam pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial; dan meningkatkan peran aktif masyarakat serta mendukung terlaksananya otonomi daerah.
Kebudayaan	Melibatkan potensi-potensi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, terutama hasil dari proses internalisasi terhadap institusi dan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana budaya terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diproyeksikan menjadi pusat budaya. Pembangunan budaya pada tahap ini diharapkan akan dapat meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal/daerah dan pengembangannya sebagai wahana membangun bangsa dan watak bangsa, yang dapat diwujudkan melalui upaya-upaya melindungi kebudayaan lokal serta mengembangkan eksistensi budaya Cianjur di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
Keagamaan	Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
Kependudukan	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Pengendalian jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk selayaknya didukung oleh upaya peningkatan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja, tersedianya alat kontrasepsi dan obat non kontrasepsi, pembinaan institusi masyarakat peduli KB, serta pembinaan ketahanan keluarga. Administrasi kependudukan dilakukan dengan makin memantapkan upaya peningkatan sistem administrasi kependudukan, tersedianya data yang objektif, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terlindunginya status hukum dan identitas penduduk.
Pendidikan	Pendidikan diarahkan sedemikian hingga lulusannya memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN. Standar mutu yang berkesinambungan pada periode ini diharapkan relevan dengan pasar regional ASEAN. Program kerja yang berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan pasar regional menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai daya saing yang diinginkan. Program manajemen pendidikan melalui standarisasi, penjaminan mutu, kemudian akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan diarahkan pada beberapa fokus. <i>Pertama</i> , pada



Bidang	Uraian
	<p>pendayagunaan secara optimal data basis serta informasi pendidikan yang telah tersedia (sistem dan jaringan informasi pendidikan berbasis teknologi informasi/TI) dalam rangka memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan pendidikan, termasuk didalamnya penyebarluasan data dan informasi pendidikan kepada dunia publik.</p> <p>Selanjutnya, pemeliharaan serta pembinaan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai pada periode lima tahun sebelumnya. Selanjutnya, adalah percepatan penuntasan gerakan pencapaian Wajib Belajar 12 tahun dengan prioritas pada peningkatan angka partisipasi sekolah kejuruan (vokasional), disamping difokuskan pula kepada upaya untuk peningkatan mutu lulusan melalui pemantapan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha. Termasuk dalam fokus ini adalah upaya untuk meningkatkan pendidikan keterampilan dan keahlian melalui jalur pendidikan non-formal.</p> <p>Akselerasi peningkatan kualitas dan kualifikasi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pendidik guna menunjang sekaligus memperkuat peningkatan mutu lulusan pada semua jenjang pendidikan, merupakan prasyarat yang perlu dilakukan. Fokus berikutnya adalah upaya peningkatan status perguruan tinggi daerah yang ada sehingga keberadaannya bisa sejajar dengan keberadaan dan mutu perguruan tinggi besar yang lainnya. Dan, perkuatan tata kelola melalui pemantapan mekanisme penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan dan jenjang pendidikan secara lebih terbuka, transparan, demokratis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas berkait dengan pengelolaan pembangunan pendidikan yang sinergis dengan kekuatan sosial yang ada di bidang kesehatan.</p>
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<p>Diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkrystal, dimulai pada tahapan perumusan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari adanya dukungan, koordinasi serta terciptanya sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan melalui networking dan kerjasama yang dilakukan secara berkesinambungan dan semakin erat.</p> <p>Untuk itu perlu dilakukan peningkatan peranserta dan kemandirian serta memperkuat kapasitas lembaga masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.</p>
Pemuda & OR	<p>Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada periode ini sudah dapat memanfaatkan/menggunakan potensi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, terutama hasil dari proses pelibatan pihak eksternal (masyarakat dan swasta). Berbagai perestasi di tingkat propinsi maupun nasional menjadi target rutin yang harus ditunjukkan pada periode ini.</p> <p>Berbagai sarana yang representative merupakan konsekwensi logis yang harus tersedia; penghargaan terhadap semua pihak yang terlibat dan yang berperestasi, merupakan modal yang kuat untuk menjadikan bidang ini sebagai bidang yang diminati berbagai pihak untuk terlibat didalamnya.</p>
Ketenagakerjaan	<p>Dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pembinaan dan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.</p>



Bidang	Uraian
	<p>Hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, serikat pekerja, serta lembaga ketenagakerjaan lainnya dilaksanakan sesuai kemitra andalam proses produksi, tanggungjawab, dan keuntungan</p> <p>Selain itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan ditekankan pula pada penyediaan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi dan dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi; dengan peningkatan pengelolaan pelatihan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia dan angka tenaga kerja non skill rendah.</p>
Aparatur & Pelayanan Publik	<p>Diarahkan pada pendayagunaan kelembagaan, ketatalaksanaan, disiplin, dan tertib hukum guna meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara serta penguatan upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik.</p>
Agribisnis	<p>Diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku agribisnis serta jaringan pemasaran regional. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan daya saing produk sehingga dapat bersaing dengan produk luar dengan tetap mengutamakan keunggulan lokal dalam pengembangannya, pengembangan diversifikasi produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, pengembangan pengelolaan agribisnis melalui pembentukan badan usaha berbasis manajemen agribisnis, penataan peran antar pelaku agribisnis dalam rantai produksi, pengembangan agribisnis yang diintegrasikan dengan industri pengolahan, peningkatan daya saing melalui inovasi, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk serta diversifikasi jenis usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana promosi dan pemasaran produk, serta pemenuhan konsumsi lokal dan regional.</p> <p>Untuk mendukung terbangunnya sinergi antar pelaku agribisnis, maka perlu dikembangkan fasilitasi penguatan kemitraan usaha sehingga percepatan pembangunan agribisnis dapat terwujud.</p>
Kelautan Dan Pesisir	<p>Pembangunan kelautan dan pesisir diarahkan pada penataan kawasan pesisir dan kelautan. Hal dimaksud dilakukan dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pengembangan sarana dan prasarana penunjang investasi, promosi investasi, diversifikasi usaha pengolahan hasil, pengembangan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan laut, peningkatan jejaring usaha berskala regional, pengembangan usaha jasa rekreasi bahari, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, serta pengembangan budaya kelautan (<i>marine culture</i>).</p>
Kepariwisataan	<p>Diarahkan pada peningkatan sinergi sektor-sektor yang sangat terkait dengan pariwisata di daerah seperti sektor pertanian yang dapat dilakukan melalui pengembangan wisata agro, peningkatan sinergi antar para pelaku usaha kepariwisataan untuk percepatan pembangunan industri pariwisata daerah, upaya sosialisasi secara luas melalui kegiatan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dengan dukungan manajemen yang profesional sehingga dapat mengintegrasikan kegiatan pengelolaan usaha pariwisata antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara. Untuk kepentingan itu, maka pembangunan kepariwisataan ditekankan pada manajemen profesional, pengintegrasian kegiatan pengelolaan usaha pariwisata antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan kepariwisataan antar kabupaten/kota, propinsi dan negara.</p>
KUMKM	<p>Diarahkan pada penataan kelembagaan KUMKM yang dilakukan melalui pembentukan asosiasi/perkumpulan UMKM sejenis guna mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat, penataan pola kemitraan antar pelaku</p>



Bidang	Uraian
	<p>UMKM dan pola kemitraan antara pelaku UMKM dan pengusaha besar, penataan kluster UMKM berdasarkan komoditas peningkatan standar produk peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pemasaran dan promosi skala regional, serta berjalannya sistem insentif dan disinsentif bagi pengelola koperasi.</p> <p>Peningkatan peranan KUMKN dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kemandirian KUKM, dan peningkatan daya saing diarahkan pada peningkatan daya saing KUKM untuk memenangkan kompetisi di era pasar bebas, serta penguatan KUMKM melalui dukungan kolateral dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.</p>
Industri & Perdagangan	<p>Diarahkan pada keterkaitan jaringan antara industri kecil terhadap industri menengah dan besar, yang dilakukan melalui fasilitasi dan penataan networking antara industri kecil dengan industri menengah dan besar, penataan dan pengembangan tumbuhkembangnya industri-industri andalan, diversifikasi produk dan kemasan industri olahan, mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri, menata distribusi barang, perluasan jaringan perdagangan regional.</p> <p>Peningkatan peranan sektor industri dan perdagangan dalam mendorong peningkatan produksi daerah dan distribusi barang pada tahap ini diarahkan pada pengembangan inovasi produk, pengembangan industri kecil yang tangguh, fasilitasi kemitraan antara pelaku industri kecil menengah dengan industri besar, peningkatan promosi dan pemasaran produk lokal, dan penguatan kegiatan ekspor ke luar daerah.</p>
Investasi	<p>Upaya peningkatan investasi dilakukan melalui penyiapan sistem insentif bagi investor, pemeliharaan sarana &amp; prasarana penunjang, promosi investasi, serta penataan wilayah investasi.</p>
Hukum & HAM	<p>Diarahkan kepada upaya melakukan pemantapan kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM dalam upaya mendorong Tata kelola Pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum; peningkatan kualitas layanan masyarakat serta terciptanya kepastian hukum dan partisipasi publik dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan pada periode ini adalah mulai terimplementasinya manajemen kinerja dan akuntabilitas publik serta rintisan sistem penggajian yang didasarkan pada kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan hukum secara komprehensif yang mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum yang disertai dengan penegakkan hukum yang tegas, konsisten dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terus diarahkan menuju sasaran yang diharapkan.</p> <p>Sasaran pembangunan hukum pada tahap ini adalah makin menguatnya pembentukan sistem hukum daerah yang berfungsi secara mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan daerah yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.</p>
Ketentraman & Ketertiban	<p>Diarahkan pada perwujudan koordinasi yang kuat antara institusi terkait melalui upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat agar secara simultan bersama aparat dan institusi terkait sehingga mampu mencegah terjadinya ancaman kejahatan dan tindakan yang meresahkan, menjamin terwujudnya tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya</p>



Bidang	Uraian
	perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. dalam rangka mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penataan Ruang	<p>Pengembangan penataan ruang diarahkan pada pemantapan efisiensi dan efektifitas pengembangan wilayah di daerah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP) meliputi WP Utara, WP Tengah dan WP Selatan.</p> <p>Dalam rangka menciptakan integrasi antarwilayah di daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah maka pada tahap ini dilakukan peningkatan fungsi dan pemantapan pengembangan sistem perkotaan dan sistem perdesaan, pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa, serta pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.</p> <p>Pada pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) Cianjur, pemantapan pengembangan diarahkan pada fungsi pemerintahan, pusat koleksi dan distribusi, permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pelayanan masyarakat.</p> <p>Pada pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan, pemantapan pengembangan diarahkan pada fungsi pusat perdagangan dan jasa, permukiman, pusat koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa kecamatan.</p> <p>Pada pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa, pemantapan pengembangan diarahkan pada fungsi pusat produksi, permukiman industri perkebunan dan pertanian serta mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dengan skala pelayanan beberapa kecamatan pada hirarki yang lebih rendah dari pusat kegiatan lokal.</p> <p>Pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, pemantapan pengembangan diarahkan pada fungsi pusat produksi pertanian dengan skala lokal dan skala permukiman dimana kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayahnya lebih rendah dari pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa.</p> <p>Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ini tidak dapat terlaksana tanpa perwujudan sistem prasarana yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan satu sama lain dan wilayah layanannya. Diantara sistem prasarana dimaksud adalah perwujudan sistem jaringan transportasi; jaringan energi/listrik; jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan drainase; dan prasarana pengelolaan lingkungan.</p> <p>Pemantapan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah harus dibarengi dengan pemantapan perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk menciptakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dalam hal ini pembangunan wilayah tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan fungsi kawasan lindung yang melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta menjaga kualitas daya dukung lingkungan daerah, menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan, dan terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang.</p>
Infrastruktur Wilayah	Diarahkan pada percepatan pembangunan prasarana wilayah dengan lebih meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga pengelola serta para pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur wilayah serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan prasarana wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Cianjur yang produktif dan memiliki daya saing serta mempertahankan kemantapan sarana dan prasarana yang telah ada.



Bidang	Uraian
	<p>Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya prasarana transportasi jalan, meningkatnya kondisi kemantapan jaringan jalan, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, dan meningkatnya ketersediaan air bersih serta sanitasi lingkungan. Jaringan jalan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi dari pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan menuju Pusat Kegiatan Wilayah (promosi) Cianjur maupun Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan Sukanagara dan PKL Perkotaan Sindangbarang makin mantap.</p> <p>Pengembangan prasarana transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas kemantapan prasarana jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer melalui pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan kondisi jaringan jalan yang sudah ada. Sasaran di atas dicapai juga dengan cara melanjutkan pembangunan prasarana jalan strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, meliputi dukungan terhadap penyiapan pengembangan jalan bebas hambatan Bandung-Cianjur-Sukabumi-Ciawi, penyiapan pembangunan jalan arteri primer meliputi jaringan jalan horizontal Cianjur selatan dan melanjutkan pembangunan jalan lingkaran perkotaan Cianjur yang telah dimulai pada tahap sebelumnya, keberlanjutan pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan wilayah Cianjur utara, tengah dan selatan, pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan kabupaten perbatasan, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa, pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan, pengembangan jaringan jalan strategis kabupaten, pengembangan terminal pada pusat kegiatan, pembangunan terminal barang untuk menunjang kegiatan agribisnis, dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan danau pada Waduk Cirata.</p> <p>Pada tahap ini dilanjutkan diimplementasikan konsep multi years project, sebagai konsep pendanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam tahun jamak, serta menjalin kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana strategis.</p> <p>Untuk mendukung sistem transportasi, pengembangan sistem terminal diarahkan untuk memantapkan kinerja terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, serta diarahkan pada upaya melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Cipanas, Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang, Campakamulya, Takokak, Pagelaran, Leles, Agrabinta, Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cidaun; dan pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun, dan Kecamatan Pacet.</p> <p>Perwujudan sistem jaringan transportasi darat lainnya dilakukan dengan melanjutkan revitalisasi fungsi jaringan jalan kereta api pada jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi, sementara perwujudan sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan cara melanjutkan pengembangan pelabuhan khusus pariwisata di Kecamatan Cidaun, dan perwujudan sistem jaringan transportasi udara melalui pengembangan Bandar udara perintis di Kecamatan Cidaun.</p> <p>Dalam upaya mencapai kemandirian energi regional, maka pada tahap jangka menengah ketiga ini, diharapkan pranata pengelolaan energi semakin mantap, diupayakan untuk mendorong kehandalan pasokan</p>



Bidang	Uraian
	<p>energi, terciptanya desa mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, semakin meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi, pengembangan sarana dan prasarana energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangkan energi alternatif seperti peningkatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan pembangkit listrik tenaga alternatif lainnya.</p> <p>Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air untuk pemenuhan kebutuhan air untuk mengairi persawahan dilakukan melalui pemantapan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengelolaan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; pengendalian banjir; pendayagunaan sumber daya air; pengendalian daya rusak air; pengembangan sistem informasi sumber daya air; serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>Penyediaan air baku untuk pertanian diarahkan pada keberlanjutan pengembangan waduk/bendungan, situ dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air; keberlanjutan pengembangan jaringan irigasi di Kecamatan Agrabinta, Sukanagara, Campaka, Takokak, Cibinong, dan Tanggeung Kadupandak, Cidaun, Naringgul, Warungkondang, Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon, Cugenang, Cianjur, Mande, Karangtengah, Ciranjang, Warungkondang, Campaka, Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Sindangbarang, Cibinong, Naringgul, dan Cidaun dengan karakteristik wilayah yang dilayani adalah wilayah yang memiliki potensial produksi pertanian tinggi; pemanfaatan sungai-sungai kecil yang dapat mengaliri lahan pertanian bagi kegiatan pertanian yang belum terlayani oleh prasarana irigasi akan tetapi potensial produksi tinggi; peningkatan fungsi wilayah sebagai sentra produksi pangan dan pelestarian usaha pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh konservasi tanah dan air serta fungsi sungai dalam kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS).</p> <p>Untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern, pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten; serta mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara Base Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula.</p> <p>Dalam hal pengelolaan persampahan, maka perlu diarahkan pada upaya keberlanjutan perwujudan TPAS untuk melayani skala regional maupun untuk melayani wilayah pembangunan Utara, Tengah dan Selatan. Adapun arahan pengembangan sistem drainase adalah upaya melanjutkan perwujudan sistem drainase di daerah dengan pemanfaatan Sungai Citarum sebagai saluran utama (primer) sebagaimana telah dilakukan pada tahap sebelumnya.</p>
Sumberdaya Alam dan Lingkungan	Diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah



Bidang	Uraian
Hidup	lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, memantapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK secara strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototip, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Sasaran yang ingin dicapai adalah penguatan kelembagaan IPTEK untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penelitian dan pengembangan di daerah, penguatan jaringan IPTEK melalui jalinan kerjasama antar sisi penyedia dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih intens dan lebih produktif. Pengembangan IPTEK untuk pengembangan ekonomi daerah pada tahap ini makin mantap dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing daerah.

#### 4.2.5. Telaahan Isu RTRW Kabupaten Cianjur

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur periode 2016-2021 memperhatikan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Wilayah perencanaan RTRW terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) desa.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas:

1. perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
2. pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah;
3. pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;



4. pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang;
5. perwujudan kawasan lindung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan budi daya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah;
6. perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Penetapan sistem perkotaan dalam Rencana struktur ruang wilayah, sebagai berikut:

1. PKW promosi berupa PKW promosi Perkotaan Cianjur, memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.
2. PKL, meliputi :
  - a. PKL perkotaan Cianjur memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat;
  - b. PKL perkotaan Sindangbarang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan;
  - c. PKL perdesaan Sukanagara memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah dan pertambangan.
3. PKL promosi berupa PKL promosi perkotaan Cipanas, memiliki fungsi utama sebagai pengolahan hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah.



4. PPK memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota, terdiri atas:
  - a. Wilayah Utara meliputi; PPK Pacet, PPK Ciranjang, dan PPK Warungkondang;
  - b. Wilayah Tengah meliputi; PPK Pagelaran;
  - c. Wilayah Selatan meliputi; PPK Cidaun.

Sedangkan penetapan sistem perdesaan dalam Rencana struktur ruang wilayah, sebagai berikut:

1. Sistem perdesaan merupakan PPL yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa.
2. PPL meliputi:
  - a. wilayah utara meliputi; PPL Cikalongkulon, dan PPL Bojongpicung;
  - b. wilayah tengah meliputi; PPL Takokak, dan PPL Campakamulya;
  - c. wilayah selatan meliputi; PPL Cibinong, PPL Naringgul, dan PPL Agrabinta.

Informasi lainnya mengenai struktur dan pola ruang serta indikasi rencana pemanfaatan ruang disajikan selengkapnya di Perda RTRW Kabupaten Cianjur dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan.

#### **4.2.6. Telaahan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten. Prosedur penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJM selanjutnya diatur



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan KLHS.

Telaahan KLHS mengidentifikasi intensitas keterkaitan Kebijakan, Rencana dan Program-program (K/R/P) pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi, yakni Pemanfaatan Ruang, Kedekatandengan Wilayah Bopuncur, Konversi Lahan Pertanian Produktif, Penurunan Kuantitas dan Kualitas Sumber Air, Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan, Peningkatan Volume Limbah Domestik, Pertambahan Jumlah Penduduk, Kerentanan Bencana serta Pesisir dan Pantai. Isu-isu pembangunan di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana pembangunan sebagai berikut :

**1. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pemanfaatan Ruang**

- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana airigasi.
- d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
- e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
- f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
- g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
- h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
- i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah
- j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
- k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
- l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan
- m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- n. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
- o. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan



- p. Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan local
  - q. Pengembangan Koperasi usaha mikro,kecil dan menengah (KUMKM) serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM
  - r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
  - s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Keterkaitan Kebijakan Rencana dan Kedekatan dengan Wilayah Bopuncur**
- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi.
  - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
  - e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
  - f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
  - g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
  - h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
  - i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah
  - j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
  - k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
  - l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
  - m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir (khususnya pertanian)
  - n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif



- o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM
  - p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja
  - q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
  - r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran
  - s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah
  - t. Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata.
  - u. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
  - v. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 3. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Konversi Lahan Pertanian Produktif**
- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi.
  - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
  - e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
  - f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
  - g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
  - h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
  - i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
  - j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa salingpercaya, toleransi dan tenggang rasa
  - k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.



- l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  - m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
  - n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan
  - o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
  - p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja
  - q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
  - r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran
  - s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata
  - t. Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan
  - u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kuantitas dan Kualitas Sumber Air**
- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi.
  - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
  - e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
  - f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
  - g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
  - h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
  - i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
  - j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa



- k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
  - l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
  - m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
  - n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja
  - o. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
  - p. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah
  - q. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
  - r. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 5. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan**
- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis. (Tahap Kontruksi)
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan. (Tahap Kontruksi)
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi. (Tahap Kontruksi)
  - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih. (Tahap Kontruksi)
  - e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan. (Tahap Kontruksi)
  - f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
  - g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
  - h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.



- i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
  - j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa.
  - k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. (Tahap Konstruksi)
  - l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.
  - m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam. (Tahap Konstruksi)
  - n. Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
  - o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
  - p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
  - q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
  - r. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah.
  - s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Peningkatan Volume Limbah Domestik**
- a. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
  - b. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
  - c. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
  - d. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
  - e. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.



- f. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
  - g. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa.
  - h. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS.
  - i. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu,
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
  - k. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja
  - l. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”, Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu serta Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan Tidak mempengaruhi secara langsung terhadap pemanfaatan ruang.
  - m. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
  - n. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah.
- 7. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pertambahan Jumlah Penduduk**
- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi.
  - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
  - e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
  - f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
  - g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
  - h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
  - i. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa.
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.



- k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu, Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan, khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan keperguruan tinggi lokal yang berada di kabupatencianjur, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya, serta Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
- l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
- m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
- n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan, serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- o. Pengembangan koperasiusaha mikro,kecildan menengah (KUMKM) serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM.
- p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja.
- q. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”, Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu serta Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk.
- r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.



- s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata.
- t. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat.
- u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**8. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Kerentanan Bencana**

- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi
- d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
- e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
- f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
- g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
- h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
- i. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu.
- j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa salingpercaya, toleransi dan tenggang rasa.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
- l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
- m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
- n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja.



- o. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

**9. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pesisir dan Pantai**

- a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi.
- d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
- e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
- f. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
- g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
- h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.
- i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
- j. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu
- k. Pemantapan kerukunanhidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
- l. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
- m. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu, Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan, khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan keperguruan tinggi lokal yang berada di kabupaten cianjur, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya, serta Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan



- kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
- o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
  - p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
  - q. Pengembangan koperasi usaha mikro,kecildan menengah (KUMKM) serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM.
  - r. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja (SDM).
  - s. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”,, Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu serta, Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
  - t. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
  - u. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan usaha, Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan dan peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen.
  - v. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata.
  - w. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### 4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Cianjur 2016-2021



Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan, isu internasional, nasional, Provinsi Jawa Barat, RPJPD dan RTRW Kabupaten Cianjur, maka ditetapkan isu strategis Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai kelanjutan dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2006–2011, kehendak kuat untuk memperbaiki kondisi yang ada pada masyarakat merupakan *driving force* yang akan menggerakkan Kabupaten Cianjur untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi. Ukuran kemakmuran yang digunakan dalam upaya meraih cita-cita ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0. Rentang skala tersebut dibagi menurut empat kategori, yaitu tinggi dengan nilai IPM lebih dari 80,0; kategori menengah atas dengan nilai IPM antara 66,0 – 79,9; kategori menengah bawah dengan nilai IPM antara 50,0 – 65,9; dan kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50,0. Dari perhitungan terakhir pada tahun 2010 menurut BPS Provinsi Jawa Barat didapat keterangan bahwa IPM Kabupaten Cianjur baru mencapai 69,14 dengan komponen indeks kesehatan 68,33; indeks pendidikan 80,19; dan indeks daya beli mencapai 58,89. Dengan demikian, kategori nilai IPM Kabupaten Cianjur berada pada kategori menengah atas. Walaupun demikian, jika dilihat per komponen IPMnya nilai indeks kesehatan dan indeks daya beli masih menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi. Nilai indeks pendidikan walaupun telah mencapai angka yang cukup baik, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah menjaga agar nilai tersebut tidak turun.

Catatan lain yang ditunjukkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat adalah bahwa peningkatan nilai IPM dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat 0,55, dari tahun 2007 ke tahun 2008 meningkat 0,51; dan dari tahun 2008 ke tahun 2009 maupun dari 2009 ke 2010 hanya mampu meningkat 0,49.

Sehubungan dengan hal di atas, maka hal yang perlu ditekankan dalam upaya pencapaian nilai IPM dimaksud adalah bukan sekedar meningkatkan nilainya



setiap tahun, tetapi juga meningkatkan pertambahan nilainya setiap tahun. Hal mendasar yang perlu diperhatikan untuk menyelenggarakan upaya ini adalah menerapkan empat hal pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

## 2. Pembangunan Ekonomi

### a. Peningkatan Daya saing Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah diantaranya merupakan integrasi dari pengembangan ekonomi lokal di seluruh wilayah. Pengembangan ekonomi lokal sendiri adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pelakupelaku ekonomi yang merupakan kelompok-kelompok berbasis masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengelola sumberdaya tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi lokal dapat diarahkan untuk tujuan penciptaan pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan kehidupan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuantujuan tersebut fokus strategi perlu dilakukan terutama melalui strategi peningkatan daya saing, selain strategi mengembangkan daya tarik dan daya tahan ekonomi daerah.

Beberapa indikator dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah diantaranya perekonomian daerah, sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, lingkungan usaha produktif, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan, serta perbankan dan lembaga keuangan.

Berdasarkan Penelitian dan Pengkajian yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan LP3E FE-UNPAD Tahun 2008 tentang pemetaan Daya saing Ekonomi Daerah seluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia, dari 434 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kabupaten Cianjur berada pada peringkat 206. Sebagai pembanding, berturut-turut 3 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berada di atas Kabupaten Cianjur adalah Kabupaten Cirebon pada peringkat 173, Kota Sukabumi pada peringkat 175, dan Kabupaten Sumedang pada peringkat 197. Untuk tinglat Jawa Barat



Kabupaten Cianjur berada pada tingkat 18 dari 25 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

b. Pengurangan Tingkat Kemiskinan

BPS Kabupaten Cianjur dalam Buku Statistik Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 menggambarkan salah satu permasalahan sosial yang dihadapi Kabupaten Cianjur adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur 14,32% pada tahun 2010 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Barat yaitu 10,93% pada tahun 2010.

Kondisi terburuk berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk dapat hidup layak yang dilihat dari indikator Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP) menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 baru mencapai PPP Rp 614,83 ribu yang lebih rendah dibandingkan dengan PPP Jawa Barat yang mencapai Rp 632,22 ribu.

c. Perluasan Kesempatan Kerja

Kekurang seimbangan antara jumlah tenaga kerja dan daya serap tenaga kerja ditandai oleh adanya kekurangan kesempatan kerja secara umum dan bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun sehubungan dengan penambahan penduduk.

Tersedianya lapangan kerja dan tingkat penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh dua besaran yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di pihak lain. Dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar juga.

Salah satu sasaran yang perlu dipertimbangkan untuk keperluan tersebut adalah terjaminnya upaya peningkatan produksi sebagai usaha yang terpadu dengan langkah-langkah untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

3. Pembangunan Sosial

a. Pengembangan masyarakat (*community development*)



Dengan bertumpu pada inisiatif dan partisipasi penuh warga masyarakat, maka penerapan *community development* lebih ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan kapasitas warga masyarakat (*client-centered*) daripada pemecahan masalah demi masalah (*problem-centered*). *Community/Locality development* berarti upaya pendidikan bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri dalam program-program pembangunan.

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat, masyarakat sebagai sasaran memiliki kedudukan yang sangat strategis. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya akan menerima hasil kegiatan pengembangan masyarakat, melainkan sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu pembangunan berpusat pada masyarakat. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat akan dapat beroperasi melebihi pendekatan-pendekatan individu dan kelompok, meskipun seringkali didasari oleh kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan individu dan kelompok.

b. Kehidupan beragama dan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah

Ketika menjalankan kehidupan beragama seringkali terjadi konflik antar masyarakat beragama. Hal ini banyak terlihat dalam hal penyiaran agama, yang disinyalir sering memicu ketegangan hubungan antar umat beragama. Maka, selayaknya pembangunan di bidang kehidupan beragama harus bertujuan agar kehidupan beragama selalu menuju arah positif dan menghindari serta mengurangi ekseseks negatif yang mungkin muncul dan merusak kesatuan dan ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang mengarah pada pengembangan sarana tempat ibadah secara kuantitatif maupun seremonial keagamaan tanpa diimbangi dengan pendalaman nilai-nilai agama itu sendiri dihadapkan pada kenyataan masih lemahnya



implementasi pemahaman agama pada kehidupan sehari-hari. Jumlah tempat ibadah yang meningkat dan acara seremonial keagamaan yang tampak ramai, tidak mampu mengurangi krisis moral yang terjadi di masyarakat. Jalan keluar yang kini mulai dipertimbangkan adalah orientasi pembangunan agama dan spiritual dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Orientasinya hendaknya untuk memperbaiki moralitas bangsa dan untuk memberdayakan masyarakat pemeluk agama untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat kelak.

Maka perwujudan tatanan masyarakat yang memiliki karakteristik akhlak dan budi pekerti yang luhur bersumber pada nilai dan ajaran agama adalah perwujudan tatanan sosial masyarakat madani. Dalam menyongsong kemajuan zaman, masyarakat Kabupaten Cianjur harus memiliki moral dengan kualitas unggul. Dalam perspektif Islam, masyarakat yang unggul adalah masyarakat yang berakhlakul karimah. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad saw menyebutkan : “Sesungguhnya yang paling unggul di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya” (H.R. Bukhari).

#### 4. Pembangunan Prasarana Wilayah

Perwujudan infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu jawaban tantangan yang dihadapi Kabupaten Cianjur yang wilayahnya cukup luas dengan kondisi geografis di beberapa bagian wilayah yang kurang stabil. Peran infrastruktur yang mendorong keterhubungan antar bagian wilayah dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Salah satu isu yang mengemuka terkait pengembangan wilayah dan dampaknya terhadap perekonomian, yaitu rencana pembangunan maupun pengembangan beberapa ruas jalan, antara lain:

- a. Rencana pembangunan jalan vertical Cianjur-Sindangbarang baru. Ruas ini merupakan jalur alternatif dari yang sudah ada.



- b. Rencana pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar barat Kota Cianjur. Hal ini untuk melanjutkan pengembangan kota dan sebagai salah satu alternative mengatasi kemacetan lalu lintas wilayah perkotaan.
- c. Rencana pengembangan jalur alternatif Puncak II, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur puncak
- d. Rencana Pembangunan perkantoran pemerintah daerah di Kecamatan Campaka untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Keterhubungan yang diciptakan oleh infrastruktur ini dapat menurunkan biaya transportasi yang selanjutnya meningkatkan daya saing produk dan mempercepat aktivitas ekonomi. Kondisi saat ini jalan Kabupaten Cianjur dalam kondisi mantap masih berkisar 36,35%.

5. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

a. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan

Sebagaimana diketahui sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mempertimbangkan kepentingan kelestarian lingkungan hidup menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap kerusakan lingkungan.

b. Perwujudan Kawasan Lindung

Dalam penyusunan rencana tata ruang, dipertimbangkan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya sehingga suatu wilayah dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2031 direncanakan bahwa Kabupaten Cianjur harus mewujudkan sekitar 60% luas wilayahnya untuk menjadi kawasan lindung. Namun pada kenyataannya akibat adanya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan



peningkatan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan lahan untuk kegiatan budidaya juga meningkat. Hal tersebut dapat berdampak pada banyaknya pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya di kawasan lindung.

Rencana pola ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2031 dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 217,653.87 Ha (60,22%) dan kawasan budidaya sebesar 143,781.64 Ha (39,78%).

c. Perwujudan Sistem Mitigasi Bencana

Kerentanan lingkungan sosial/masyarakat dan lingkungan fisik terbangun terhadap kejadian alam yang berpotensi bahaya (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir) dapat menimbulkan malapetaka dengan akumulasi korban yang besar dan sangat merugikan. Kabupaten Cianjur yang kondisi alamnya cukup berpotensi terpapar bencana alam (gerakan tanah, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir), masyarakatnya perlu dilindungi dari malapetaka akibat bencana alam perlu dilakukan dan pemerintah perlu berupaya mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bahaya serta meminimalisasi semua kerugian dan korban bencana.

6. Penerapan Reformasi Birokrasi

Birokrasi yang efektif dan efisien adalah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing daerah. Birokrasi yang terjadi di seluruh Indonesia pada umumnya justru tidak efektif dan efisien. Sejak era otonomi daerah ide tentang reformasi birokrasi meluas ke seluruh Indonesia. Bagaimanapun, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi yang terpenting dan tersulit adalah reformasi kultural dengan mengubah nilai-nilai budaya kerja. Untuk melakukan hal ini, maka terdapat lima bidang utama sasaran reformasi birokrasi yaitu pembaharuan paradigma dan penyusunan kerangka program, reformasi birokrasi bidang perencanaan, reformasi birokrasi bidang kelembagaan dan tatalaksana serta pengembangan sumberdaya manusia, reformasi birokrasi bidang keuangan, dan reformasi pengawasan.



## 7. Pembangunan Kewilayahan

Isu kewilayahan berdasarkan 3 (tiga) wilayah pembangunan di Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- a. Wilayah Pembangunan (WP) Utara meliputi Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Gekbrong, dan Kecamatan Cibeber.
  - 1) Bercampurnya beberapa fungsi kegiatan pada pusat bisnis kawasan perkotaan Cianjur seperti pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan, pendidikan, konsentrasi Pedagang Kaki Lima, pusat koleksi dan distribusi, tempat peribadatan dan tempat pergantian moda lalu-lintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas yang tinggi;
  - 2) Keberadaan pasar Cipanas di ruas jalan kolektor primer Cianjur – Puncak yang tidak didukung dengan sistem bongkar muat barang dan transportasi penumpang yang memadai dari dan ke pasar telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas yang tinggi terutama pada hari libur;
  - 3) Masih rendahnya upaya mempertahankan fungsi konservasi air dan tanah di Kawasan Puncak;
  - 4) Adanya dua fungsi kawasan Puncak yang ditetapkan dalam RTRWN, yaitu kawasan dengan fungsi konservasi dan sebagai kawasan andalan secara ekonomi, telah mempersulit penetapan kebijakan pengembangan kawasan Puncak-Cianjur (Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi);
  - 5) Berkembangnya budaya masyarakat perkotaan yang kurang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan;
  - 6) Masih banyaknya lahan kritis;



- 7) Berkurangnya lahan pertanian beririgasi teknis karena alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun;
  - 8) Belum optimalnya penataan kegiatan pasar yang menyebabkan gangguan pada lalulintas jalan arteri primer Cianjur – Padalarang di kawasan perkotaan Ciranjang;
  - 9) Belum optimalnya fungsi terminal Rawabango yang menampung angkutan Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP);
  - 10) Belum optimalnya dukungan layanan infrastruktur untuk kelancaran aktivitas ekonomi; dan
  - 11) Belum memadainya jaringan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.
- b. Wilayah Pembangunan (WP) Tengah meliputi Kecamatan Campaka, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Takokak, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cijati, Kecamatan Sukanagara, dan Kecamatan Tanggeung.
- 1) Masih banyaknya lahan kritis;
  - 2) Sektor-sektor potensial tersebar di wilayah ini namun pengembangannya masih terbatas;
  - 3) Belum optimalnya infrastruktur jalan dalam kecamatan, sementara infrastruktur jalan antar kecamatan cukup memadai;
  - 4) Belum memadainya jaringan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah Kabupaten Sukabumi di sebelah timur dan Kabupaten Bandung di sebelah barat;
  - 6) Banyaknya bagian wilayah ini yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan banjir;
  - 7) Potensi pencemaran Sungai Cibitung oleh logam berat (merkuri) akibat kegiatan penambangan emas di Kecamatan Campaka;
  - 8) Belum optimalnya pengembangan kegiatan produksi berbasis agribisnis;



- 9) Belum optimalnya penyediaan sarana sosial dan ekonomi;
  - 10) Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor potensial; dan
  - 11) Masih banyaknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan produksi terbatas lainnya; dan
  - 12) Belum optimalnya pengelolaan kawasan pertambangan dan wilayah berpotensi bahan tambang lainnya.
  - 13) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
- c. Wilayah Pembangunan (WP) Selatan, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Leles, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cikadu, dan Kecamatan Naringgul.
- 1) Adanya ketimpangan layanan infrastruktur di WP selatan dibandingkan dengan WP Utara;
  - 2) Infrastruktur wilayah masih terbatas;
  - 3) Masih banyaknya lahan kritis;
  - 4) Belum selesainya pengembangan jaringan Jalan Jabar Selatan;
  - 5) Belum optimalnya pengelolaan potensi pesisir dan kelautan;
  - 6) Konflik kepentingan berbagai sektor di kawasan pesisir;
  - 7) Potensi wisata belum berkembang;
  - 8) Banyaknya bagian wilayah ini yang berada pada kawasan rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang laut atau tsunami;
  - 9) Potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi pertambangan;
  - 10) Belum optimalnya sistem simpul transportasi berupa terminal yang mendukung perkembangan pusat kegiatan lokal Sindangbarang;
  - 11) Belum optimalnya penyediaan sarana sosial dan ekonomi;
  - 12) Belum optimalnya infrastruktur jalan antar kecamatan diantaranya ke kecamatan Cikadu, Kecamatan Leles, dan Kecamatan Agrabinta; dan
  - 13) Belum optimalnya perwujudan kawasan lindung.



## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1. VISI

---

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pengetahuan diatas, maka Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah:

#### **“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

**Lebih maju:** pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

**Agamis:** pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

### 5.2. MISI

---

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.



3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

---

Perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur masa bakti 2016-2021 sangat ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tiga misi pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan dan 12 sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan gambaran apa yang menjadi fokus pembangunan Cianjur selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan fokus yang jelas, maka setiap sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target yang jelas dan terukur setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur berdasarkan misi pembangunan 2016-2021.



**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

**“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal		Target				
				Realisasi 2015	Target 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1.1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan	1.1.1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	• Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	35,89	36,35	44	52	60	65	70
			• Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	57,87	58,87	60,87	62,87	64,87	66,87	68,87
			• Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	64,51	67	71,5	76	80,5	85	90
			• Persentase RT berakses sanitasi	58,58	60	63,58	68,58	73,58	78,58	83,77
			• Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	9,3	22,10	37,68	53,26	68,84	84,42	100
		1.1.2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	• Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)	85,68	85,68	84,68	83,68	82,68	81,68	80,68
			• Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)	9,15	9,15	8,65	8,15	7,65	7,15	6,65
			• Persentase Penanganan Sampah	5	5	10	25	25	25	25



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal		Target				
				Realisasi 2015	Target 2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan	2.1. Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat	2.1.1. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	Persentase capaian zakat infak dan sodakoh (%)	56,11	59,71	61,73	67,34	83,75	92,96	100
		2.1.2. Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS (%)	15	25	24,87	23,87	22,87	21,87	20,87
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	3.1. Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	Indeks pendidikan	0,5463	0,5734	0,5896	0,6058	0,6220	0,6383	0,6545
	3.2. Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks kesehatan	0,7582	0,759	0,7604	0,7619	0,7634	0,7648	0,7663
	3.3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	3.3.1. Menguatnya ekonomi daerah	• Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,46	5,72	5,98	6,24	6,50	6,76	7,02
			• Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Trilyun)	1,26	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,57
			• Indeks Daya beli masyarakat	0,5859	0,5899	0,594	0,598	0,6021	0,6061	0,6102
			• Tingkat pengangguran terbuka (%)	10,06	10,04	10,02	9,99	9,97	9,95	9,93
	3.3.2. Berkurangnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	12,06	11,45	10,41	9,29	8,99	8,07	7,07	
3.4. Mengembangkan	3.4.1. Meningkatnya	• Nilai PDRB sektor	6,057	6,259	6,546	6,828	7,113	7,397	7,682	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal		Target				
				Realisasi 2015	Target 2016	2017	2018	2019	2020	2021
	sektor unggulan secara terintegrasi	ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata	Perdagangan (Rp.milyar)							
			• Nilai PDRB sektor Pariwisata (Rp.milyar)	2,584	3,100	3,241	3,381	3,522	3,663	3,804
			• Nilai PDRB sektor Pertanian (milyar)	10,723	11,559	12,084	12,610	13,135	13,660	14,186
		3.4.2. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (%)	65,7	67,2	69	70	71	72	73
		3.5. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional	3.5.1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	0	0	70,5	75	85	90
		3.5.2. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik	Opini BPK	WTP ke-1	WTP ke-2	WTP ke-3	WTP ke-4	WTP ke-5	WTP ke-6	WTP ke-7



## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan visi dan misi Kabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang sistematis melalui beberapa pendekatan perencanaan pembangunan dan melibatkan berbagai pihak. Perwujudan visi dan misi serta pencapaian target sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh cara atau upaya yang diambil/dipilih oleh pemerintah daerah.

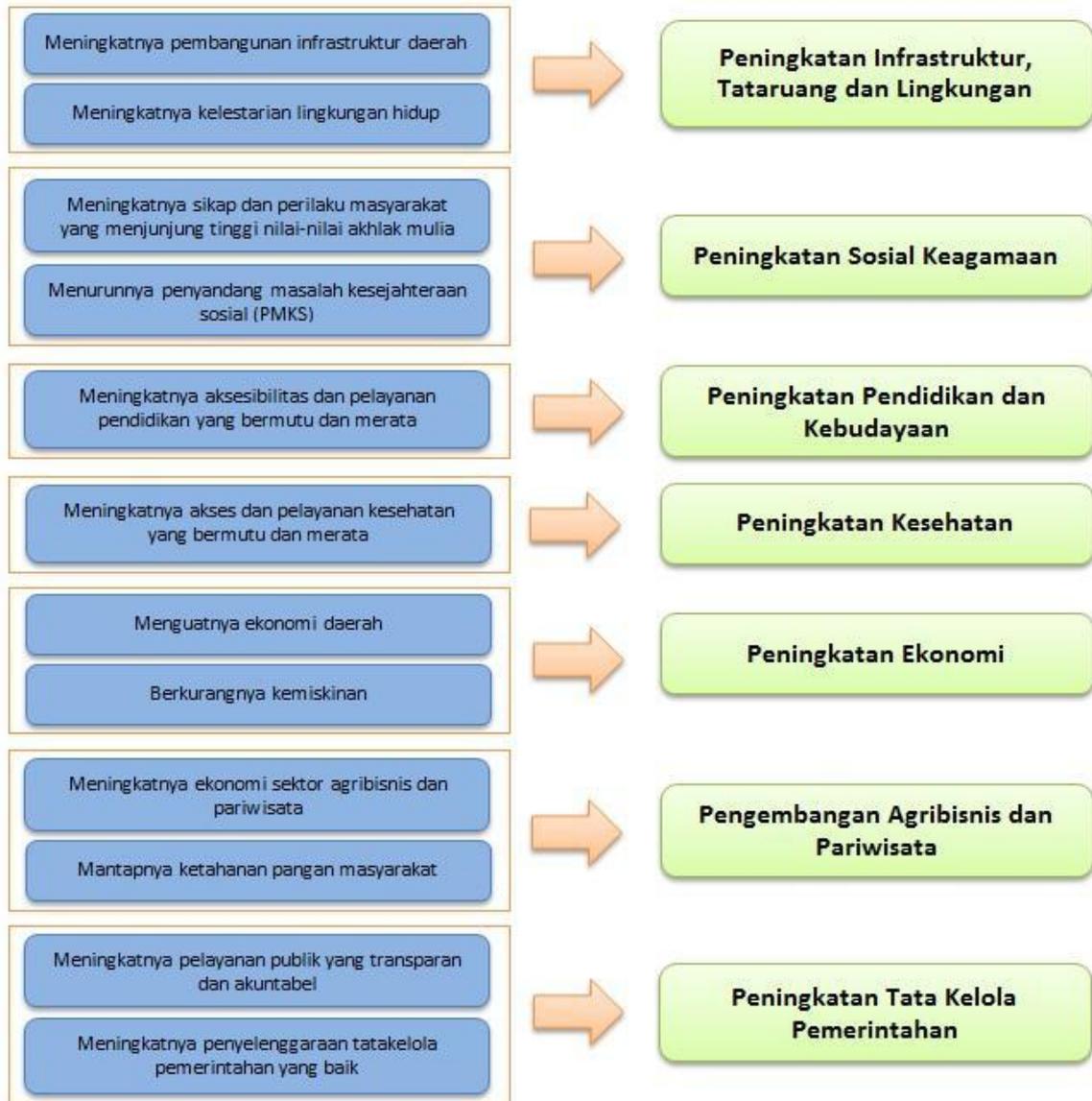
Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati pada waktu kampanye disebut **SAPTA CITA**. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran misi yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ekonomi
3. Peningkatan Sosial Keagamaan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peningkatan Kesehatan
7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

Adapun keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 6.1. Program prioritas Kepala Daerah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun

masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2016-2021. Prioritas ini memberikan titik berat atau fokus pembangunan Kabupaten Cianjur.



**Gambar 6.1**

### **Keterkaitan Sasaran dengan Program Prioritas (Sapta Cita)**

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah Metode SWOT. Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis yang merupakan asumsi-asumsi hasil



analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman/Tantangan Kabupaten Cianjur pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Faktor Internal dan Eksternal Kabupaten Cianjur**

Internal	Eksternal
<p><b>(+) Kekuatan (Strengths):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabupaten Cianjur memiliki letak geografis strategis yaitu diantara ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat</li><li>2. Cianjur merupakan jalur alternative DKI Jakarta dan Banten dengan Jawa Barat</li><li>3. Sumber daya alam yang dimiliki potensinya cukup besar</li><li>4. Tingkat Angkatan Kerja Angkatan kerja dengan jumlah cukup besar dapat memberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah</li><li>5. Sektor Pertanian cukup besar kontribusinya kepada PDRB</li><li>6. Cianjur sejak lama terkenal sebagai lumbung padi</li><li>7. Suhu dan tanah yang sangat cocok untuk pertanian</li><li>8. Memiliki Potensi Pariwisata</li><li>9. Cianjur merupakan dataran tinggi yang merupakan wilayah penyanggah air bagi wilayah DKI Jakarta.</li><li>10. Cianjur memiliki wilayah yang luas sehingga memiliki peluang yang besar untuk pengembangan berbagai usaha</li><li>11. Masyarakat Cianjur merupakan masyarakat yang terbuka bagi budaya lain</li></ol>	<p><b>(+) Peluang (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya UU 23/2004 ttg Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan pemerintahan di daerah</li><li>2. Adanya kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memberikan arah bagi pengembangan kabupaten/kota di wilayahnya.</li><li>3. Cianjur menjadi salah satu destinasi utama masyarakat Timur Tengah</li><li>4. Cianjur merupakan daerah penyanggah bagi Jabodetabek</li><li>5. Adanya kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan</li></ol>
<p><b>(-) Kelemahan (Weaknesses):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akses thd pelayanan pendidikan yg bermutu masih rendah</li><li>2. Budaya baca masyarakat masih rendah</li><li>3. Pengembangan dan penerapan IPTEK di masyarakat masih rendah</li><li>4. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah</li><li>5. Perlindungan sosial bagi PMKS belum optimal</li><li>6. Terdapat kasus eksploitasi pada anak</li></ol>	<p><b>(-) Ancaman/Tantangan(Threats):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam daerah rawan bencana</li><li>2. Perubahan iklim global pada seluruh aspek kehidupan masyarakat</li><li>3. Penerapan globalisasi (perdagangan bebas) termasuk MEA</li><li>4. Peningkatan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya</li></ol>



Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"><li>7. Bidang kepemudaan dan olahraga belum berkembang</li><li>8. Upaya pelestarian Budaya Lokal belum optimal</li><li>9. Budaya kerja aparatur pemerintah belum optimal</li><li>10. Produktivitas usaha pertanian dan kehutanan belum optimal</li><li>11. Daya saing produk lokal Cianjur masih rendah</li><li>12. Infrastruktur wilayah belum optimal</li><li>13. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi</li><li>14. Sarana dan prasarana pembangunan berbagai bidang belum merata</li><li>15. Pertumbuhan kewirausahaan masyarakat masih rendah</li><li>16. Pembangunan sesuai dengan RTRW masih rendah</li><li>17. Pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat belum optimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>parahyangan</li><li>5. Adanya kompetisi yang sehat antardaerah untuk semakin maju dan semakin baik dalam menerapkan pemerintahan yang baik</li></ul>

Tabel diatas selanjutnya diolah menjadi matriks SWOT untuk menghasilkan alternative pilihan strategi pembangunan Kabupaten Cianjur, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

Strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Teknis penetapan strategi dan arah kebijakan didasarkan pada sasaran dan prioritas KDH yang akan dicapai sekaligus menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3.



Tabel 6.2

Matriks SWOT untuk Menentukan Alternatif Strategi

<p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya UU 23/2004 ttg Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan pemerintahan di daerah</li> <li>Adanya kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memberikan arah bagi pengembangan kabupaten/kota di wilayahnya.</li> <li>Cianjur menjadi salah satu destinasi utama masyarakat Timur Tengah</li> <li>Cianjur merupakan daerah penyangga bagi Jabodetabekpunjur</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN /TANTANGAN (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam daerah rawan bencana</li> <li>Perubahan iklim global pada seluruh aspek kehidupan masyarakat</li> <li>Penerapan globalisasi (perdagangan bebas) termasuk MEA</li> <li>Peningkatan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya parahyangan</li> <li>Adanya kompetisi yang sehat antardaerah untuk semakin maju dan semakin baik dalam menerapkan pemerintahan yang baik</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Cianjur memiliki letak geografis strategis yaitu diantara ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat</li> <li>Cianjur merupakan jalur alternative DKI Jakarta dan Banten dengan Jawa Barat</li> <li>Sumber daya alam yang dimiliki potensinya cukup besar</li> <li>Tingkat Angkatan Kerja Angkatan kerja dengan jumlah cukup besar dapat memberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah</li> <li>Sektor Pertanian cukup besar kontribusinya kepada PDRB</li> <li>Cianjur sejak lama terkenal sebagai lumbung</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah</li> <li>Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan profesional</li> </ol>



<p>padi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Suhu dan tanah yang sangat cocok untuk pertanian</li> <li>8. Memiliki Potensi Pariwisata</li> <li>9. Cianjur merupakan dataran tinggi yang merupakan wilayah penyanggah air bagi wilayah DKI Jakarta.</li> <li>10. Cianjur memiliki wilayah yang luas sehingga memiliki peluang yang besar untuk pengembangan berbagai usaha</li> <li>11. Masyarakat Cianjur merupakan masyarakat yang terbuka bagi budaya lain</li> </ol>		
<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses thd pelayanan pendidikan yg bermutu masih rendah</li> <li>2. Budaya baca masyarakat masih rendah</li> <li>3. Pengembangan dan penerapan IPTEK di masyarakat masih rendah</li> <li>4. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah</li> <li>5. Perlindungan sosial bagi PMKS belum optimal</li> <li>6. Terdapat kasus eksploitasi pada anak</li> <li>7. Bidang kepemudaan dan olahraga belum berkembang</li> <li>8. Upaya pelestarian Budaya Lokal belum optimal</li> <li>9. Budaya kerja aparatur pemerintah belum optimal</li> <li>10. Produktivitas usaha pertanian dan kehutanan belum optimal</li> <li>11. Daya saing produk local Cianjur masih rendah</li> <li>12. Infrastruktur wilayah belum optimal</li> <li>13. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata</li> <li>2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata</li> <li>3. Mempercepat penanggulangan kemiskinan</li> <li>4. Menerapkan reformasi birokrasi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama umat manusia</li> <li>2. Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk local</li> <li>3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ol>



<p>14. Sarana dan prasarana pembangunan berbagai bidang belum merata</p> <p>15. Pertumbuhan kewirausahaan masyarakat masih rendah</p> <p>16. Pembangunan sesuai dengan RTRW masih rendah</p> <p>17. Pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat belum optimal</p>		
---	--	--



**Tabel 6.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Cianjur 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun
<b>Misi 1: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan</b>				
1.1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan	1.1.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	1. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis	2017-2021
			2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	2017-2021
			3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi melalui pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif	2017-2021
			4. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih/air minum	2017-2021
			5. Peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan	2017-2021
			6. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman	2017-2019
	1.1.2 Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan	1. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran	2017-2021
			2. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan	2017-2021
			3. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah	2017-2021
			4. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	2017-2021
<b>Misi 2: Meningkatkan pembangunan keagamaan</b>				
Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat	1. Meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama umat manusia	1. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa	2017-2019



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun
			2. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	2017-2019
			3. Pengembangan gerakan magrib mengaji, shalat subuh dan ashar berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al - quran	2017-2021
	2. Menurunnya PMKS		Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS serta penanganan gangguan trantibummas	2017-2020
<b>Misi 3: Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi</b>				
2.1. Percepatan pembangunan pendidikan masyarakat bagi	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta kepemudaan, olah raga dan kebudayaan	1. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	2017-2020
			2. Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu	2017-2020
			3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru	2017-2020
			4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya	2017-2020
			5. Pembinaan kepemudaan dan olahraga	2017-2020
2.2. Percepatan pembangunan kesehatan masyarakat bagi	Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	2017-2021
			2. Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat	2017-2021
			3. Peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat	2017-2021
			4. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	2017-2021
		Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2018-2021
2.3. Mewujudkan	2.3.1. Menguatnya ekonomi	a. Meningkatkan daya	1. Pengembangan potensi pertanian,	2017-2020



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun
kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	daerah	saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal	Perikanan kelautan dan pesisir	
			2. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan	2017-2020
			3. Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal	2017-2020
			4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif	2018-2020
			5. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)	2017-2020
			6. Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM	2018-2019
			7. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja	2017-2020
			8. Peningkatan kesempatan kerja	2017-2020
		2.3.2. Berkurangnya kemiskinan	b. Mempercepat penanggulangan kemiskinan	1. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”
			2. Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan	2017-2020
2.4. Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi	2.4.1. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata	Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan profesional	1. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usahadan jaringan pemasaran	2017-2021
			2. Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan	2017-2021
			3. Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen	2017-2021
			4. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah	2017-2021
			5. Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata	2017-2021
		2.4.2. Mantapnya ketahanan	Meningkatkan ketahanan	Peningkatan produksi, keanekaragaman dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun
	pangan masyarakat	pangan daerah yang berkelanjutan	keamanan pangan daerah	
2.5. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional	2.5.1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau	2017-2020
	2.5.2. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik		1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa	2017-2020
			2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	2018-2020
			3. Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2018-2020



Arah kebijakan yang disajikan pada tabel diatas memberikan gambaran prioritas pembangunan setiap tahun. Arah kebijakan pembangunan setiap tahun dapat disimpulkan dan menjadi tema pembangunan. Tema pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 6.2. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan diharapkan akan menuju perwujudan Cianjur yang maju dan agamis.



Gambar 6.2.

Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021



## **BAB VII**      **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indicator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah perumusan program pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah merupakan program kepala daerah terpilih dan secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan.

Program pembangunan daerah yang di pilih diarahkan untuk menjawab permasalahan, isu strategis dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penentuan program tidak terlepas dari program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye. Program-program tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan visi dan misi.

Program prioritas bupati perlu dijabarkan secara jelas baik ke dalam bentuk program pembangunan daerah maupun dalam bentuk non program. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program prioritas bupati telah terkomodir di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-



2021. Berikut ini disajikan penjabaran program prioritas Bupati.

**Tabel 7.1**  
**Janji Bupati/Kepala Daerah**

No.	Janji Bupati/Kepala Daerah	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>I. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup</b>			
1.1.	Pembangunan jalan beton 100 milyar/tahun	1. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2.	Revitalisasi irigasi dan jembatan	1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3	Pembangunan Cianjur Sport Center	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>II. Peningkatan Ekonomi</b>			
2.1	Membangun daya saing investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2	Membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3	Pemberdayaan ekonomi, koperasi dan KUKM	1. Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.4	Insentif rakyat miskin 100 ribu/KK	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2.5	Revitalisasi pasar tradisional	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdagangan, dan Pembinaan PKL	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
<b>III. Peningkatan Sosial Keagamaan</b>			
3.1	Mencetak 1.000 penghafal (hafidz) Al-Quran	Program Penunjang Kegiatan Keagamaan	Sekretariat Daerah



No.	Janji Bupati/Kepala Daerah	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.2	Memberikan bantuan fisik kepada 1.000 Madrasah Diniyah Takmiliah dan pendidikan Al-Quran	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3	Memberikan bantuan Rp. 10 Juta untuk masjid Jami Desa	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.4	Pemberdayaan pondok pesantren	1. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 2. Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.5	Pemberdayaan ikatan remaja masjid (IRM)	1. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 2. Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.6	Gerakan penyuluh Insan Rabbani Mandiri	1. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 2. Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan</b>		
4.1	Meningkatkan Program Bantuan RT menjadi 12,5 Juta/Tahun	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2	Meningkatkan Alokasi dana Desa (ADD)	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4.3	Peningkatan etika dan etos kerja birokrasi	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua Perangkat Daerah
4.4	Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	1. Bappeda 2. Sekretariat Daerah
4.5	E-government	Program Kehumasan dan Keprotokolan	Sekretariat Daerah
4.6	Layanan internet gratis	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4.7	Fasilitasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah kosong dan lahan terlantar	Program Administrasi Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
<b>V.</b>	<b>Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan</b>		
5.1	Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Cianjur	Tidak ada program spesifik untuk ini sebab merupakan kewenangan pemerintah pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Janji Bupati/Kepala Daerah	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.2	Gerakan sayang guru	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.3	Pendidikan gratis Paket B dan C	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.4	Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.5	Pembangunan gedung budaya dan optimalisasi 3 pilar budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.6	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>VI. Peningkatan Kesehatan</b>			
6.1	100.000 jaminan kesehatan untuk keluarga tidak mampu	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
6.2	Menyediakan 1 ambulance/desa	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Dinas Kesehatan
6.3	Menambah Rumah sakit dan meningkatkan pelayanan puskesmas	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Dinas Kesehatan
<b>VII. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata</b>			
7.1	Sentralisasi gedung pemuda	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7.2	Pemberdayaan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7.3	Pencetakan sawah baru	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
7.4	Pengembangan tempat tujuan wisata Cianjur	Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif yaitu menyajikan kebijakan umum yang memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di bab sebelumnya, disertai dengan program pembangunan daerah. Rumusan kebijakan umum dan



program pembangunan daerah Kabupaten Cianjur disajikan pada Tabel 7.2.



Tabel 7.2  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah  
Kabupaten Cianjur 2016-2021

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	1 Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis	Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)	2,92	3,01	31,75	Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik	65,33%	65,33%	72,00%	Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang jalan lingkungan / jalan Setapak (km)	1.848,04	15	250	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Jembatan Gantung dan Plat Beton (unit)	86	19	85	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)	32,97	33,34	65,78	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan (%)	-	-	4,00	Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase data dan informasi sumber daya air yang dimuktahirkan (%)	19,35	38,7	100	Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase data/informasi jalan dan jembatan yang dimuktahirkan (%)	44,03	44,03	50,31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Cakupan pelayanan angkutan jalan (%)	87,6	88	92	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
				Tingkat kinerja lalu lintas (V/C ratio)	0,6	0,6	0,6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (%)	34,04	36,15	47,25	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	59,9	61	66	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase kendaraan umum laik jalan di Kab. Cianjur (%)	93	94	99	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2 Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	Jumlah gedung pemerintah yang representatif (unit)	48	9	72	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Cakupan saran dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	100	100	100	Program Administrasi Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi (%)	47	48,8	64,7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Cakupan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi (%)	65	8	9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			3 Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)	43	45	35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Jumlah situ/rawa/embung yang ditangani	0	1	5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Tingkat penanganan pengamanan lahan kritis dan pengurangan dampak bencana alam (%)	0	0	50	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			4 Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)	57,87	58,87	69	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			5 Peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan	Panjang drainase jalan di perkotaan berfungsi dengan baik (km)	49	49	54	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih/Air Minum (%)	64,51	67,00	90,00	Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase RT berakses sanitasi (%)	58,58	60	83,77	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			6 Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman	Cakupan ketersediaan Rumah Layak huni (%)	100	100	100	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	9,3	22,1	100	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan	1 Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran	Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)	85,68	85,68	80,68	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)	9,15	9,15	6,65	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2 Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan	Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi (%)	100	100	100	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan (%)	100	100	100	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Rumah tangga yang mendapat akses listrik perdesaan (%)	82,74	-	100	Program Pengembangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			3 Penataan ruang dan infrastruktur wilayah	Persentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun (%)	65,62	3,12	100	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	85	90	90	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Penanganan Sampah (%)	5	5	25	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)	6	6	4	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan (%)	2,5	5	12	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun (%)	30	0	100	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan (%)	18,75	18,75	100	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase RTH Taman di Wilayah Perkotaan (%)	0,82	0,82	0,95	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah perkotaan (%)	33	32	25	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Lingkungan Hidup	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			4 Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	Cakupan Pendidikan Pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah (%)	9,09	9,09	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)	1,32	2,2	30,84	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Cakupan Penanggulangan Bencana Alam (%)	80	80	98	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	5	15	50	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM	36,65	71,25	71,25	Program Penanggulangan Kebakaran	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
3	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama umat manusia	1 Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa	persentase aparatur dan kelompok organisasi masyarakat yg diberi pemahaman wawasan kebangsaan	100	100	100	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			2 Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	Jumlah sarana dan prasarana keagamaan (unit)	-	-	360	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			3 Pengembangan gerakan magrib mengaji dan shalat subuh berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran dan pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan al-quran	Persentase hibah/bansos bidang keagamaan yang tepat sasaran	100	100	100	Program Penunjang Kegiatan Keagamaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Nilai capaian zakat infak sodaqoh	56,11	59,71	100	Program Penunjang Kegiatan Keagamaan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4	Menurunnya PMKS		Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS serta penanganan gangguan trantibummas	Persentase PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial	0	0	5	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sosial	DINAS SOSIAL
				Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina (%)	33,33	33,33	58,33	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINAS SOSIAL
				Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	19,92	21	27,5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINAS SOSIAL



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (kasus)	70	80	550	Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,34	0,34	0,34	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
5	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta kepemudaan, olah raga dan kebudayaan	1 Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan	Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)	100	100	100	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)	11.650	31.500	247.803	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)	98,98	99,61	100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2 Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Manajemen berbasis sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku (%)	100	100	100	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			3 Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru	Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	84,52	85,17	90,02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya	Jumlah cagar budaya yang terlestarikan	38	38	111	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah grup kesenian	872	878	903	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	6	9	75	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase pelaku seni yang diberi dukungan	100	100	100	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Cakupan pelayanan perpustakaan	80,56%	81,94%	88,89%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			5 Pembinaan kepemudaan dan olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri (%)	3	4	60	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase organisasi ke olahragan yang aktif (%)	7	7	14	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
				cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik (%)	2	2	100	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan obat di RSUD, puskesmas dan jaringannya (%)	100	100	100	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN, RSUD CIANJUR, RSUD CIMACAN, RSUD PAGELARAN
				Persentase pemeriksaan obat, makanan & minuman serta Kosmetik (%)	0	0	100	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Jumlah puskesmas/pustu yang berfungsi dengan baik (unit)	0	0	15	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	57	60	85	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Kesehatan	RSUD Sayang
				Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	25	30	80	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Kesehatan	RSUD CIMACAN
				Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	0	20	45	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan	Kesehatan	RSUD Pagelaran
			2 Peningkatan Sikap Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat	Penurunan jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran	185	175	100	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Penurunan Jumlah Kematian Ibu per 1000 kelahiran	49	45	20	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Cakupan PHBS rumah tangga (%)	41,7	60	68	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Persentase penyakit yang ditangani (%)	100	100	100	Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				persentase rumah tangga yang menggunakan akses jamban sehat (%)	75	76	87,5	Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			3 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	persentase Sarana dan SDK yang terstandar (%)	0	0	100	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Pasien terlayani (%)	100	100	100	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	DINAS KESEHATAN



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	0	15	40	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	RSUD PAGELARAN
				Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	86,41	87	91	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	RSUD Sayang
				Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	90	90	95	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	RSUD CIMACAN
			4 Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB	66,60	66,60	69,80	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				terbinanya institusi masyarakat pedesaan	2.846	2.846	2.870	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (%)	100	100	100	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	Menguatnya ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal	1 Pengembangan potensi pertanian, Perikanan, kelautan dan pesisir	Persentase kelompok nelayan yang dibina (%)	19,763	20	100	Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
			2 Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan	Persentase pemerintahan desa dan lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan SDA, TTG, dan ekonomi pedesaan (%)	84	100	100	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			3 Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal	Persentase kelompok pembudidaya yang dibina (%)	13,89	20	100	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Kelautan dan perikanan	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			4 Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Jumlah Peningkatan angka investasi	9,4	9,4	10,4	Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan	Penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			5 Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)	Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh (%)	0,48	0,48	1,19	Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Persentase koperasi aktif (%)	32,94	33,29	36,75	Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			6 Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM	Persentase kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	0	0	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
			7 Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja	persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani (%)	100	100	100	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			8 Peningkatan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	15	25	38,5	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8	Berkurangnya kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan	1 Pengentasan kemiskinan melalui "insentif rakyat miskin"	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
			2 Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	15	10	25	Program Pengembangan Transmigrasi	Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata	Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan profesional	1 Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran	Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis potensi lokal (%)	1	1	5	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis potensi lokal (%)	1	1	5	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman perkebunan berbasis potensi lokal (%)	1	2	18	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Jumlah penyuluh bersertifikat (orang)	2	2	10	Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Cakupan pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
				Produksi Hasil Peternakan (ton)	71,00	74,55	432,545	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
			3 Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan	Jumlah SDM IKM bersertifikat (%)	100	100	100	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Persentase pelaku usaha IKM yang dibina (%)	26,2	1,2	44	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			4 Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen	Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi (%)	40	6,6	100	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL	Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Persentase alat UTPP (ukur, takar timbang dan perlengkapannya) yang di tera (%)	46	46	64,5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL	Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			5 Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	23	0	96	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL	Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Persentase sentra industri yang dibina (%)	100	0	100	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			6 Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (orang)	4.484.056	4.932.957	7.878.918	Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan	Pariwisata	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
10	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah	Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup (ton)	-	-	256.121	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pangan	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Indeks pertanaman (IP)	200	200	230	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pangan	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)	-	-	6.000	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)	-	-	750	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
				Luas pengembangan area produktif tanaman Perkebunan (ha)	57	63	1040	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
11	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	KK = 93,84%, KTP = 83,31%	KK = 85%, KTP = 87%,	KK = 100%, KTP = 100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) yang diterbitkan	Akta Lahir= 56,76%, Akta Kematian =22%	Akta Lahir= 25%, Akta Kematian = 25%	Akta Lahir = 75%, Akta Kematian = 70%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase penyesuaian data penduduk anatar data disdukcapil dengan data Pusat	0	27,27 %	0%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh Intansi dan Perangkat Daerah	0	0	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Ketepatan waktu penyampaian LKPJ	31-Mar	31-Mar	31-Mar	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Ketepatan waktu penyampaian LPPD	31-Mar	31-Mar	31-Mar	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Ketepatan waktu penyampaian LKIJ	31-Mar	31-Mar	31-Mar	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase BUMD yang berkinerja baik	100	100	100	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda	31-Mar	31-Mar	31-Mar	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
12	Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik		1 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa	Persentase desa yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa (%)	0	0	100	Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100	100	100	Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Kelengkapan data yang terikini (%)	100	100	100	Program Penyediaan Data dan Statistik	Statistik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan	31 des	31 des	31 des	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase tertib administrasi aset (%)	100	100	100	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah (Rp.)	123.839.856.050	134.760.440.452	860.241.914.511	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu	65,00%	100,00%	100,00%	Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
				Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan nilai baik	100,00%	100,00%	100,00%	Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
				Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan	100%	100,00%	100,00%	Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
				prosentase OPD yang menerapkan SPI (%)	10	15	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH
				Level Kapabilitas APIP (level)	1	2	3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi	21	18	75	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Pemenuhan Data Statistik yang terkini	100	100	100	Program Penyediaan Data dan Statistik	Statistik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah Dokumen / Arsip yang terpelihara	50	100	500	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Kearsipan	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
				Distribusi Informasi dan Komunikasi (%)	47	48,8		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memahami IT (%)	14,4	22	45	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Persentase inovasi unggulan daerah yang dihasilkan	-	-	100	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
			2 Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	100,00	100,00	100,00	program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan	kecamatan	KECAMATAN
				Terpenuhinya pembangunan dan pemberdayaan lingkup RT se- Kecamatan Cianjur	100,00	100,00	100,00	program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan	kecamatan	KECAMATAN
				Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir			
					2015	2016	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan	100	100	100	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100	100	100	Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase MOU kerja sama daerah yang ditandatangani	100	100	100	Program Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kecamatan berkinerja baik	100	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Setda yang representatif	100	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan	100	100	100	Program Kehumasan dan Keprotokolan	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang /jasa yang sesuai dengan peraturan	100	100	100	Program Layanan Pengadaan Barang/jasa	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
			3 Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah media informasi (jenis)	6	6	6	Program Kehumasan & Keprotokolan	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi (%)	100	100	100	Program Persandian	Persandian	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				persentase Aparatur dan kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai Pendidikan Politik	100	100	100	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Persentase hasil rapat lintas sektoral yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



## **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini memuat hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan program pembangunan Kabupaten Cianjur selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan dari masing-masing perangkat daerah. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Selain itu, prioritas pembangunan juga sangat mempengaruhi. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Tabel 8.1 memuat seluruh rencana program prioritas Kabupaten Cianjur baik yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi maupun mendukung secara tidak langsung. Perogram ini dilengkapi dengan indicator kinerja sehingga pencapaian kinerja setiap program dapat terukur dan dikendalikan serta dievaluasi secara periodik.



Tabel 8.1  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	URUSAN WAJIB																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1	PENDIDIKAN																
		1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%)	100	100	100	4.850.000.000	100	5.625.000.000	100	6.375.000.000	100	7.150.000.000	100	7.900.000.000	100	31.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan Paket C (orang)	11.650	31.500	35.767	7.845.000.000	40.034	8.725.000.000	48.684	9.475.000.000	57.334	11.090.000.000	65.984	11.310.000.000	279.303	48.445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%)	98,98	99,61	99,74	91.495.429.962	99,87	99.377.729.962	99,94	111.734.929.962	99,97	119.399.129.962	100	133.640.429.962	100	555.647.649.810,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3 Program Manajemen Pelayan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Keependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1 dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	84,52	85,17	86,14	9.998.904.100	87,11	9.648.913.100	88,08	10.133.913.100	89,05	14.171.913.100	90,02	10.608.913.100	90,02	54.562.556.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Manajemen berbasis sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku (%)	100	100	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	16.425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	KESEHATAN																
		1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase pemenuhan obat di RSUD, puskesmas dan jaringannya (%)	100	100	100	5.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	65.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD SAYANG, RSUD CIMACAN, RSUD PAGELARAN
			Persentase pemeriksaan obat, makanan & minuman serta Kosmetik (%)	0	0	35	111.250.000	50	450.000.000	65	500.000.000	80	550.000.000	100	600.000.000	100	2.211.250.000,00	DINAS KESEHATAN
		2 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien terlayani (%)	100	100	100	69.554.829.000	100	110.050.427.483	100	113.900.114.231	100	119.824.769.654	100	125.831.890.619	100	539.162.030.987,00	DINAS KESEHATAN
			Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	86,41	87	87	178.064.786.337	88	183.406.729.927	89	188.908.931.825	90	194.576.199.780	91	200.413.485.773	91	945.370.133.642,11	RSUD Sayang
			Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	90	90	90	24.000.000.000	90	25.500.000.000	92,5%	28.000.000.000	92,5%	33.000.000.000	95	41.000.000.000	95	151.500.000.000,00	RSUD CIMACAN
			Kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)	0	15	20	2.000.000.000	25	4.000.000.000	30	6.000.000.000	35	8.000.000.000	40	10.000.000.000	40	30.000.000.000,00	RSUD Pagelaran
			Penurunan Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran	185	175	160	347.975.000	145	1.000.000.000	135	1.000.000.000	125	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.347.975.000,00	DINAS KESEHATAN
			Penurunan Jumlah Kematian Ibu per 1000 kelahiran	49	45	40		35		30		25		20		20		DINAS KESEHATAN
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS rumah tangga (%)	47,1	57	60	1.550.000.000	60	1.550.000.000	63	1.700.000.000	65	1.850.000.000	68	2.000.000.000	68	7.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		4 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Linekunean	Persentase penyakit yang ditangani (%)	100	100	100	277.253.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	5.277.253.000,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase rumah tangga yang menggunakan akses jamban sehat (%)	75	76	77,5	109.490.000	80	550.000.000	82,5	600.000.000	85	650.000.000	87,5	700.000.000	87,5	2.609.490.000,00	DINAS KESEHATAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rukaihan	Jumlah puskesmas/pustu yang berfungsi dengan baik	0	0	3	6.000.000.000	6	13.000.000.000	9	19.000.000.000	12	25.000.000.000	15	31.000.000.000	15	94.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	57	60	65	61.000.000.000	70	78.000.000.000	75	90.000.000.000	80	100.000.000.000	85	115.000.000.000	85	444.000.000.000,00	RSUD Sayang
		Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	25	30	40	54.050.000.000	50	67.275.000.000	60	47.995.000.000	70	52.500.000.000	80	37.500.000.000	80	259.320.000.000,00	RSUD CIMACAN
		Cakupan sarana prasarana rumah sakit (%)	0	20	25	15.000.000.000	30	15.000.000.000	35	15.000.000.000	40	15.000.000.000	45	15.000.000.000	45	75.000.000.000,00	RSUD Pagelaran
6	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	persentase Sarana dan SDK yang terstandar (%)	0	0	20	65.510.000	40	820.000.000	60	900.000.000	80	1.000.000.000	100	1.070.000.000	100	3.855.510.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD SAYANG, RSUD CIMACAN, RSUD PAGELARAN
1 1 3	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																
1	Program pembangunan jalan, jembatan dan trotoar	Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%)	2,92%	3,01%	6,76%	269.950.000.000	6,76%	291.900.000.000	6,76%	311.612.000.000	4,23%	205.400.000.000	4,23%	222.000.000.000	31,75%	1.300.862.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik	65,33%	65,33%	66,67%	2.500.000.000	68,00%	2.600.000.000	69,33%	2.650.000.000	70,67%	2.800.000.000	72,00%	2.900.000.000	72,00%	13.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)	32,97%	33,34%	37,24%	153.437.000.000	45,24%	249.746.000.000	53,24%	344.516.000.000	60,78%	298.445.000.000	65,78%	326.144.000.000	65,78%	1.372.288.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)	43	45	35	11.400.000.000	35	11.400.000.000	35	11.400.000.000	35	11.400.000.000	35	11.400.000.000	35	57.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah situ/rawa/embung yang ditangani	0	1	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	5	13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Tingkat penanganan pengamanan lahan kritis dan pengurangan dampak bencana alam (%)	0	0	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang	Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan (%)	0	0	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	0	-	0	-	4	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase data dan informasi sumber daya air yang dimuktahirkan (%)	19,35	38,7	51,61	1.000.000.000	64,52	1.402.044.000	80,65	2.132.761.000	90,32	1.737.858.000	100	1.977.209.000	100	8.249.872.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase data/informasi jalan dan jembatan yang dimuktahirkan (%)	44,03	44,03	50,31	700.000.000	50,31	700.000.000	50,31	560.000.000	50,31	560.000.000	50,31	560.000.000	50,31	3.080.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun (%)	65,62	31,2	71,87	4.340.000.000	78,12	4.140.000.000	81,25	4.140.000.000	87,05	4.140.000.000	100	4.140.000.000	100	20.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	85	90	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung pemerintah yang representatif (unit)	48	9	32	100.000.000.000	10	230.000.000.000	10	150.000.000.000	10	200.000.000.000	10	350.000.000.000	72	1.030.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah sarana dan prasarana keagamaan (unit)	-	-	72	720.000.000	72	720.000.000	72	720.000.000	72	720.000.000	72	720.000.000	360	3.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	57,87	58,87	60,87	15.000.000.000	62,87	17.000.000.000	64,87	19.000.000.000	66,87	15.000.000.000	68,87	13.000.000.000	68,87	79.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	8	Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah	64,51	67,00	71,5	41.150.000.000	76	35.250.000.000	80,6	30.350.000.000	85	30.350.000.000	90	31.350.000.000	90	168.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	4	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														
	1	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan	58,58	60	63,58	2.000.000.000	68,58	2.000.000.000	73,58	2.000.000.000	78,58	2.000.000.000	83,77	2.000.000.000	83,77	10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Cakupan ketersediaan Rumah Layak huni (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	250.000.000	0	0	0	100	2.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	9,3	22,1	37,68	15.580.000.000	53,26	15.580.000.000	68,84	15.580.000.000	84,42	15.580.000.000	100	15.580.000.000	100	77.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Panjang jalan lingkungan / jalan Setapak (km)	1.848,04	15	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	250	25.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jembatan Gantung dan Plat Beton (unit)	86	19	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	85	42.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	5	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>														
	1	Program Pemeliharaan Transtibum dan Penegakan Peraturan Daerah	70	80	90	2.873.000.000	100	3.097.400.000	110	3.332.200.000	120	3.569.000.000	130	3.807.000.000	550	16.678.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	2	Program Penanggulangan Kebakaran	36,65	71,25	71,25	1.375.000.000	71,25	1.540.000.000,00	71,25	1.724.800.000,00	71,25	1.931.776.000,00	71,25	2.163.589.120,00	71,25	8.735.165.120,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	3	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	0,34	0,34	0,34	2.873.000.000	0,34	3.097.400.000	0,34	3.332.200.000	0,34	3.569.000.000	0,34	3.807.000.000	0,34	16.678.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		persentase aparaturnya dan kelompok organisasi masyarakat yg diberi pemahaman wawasan kebangsaan (%)	100	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	1.480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		persentase Aparatur dan kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai Pendidikan Politik (%)	100	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	1.480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase hasil rapat lintas sektoral yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	1.480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	9,09	9,09	9,09	150.622.000	9,09	150.622.000	27,27	450.000.000	27,27	450.000.000	27,27	450.000.000	100	1.651.244.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan Pendidikan Pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah	1,32	2,2	2,20	190.000.000	4,41	160.000.000,00	6,61	516.000.000,00	6,61	516.000.000,00	11,01	516.054.000	30,84	1.898.054.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase daerah rawan bencana yang dibina (%)	80	80	93,7	190.000.000	94,2	160.000.000,00	96	516.000.000,00	96	516.000.000,00	98	6.708.000.000,00	98	8.090.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	5	15	20	190.000.000	24,8	160.000.000,00	30,6	518.000.000,00	30,6	518.000.000,00	50	580.160.000,00	50	1.966.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1	6	<b>SOSIAL</b>														



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0	0	1	4.000.000.000	1	5.347.000.000	1	5.722.000.000	1	6.315.000.000	1	6.465.000.000	5	27.849.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	33,33	33,33	41,66	850.100.000	41,66	875.100.000	50,00	875.100.000	50,00	725.100.000	58,33	750.100.000	58,33	4.075.500.000,00	DINAS SOSIAL
		Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	19,92	21	25,5	900.000.000	26	1.000.000.000	26,5	1.000.000.000	27	1.050.000.000	27,5	1.175.000.000	27,5	5.125.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	2	<b>TENAGA KERJA</b>															
	1	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja	15	25	32	775.700.000	36	1.425.570.000	38	750.600.000	38	750.700.000	38,5	775.700.000	38,5	4.478.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100	100	100	300.700.000	100	300.570.000	100	300.600.000	100	300.700.000	100	325.700.000	100	1.528.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	2	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>															
	1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	100%	470.000.000	100%	570.000.000	100%	670.000.000	100%	770.000.000	100%	870.000.000	100%	870.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	2	<b>PANGAN</b>															
	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	253.145	26.650.000.000	253.594	8.550.000.000	253.875	8.550.000.000	254.009	8.550.000.000	256.121	8.550.000.000	256.121	60.850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Indeks pertanaman (IP)	200	200	206	22.513.371.000	212	23.700.866.970	218	24.971.363.000	224	26.330.858.300	230	27.785.518.000	230	125.301.917.270,00	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
1	2	<b>PERTANAHAN</b>															
	1	Program Administrasi Pertanahan	100	100	100	35.000.000.000	100	35.000.000.000	100	35.000.000.000	100	60.000.000.000	100	35.000.000.000	100	200.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	2	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>															
	1	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA	85,68%	85,68%	84,68%	3.000.000.000	83,68%	3.500.000.000	82,68%	3.500.000.000	81,68%	5.000.000.000	80,68%	5.000.000.000	80,68%	20.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi	100%	100%	20%	1.325.000.000	20%	1.402.000.000	20%	1.600.000.000	20%	2.800.000.000	20%	2.800.000.000	100%	9.927.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan	100%	100%	20%	500.000.000	20%	500.000.000	20%	503.836.000	20%	1.200.000.000	20%	1.200.000.000	100%	3.903.836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)	9,15%	9,15%	8,65%	600.250.000	8,15%	600.116.000	7,65%	750.000.000	7,15%	1.000.000.000	6,65%	1.000.000.000	6,65%	3.950.366.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	5%	5%	10%	10.000.000.000	25%	10.000.000.000	25%	33.510.000.000	25%	33.510.000.000	25%	59.713.476.000	25%	146.733.476.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Penanganan Sampah	6 ha	6 ha	0,8 ha	2.500.000.000	0,8 ha	2.500.000.000	0,8 ha	12.500.000.000	0,8 ha	12.500.000.000	0,8 ha	12.500.000.000	4 ha	42.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)	25%	5%	11%	1.500.000.000	10,70%	1.500.000.000	10%	1.590.000.000	13%	1.685.400.000	12%	1.786.524.000	12%	8.061.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan	30%	0%	20%	500.000.000	40%	500.000.000	20%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	500.000.000	100%	3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun	19%	19%	19%	500.000.000	25%	500.000.000	25%	1.400.000.000	19%	1.400.000.000	13%	500.000.000	100%	4.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan															



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH Taman di Wilayah Perkotaan	0,82%	0,82%	0,90%	5.000.000.000	0,91%	6.000.000.000	0,92%	7.000.000.000	0,93%	8.000.000.000	0,95%	9.000.000.000	0,95%	35.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah perkotaan	33%	32%	30%	2.500.000.000	29%	2.500.000.000	28%	2.500.000.000	27%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	25%	12.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	2	6	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>															
	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	KK = 93,84%, KTP = 83,31%	KK = 85%, KTP = 87%	KK = 90%, KTP = 92%	3.250.000.000	KK = 92,5%, KTP = 94%	3.000.000.000	KK = 95%, KTP = 96%	2.750.000.000	KK = 97,5%, KTP = 98%	2.500.000.000	KK = 100%, KTP = 100%	2.000.000.000	KK = 100%, KTP = 100%	13.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Persentase dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) yang diterbitkan	Akta Lahir= 56,76%, Akta Kematian = 22%	Akta Lahir= 60%, Akta Kematian = 25%	Akta Lahir = 40%, Akta Kematian = 30%	2.000.000.000	Akta Lahir = 45 %, Akta Kematian = 40%	2.250.000.000	Akta Lahir = 50 %, Akta Kematian = 50%	2.500.000.000	Akta Lahir = 65 %, Akta Kematian = 60%	2.750.000.000	Akta Lahir = 75%, Akta Kematian = 70%	2.000.000.000	Akta Lahir = 75%, Akta Kematian = 70%	11.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Persentase penyesuaian data penduduk anatar data disdukcapil dengan data Pusat	0	27,27 %	15%	750.000.000	10%	750.000.000	5%	750.000.000	2,5%	750.000.000	0%	750.000.000	0%	3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh Intansi dan Perangkat Daerah	0	0	20%	250.000.000	40%	250.000.000	60%	250.000.000	80%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1	2	7	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>															
	1	Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa (%)	0	0	100	6.600.000.000	100	6.600.000.000	100	6.300.000.000	100	6.450.000.000	100	6.450.000.000	100	32.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100	100	20	900.000.000	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase pemerintahan desa dan lembaga/ kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan SDA, TTG, dan ekonomi pedesaan (%)	84	100	20	11.185.000.000	40	3.350.000.000	60	3.420.000.000	80	3.420.000.000	100	3.420.000.000	100	24.795.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	2	8	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>															
	1	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga	terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB.	66,60	66,60	66,99	575.000.000	67,80	625.000.000	68,20	700.000.000	68,50	750.000.000	69,80	800.000.000	69,80	3.450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			terbinanya institusi masyarakat pedesaan	2.846	2.846	2.857	10.950.800.000	2.857	13.777.200.000	2.860	14.277.200.000	2.865	14.977.200.000	2.870	15.477.200.000	2.870	69.459.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	2	9	<b>PERHUBUNGAN</b>															
	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase keterediaan trayek lanjutan	87,60%	88%	88,5	176.000.000	98,2	194.000.000	90,3	206.000.000	91,1	212.000.000	92	235.000.000	92%	1.023.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Tingkat kinerja lalu lintas (V/C ratio)	0,6	0,6	0,6	498.000.000	0,6	552.240.000	0,6	583.506.000	0,6	603.218.000	0,6	995.000.000	0,6	3.231.964.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	34,04%	36,15%	41,75	9.782.000.000	41,75	9.782.000.000	44,25	9.782.000.000	46,75	13.042.000.000	47,25	9.782.000.000	47,25%	52.170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	59,9%	61%	62	4.590.000.000	63	4.590.000.000	64	4.590.000.000	65	6.120.000.000	66	4.590.000.000	66%	24.480.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	3	Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum laik jalan di Kab. Cianjur (%)	93%	94%	95	760.000.000	96	840.817.000	97	890.080.000	98	919.143.000	99	1.014.883.000	99%	4.424.923.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 2 10	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi	47%	48,80%	51,50%	2.700.000.000	54,8	4.300.000.000	58,10%	4.100.000.000	61,40%	3.000.000.000	64,70%	4.000.000.000	64,70%	18.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			Distribusi Informasi dan Komunikasi	47%	48,80%	6	415.000.000	6	415.000.000	6	415.000.000	6	415.000.000	6	415.000.000	6	2.075.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memahami IT	14%	22,00%	37,2	585.000.000	38	935.000.000	40	325.000.000	42	325.000.000	45	325.000.000	45	2.495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			Cakupan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi	65%	80,00%	82	325.000.000	85	325.000.000	87	325.000.000	89	325.000.000	90	325.000.000	90	1.625.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																	
	1	Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh	0,48%	0,48%	7,14%	12.920.000.000	8,33%	12.520.000.000	9,52%	13.170.000.000	10,71%	12.670.000.000	11,90%	13.420.000.000	1,19%	64.700.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			Persentase koperasi aktif (%)	32,94%	33,29%	33,98%		34,67%		35,37%		36,06%		36,75%		36,75%		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1 2 12	<b>PENANAMAN MODAL</b>																	
	1	Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan	Jumlah Peningkatan angka investasi (%)	9,4	9,4	9,59	1.850.000.000	9,78	2.035.000.000	9,98	2.214.300.000	10,17	2.414.131.500	10,38	2.633.298.195	10,38	11.146.729.695,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 13	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>																	
	1	Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri	3	4	20	5.450.000.000	30	8.750.000.000	40	10.595.000.000	50	10.046.750.000	60	12.550.000.000	60	47.391.750.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Persentase organisasi ke olahragan yang aktif	7	7	10		11		12		13		14		14		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
			cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik	2	2	10		70		80		90		100		100		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 2 14	<b>STATISTIK</b>																	
	1	Program Penyediaan Data dan Statistik	Persentase Pemenuhan Data Statistik yang terkini	100%	100%	100%	800.000.000	100%	825.000.000	100%	830.000.000	100%	840.000.000	100%	850.000.000	100%	4.145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			Persentase Kelengkapan data yang terkini	100%	100%	100%	255.000.000	100%	285.000.000	100%	320.000.000	100%	350.000.000	100%	390.000.000	100	1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 15	<b>PERSANDIAN</b>																	
	1	Program Persandian	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.950.000.000	100 Persen	1.450.000.000	100 Persen	1.250.000.000	100 Persen	1.250.000.000	100 Persen	900.000.000	100 Persen	6.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 16	<b>KEBUDAYAAN</b>																	
	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang terlestarikan	38	38	51	830.000.000	66	700.000.000	81	730.000.000	96	700.000.000	111	750.000.000	111	3.710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah grup kesenian	872	878	883	1.100.000.000	888	1.100.000.000	893	1.100.000.000	898	1.100.000.000	903	1.100.000.000	903	5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	6	9	15 event	820.000.000	15 event	820.000.000	15 event	820.000.000	15 event	820.000.000	15 event	820.000.000	75 event	4.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase pelaku seni yang diberi dukungan	100%	100%	100%	440.000.000	100%	350.000.000	100%	440.000.000	100%	350.000.000	100%	600.000.000	100%	2.180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 17	PERPUSTAKAAN																
	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	80,56%	81,94%	83,33%	520.000.000	84,72%	635.000.000	86,11%	1.100.000.000	87,50%	700.000.000	88,89%	770.000.000	88,89%	3.725.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1 2 18	KEARSIPAN																
	1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	50 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	255.000.000	100 Berkas	5.555.000.000	100 Berkas	1.080.000.000	100 Berkas	835.000.000	100 Berkas	2.080.000.000	500 Berkas	9.805.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	URUSAN PILIHAN																
2 1	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	1	Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir	19,763	20	20	5.040.350.000	20	6.248.420.000	20	7.527.104.000	20	9.421.624.800	20	11.821.239.760	100	40.058.738.560,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	2	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	13,89	20	20	5.600.000.000	20	5.940.000.000	20	6.754.000.000	20	7.187.400.000	20	8.148.140.000	100	33.629.540.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2 2	PARIWISATA																
	1	Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan	4484506	4932957	5426252	15.000.000.000	5919548	15.000.000.000	6511503	15.000.000.000	7162653	15.000.000.000	7878918	15.000.000.000	7878918	75.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 3	PERTANIAN																
	1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan			1.200	11.302.500.000	1.200	11.516.500.000	1.200	11.943.155.000	1.200	12.900.996.500	1.200	12.441.294.800	6.000	60.104.446.300,00	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)	-	-	150		150		150		150		150	750		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)			198		198		208		218,00		228	1040		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		Luas pengembangan area produktif tanaman Perkebunan (ha)	57	63	188												
	2	Program Pengembangan Agribisnis			1	5.430.500.000	1	5.602.000.000	1	5.371.640.000	1	5.710.120.400	1	6.318.923.000	5	28.433.183.400,00	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis potensi lokal (%)	1	1	1		1		1		1		1	5		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis potensi lokal (%)	1	1	1		1		1		1		1	5		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman perkebunan berbasis potensi lokal (%)	1	2	2		4		4		4		4	18		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan	2	2	2	840.600.000	2	899.442.000	2	962.402.940	2	1.029.771.146	2	1.101.855.126	10	4.834.071.211,81	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
	4	Program Peningkatan Kesehatan Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak			100,00	3.800.000.000	100,00	5.030.000.000	100,00	5.143.000.000	100,00	6.212.300.000	100,00	4.771.280.000	100,00	24.956.580.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Cakupan pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	3.800.000.000	100,00	5.030.000.000	100,00	5.143.000.000	100,00	6.212.300.000	100,00	4.771.280.000	100,00	24.956.580.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Hasil Peternakan (ton)	71,00	74,55	78,280	4.400.000.000	82,194	4.620.000.000	86,303	5.302.000.000	90,619	5.590.200.000	95,149	6.391.220.000	432,545	26.303.420.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2 1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1	Program Pengembangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	82,74	0	82,82	1.200.000.000	82,9	1.200.000.000	82,98	1.200.000.000	83,06	1.200.000.000	83,14	1.200.000.000	83,14	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>PERDAGANGAN</b>															
	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL	40	6,6	20	37.336.500.000	20	17.175.000.000	20	6.716.500.000	0	6.621.500.000	0	3.258.000.000	100	71.107.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase alat UTTTP (ukur,takar timbang dan perlengkapannya) yang di tera	46	46	53		56		59		62		64,5		64,5		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	23	0	0		20		20		13		20		96		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>															
	1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100	100	100	4.300.000.000	100	2.950.000.000	100	2.350.000.000	100	1.725.000.000	100	2.025.000.000		13.350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase pelaku usaha IKM yang dibina	26,2	1,2	4		4		4		3		2		44		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase sentra industri yang dibina	100	0	15		23		31		15		15		100		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>															
	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	15	10	5	250.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	275.000.000	5	275.000.000	25	950.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>3</b>		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>															
	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	2.820.000.000	100%	3.215.000.000	100%	3.545.000.000	100%	3.120.000.000	100%	4.940.000.000	100	17.640.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>															
	1	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	31 des	31 des	31 des	7.410.000.000	31 des	7.670.000.000	31 des	7.930.000.000	31 des	8.190.000.000	31 des	8.430.000.000	31 des	39.630.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase tertib administrasi aset (%)	100	100	100	2.500.000.000	100	2.760.000.000	100	3.020.000.000	100	3.280.000.000	100	3.540.000.000	100	15.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	2	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	123.839.856.050	134.760.440.452	149.588.063.902	13.025.000.000	160.059.228.375	14.225.000.000	171.263.374.361	15.207.500.000	183.251.810.567	16.125.000.000	196.079.437.306	17.145.000.000	860.241.914.511	75.727.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>															
	1	Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI	65,00%	100,00%	100,00%	2.000.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00%	13.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan nilai baik	100,00%	100,00%	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.500.000.000	100,00%	2.000.000.000	100,00%	2.000.000.000	100,00%	7.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan	100%	100,00%	100,00%	350.000.000	100,00%	450.000.000	100,00%	600.000.000	100,00%	750.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	3.150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
	1	Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	2.500.000.000	100	13.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>INSPEKTORAT</b>															



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	10%	15%	20%	5.350.510.000	36%	5.773.090.000	68%	5.773.090.000	84%	5.773.090.000	100%	6.249.090.000	100%	28.918.870.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 2	356.360.000	Level 2	356.360.000	Level 3	350.000.000	Level 3	350.000.000	Level 3	350.000.000	Level 3	1.762.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3	6	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																
	1	Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	485.000.000	100	485.000.000	100	485.000.000	100	485.000.000	100	485.000.000	100	2.425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	900.000.000	100,00	900.000.000	100,00	900.000.000	100,00	900.000.000	100,00	900.000.000	100,00	4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	1.320.000.000	100,00	1.870.000.000	100,00	2.795.000.000	100,00	3.120.000.000	100,00	720.000.000	100,00	9.825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	1.000.000.000	100,00	960.000.000	100,00	970.000.000	100,00	980.000.000	100,00	990.000.000	100,00	4.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	505.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	2.505.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan	100	100	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	3	Program Penunjang Kegiatan Keagamaan	Persentase hibah/bansos bidang keagamaan yang tepat sasaran	100	100	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Nilai capaian zakat infak sodagoh	56,11	59,71	61,73	600.000.000	67,34	600.000.000	83,75	600.000.000	92,96	600.000.000	100	600.000.000	100	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ	31-Mar	31-Mar	31-Mar	350.000.000	31-Mar	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH								
			Ketepatan waktu penyampaian LPPD	31-Mar	31-Mar	31-Mar	350.000.000	31-Mar	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH								
			Ketepatan waktu penyampaian LKJ	31-Mar	31-Mar	31-Mar	550.000.000	31-Mar	2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH								
			Persentase BUMD yang berkinerja baik	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda	31-Mar	31-Mar	31-Mar	380.000.000	31-Mar	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH								
	5	Program Kerjasama Daerah	Persentase MOU kerja sama daerah yang ditandatangani	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	6	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kecamatan berkinerja baik	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Setda yang representatif	100	100	100	2.800.000.000	100	3.400.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	14.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7	Program Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase kegiatan KDH/WKD yang diublikasikan	100	100	100	833.350.000	100	833.350.000	100	833.350.000	100	833.350.000	100	833.350.000	100	4.166.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	1.135.000.000	100	1.453.000.000	100	1.545.000.000	100	1.610.000.000	100	1.675.000.000	100	7.418.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	7	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>															
	1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21	18	15	16.311.015.872	15	18.773.127.000	15	20.650.438.000	15	22.755.299.000	15	25.076.618.000	75	103.566.497.872,00	SEKRETARIAT DPRD
3	9	<b>KECAMATAN</b>															
	1	program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan	100,00	100,00	100,00	6.400.000.000	100,00	6.400.000.000	100,00	6.400.000.000	100,00	6.400.000.000	100,00	6.400.000.000	100,00	32.000.000.000,00	KECAMATAN
		Terpenuhinya pembangunan dan pemberdayaan lingkup RT se- Kecamatan Cianjur	100,00	100,00	100,00	5.137.500.000	100,00	5.137.500.000	100,00	5.137.500.000	100,00	5.137.500.000	100,00	5.037.500.000	100,00	25.587.500.000,00	KECAMATAN
		<b>NON URUSAN</b>															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	548.602.150,00	100	598.602.150	100	648.602.150	100	698.602.150	100	748.602.150	100	3.243.010.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	185.000.000,00	100	215.000.000	100	245.000.000	100	275.000.000	100	305.000.000	100	1.225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	35.197.200,00	100	45.197.200	100	55.197.200	100	65.197.200	100	75.197.200	100	275.986.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	31.622.000,00	100	41.622.000	100	51.622.000	100	61.622.000	100	71.622.000	100	258.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	12.720.164.000	100	12.770.164.000	100	12.820.164.000	100	12.870.164.000	100	12.920.164.000	100	64.100.820.000,00	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	239.600.000	100	269.600.000	100	299.600.000	100	329.600.000	100	359.600.000	100	1.498.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	19.450.000	100	29.450.000	100	39.450.000	100	49.450.000	100	59.450.000	100	197.250.000,00	DINAS KESEHATAN
		Program Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	157.198.000	100	167.198.000	100	177.198.000	100	187.198.000	100	197.198.000	100	885.990.000,00	DINAS KESEHATAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	10.064.700.000	100	10.114.700.000	100	10.164.700.000	100	10.214.700.000	100	10.264.700.000	100	50.823.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	1.169.000.000	100	1.199.000.000	100	1.229.000.000	100	1.259.000.000	100	1.289.000.000	100	6.145.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	1.135.009.000	100	1.185.009.000	100	1.235.009.000	100	1.285.009.000	100	1.335.009.000	100	6.175.045.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	354.641.000	100	384.641.000	100	414.641.000	100	444.641.000	100	474.641.000	100	2.073.205.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	18.585.000	100	28.585.000	100	38.585.000	100	48.585.000	100	58.585.000	100	192.925.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
		Program Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	15.900.000	100	25.900.000	100	35.900.000	100	45.900.000	100	55.900.000	100	179.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	2.497.157.000	100	2.547.157.000	100	2.597.157.000	100	2.647.157.000	100	2.697.157.000	100	12.985.785.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAU DAN PEMADAM KEBAKARAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	112.770.000	100	142.770.000	100	172.770.000	100	202.770.000	100	232.770.000	100	863.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai (%)	100	100	100	31.907.000	100	41.907.000	100	51.907.000	100	61.907.000	100	71.907.000	100	259.535.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangnva (%)	100	100	100	12.000.000	100	22.000.000	100	32.000.000	100	42.000.000	100	52.000.000	100	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	24.398.000	100	34.398.000	100	44.398.000	100	54.398.000	100	64.398.000	100	221.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	15.880.000	100	25.880.000	100	35.880.000	100	45.880.000	100	55.880.000	100	179.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	374.727.000	100	424.727.000	100	474.727.000	100	524.727.000	100	574.727.000	100	2.373.635.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	13.700.000	100	43.700.000	100	73.700.000	100	103.700.000	100	133.700.000	100	368.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangnva (%)	100	100	100	86.119.000	100	96.119.000	100	106.119.000	100	116.119.000	100	126.119.000	100	530.595.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	26.411.000	100	36.411.000	100	46.411.000	100	56.411.000	100	66.411.000	100	232.055.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	30.884.000	100	40.884.000	100	50.884.000	100	60.884.000	100	70.884.000	100	254.420.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	370.895.400	100	420.895.400	100	470.895.400	100	520.895.400	100	570.895.400	100	2.354.477.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	272.195.450	100	302.195.450	100	332.195.450	100	362.195.450	100	392.195.450	100	1.660.977.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	5.181.500	100	15.181.500	100	25.181.500	100	35.181.500	100	45.181.500	100	125.907.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	3.000.000	100	13.000.000	100	23.000.000	100	33.000.000	100	43.000.000	100	115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	426.357.500	100	476.357.500	100	526.357.500	100	576.357.500	100	626.357.500	100	2.631.787.500,00	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	33.053.500	100	63.053.500	100	93.053.500	100	123.053.500	100	153.053.500	100	465.267.500,00	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	32.730.000	100	42.730.000	100	52.730.000	100	62.730.000	100	72.730.000	100	263.650.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	12.144.000	100	22.144.000	100	32.144.000	100	42.144.000	100	52.144.000	100	160.720.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	448.603.000	100	498.603.000	100	548.603.000	100	598.603.000	100	648.603.000	100	2.743.015.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	17.950.000	100	47.950.000	100	77.950.000	100	107.950.000	100	137.950.000	100	389.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	27.302.000	100	37.302.000	100	47.302.000	100	57.302.000	100	67.302.000	100	236.510.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	13.260.500	100	23.260.500	100	33.260.500	100	43.260.500	100	53.260.500	100	166.302.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	3.124.863.000	100	3.174.863.000	100	3.224.863.000	100	3.274.863.000	100	3.324.863.000	100	16.124.315.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	1.771.635.000	100	1.801.635.000	100	1.831.635.000	100	1.861.635.000	100	1.891.635.000	100	9.158.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai (%)	100	100	100	63.000.000	100	73.000.000	100	83.000.000	100	93.000.000	100	103.000.000	100	415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	5.625.000	100	15.625.000	100	25.625.000	100	35.625.000	100	45.625.000	100	128.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	4.625.000	100	14.625.000	100	24.625.000	100	34.625.000	100	44.625.000	100	123.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	474.430.000	100	524.430.000	100	574.430.000	100	624.430.000	100	674.430.000	100	2.872.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	413.250.000	100	443.250.000	100	473.250.000	100	503.250.000	100	533.250.000	100	2.366.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	2.950.000	100	12.950.000	100	22.950.000	100	32.950.000	100	42.950.000	100	114.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	3.855.000	100	13.855.000	100	23.855.000	100	33.855.000	100	43.855.000	100	119.275.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	523.478.000	100	573.478.000	100	623.478.000	100	673.478.000	100	723.478.000	100	3.117.390.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	56.200.000	100	86.200.000	100	116.200.000	100	146.200.000	100	176.200.000	100	581.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	1.380.000	100	11.380.000	100	21.380.000	100	31.380.000	100	41.380.000	100	106.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	2.890.000	100	12.890.000	100	22.890.000	100	32.890.000	100	42.890.000	100	114.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	662.751.900	100	712.751.900	100	762.751.900	100	812.751.900	100	862.751.900	100	3.813.759.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	146.580.000	100	176.580.000	100	206.580.000	100	236.580.000	100	266.580.000	100	1.032.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	32.692.000	100	42.692.000	100	52.692.000	100	62.692.000	100	72.692.000	100	263.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	46.200.000	100	56.200.000	100	66.200.000	100	76.200.000	100	86.200.000	100	331.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.599.787.550	100	5.649.787.550	100	5.699.787.550	100	5.749.787.550	100	5.799.787.550	100	28.498.937.750,00	DINAS PERHUBUNGAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	278.250.000	100	308.250.000	100	338.250.000	100	368.250.000	100	398.250.000	100	1.691.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangnnya (%)	100	100	100	25.500.000	100	35.500.000	100	45.500.000	100	55.500.000	100	65.500.000	100	227.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	32.009.000	100	42.009.000	100	52.009.000	100	62.009.000	100	72.009.000	100	260.045.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	61.744.750	100	71.744.750	100	81.744.750	100	91.744.750	100	101.744.750	100	408.723.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	639.838.900	100	689.838.900	100	739.838.900	100	789.838.900	100	839.838.900	100	3.699.194.500,00	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	43.500.000	100	73.500.000	100	103.500.000	100	133.500.000	100	163.500.000	100	517.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangnnya (%)	100	100	100	68.000.000	100	78.000.000	100	88.000.000	100	98.000.000	100	108.000.000	100	440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	82.095.000	100	92.095.000	100	102.095.000	100	112.095.000	100	122.095.000	100	510.475.000,00	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	64.241.000	100	74.241.000	100	84.241.000	100	94.241.000	100	104.241.000	100	421.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	1.116.201.400	100	1.166.201.400	100	1.216.201.400	100	1.266.201.400	100	1.316.201.400	100	6.081.007.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	59.300.000	100	89.300.000	100	119.300.000	100	149.300.000	100	179.300.000	100	596.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	3.085.000	100	13.085.000	100	23.085.000	100	33.085.000	100	43.085.000	100	115.425.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	12.960.000	100	22.960.000	100	32.960.000	100	42.960.000	100	52.960.000	100	164.800.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	407.728.000	100	457.728.000	100	507.728.000	100	557.728.000	100	607.728.000	100	2.538.640.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	116.800.000	100	146.800.000	100	176.800.000	100	206.800.000	100	236.800.000	100	884.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	9.150.000	100	19.150.000	100	29.150.000	100	39.150.000	100	49.150.000	100	145.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	8.397.000	100	18.397.000	100	28.397.000	100	38.397.000	100	48.397.000	100	141.985.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	1.414.926.000	100	1.464.926.000	100	1.514.926.000	100	1.564.926.000	100	1.614.926.000	100	7.574.630.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	120.360.000	100	150.360.000	100	180.360.000	100	210.360.000	100	240.360.000	100	901.800.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangnnya (%)	100	100	100	47.250.000	100	57.250.000	100	67.250.000	100	77.250.000	100	87.250.000	100	336.250.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	28.530.000	100	38.530.000	100	48.530.000	100	58.530.000	100	68.530.000	100	242.650.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	31.235.000	100	41.235.000	100	51.235.000	100	61.235.000	100	71.235.000	100	256.175.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	708.230.000	100	758.230.000	100	808.230.000	100	858.230.000	100	908.230.000	100	4.041.150.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	130.000.000	100	160.000.000	100	190.000.000	100	220.000.000	100	250.000.000	100	950.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	13.300.000	100	23.300.000	100	33.300.000	100	43.300.000	100	53.300.000	100	166.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	29.850.000	100	39.850.000	100	49.850.000	100	59.850.000	100	69.850.000	100	249.250.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	993.380.000	100	1.043.380.000	100	1.093.380.000	100	1.143.380.000	100	1.193.380.000	100	5.466.900.000,00	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	40.290.000	100	70.290.000	100	100.290.000	100	130.290.000	100	160.290.000	100	501.450.000,00	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	37.850.000	100	47.850.000	100	57.850.000	100	67.850.000	100	77.850.000	100	289.250.000,00	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	35.400.000	100	45.400.000	100	55.400.000	100	65.400.000	100	75.400.000	100	277.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	7.874.158.000	100	7.924.158.000	100	7.974.158.000	100	8.024.158.000	100	8.074.158.000	100	39.870.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	4.345.920.000	100	4.375.920.000	100	4.405.920.000	100	4.435.920.000	100	4.465.920.000	100	22.029.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai (%)	100	100	100	44.400.000	100	54.400.000	100	64.400.000	100	74.400.000	100	84.400.000	100	322.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di bidangnya (%)	100	100	100	145.500.000	100	155.500.000	100	165.500.000	100	175.500.000	100	185.500.000	100	827.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	29.898.000	100	39.898.000	100	49.898.000	100	59.898.000	100	69.898.000	100	249.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	23.295.000	100	33.295.000	100	43.295.000	100	53.295.000	100	63.295.000	100	216.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	2.550.159.778	100	2.600.159.778	100	2.650.159.778	100	2.700.159.778	100	2.750.159.778	100	13.250.798.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	978.340.000	100	1.008.340.000	100	1.038.340.000	100	1.068.340.000	100	1.098.340.000	100	5.191.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai (%)	100	100	100	550.800.000	100	560.800.000	100	570.800.000	100	580.800.000	100	590.800.000	100	2.854.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	16.891.850	100	26.891.850	100	36.891.850	100	46.891.850	100	56.891.850	100	184.459.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	20.216.000	100	30.216.000	100	40.216.000	100	50.216.000	100	60.216.000	100	201.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	1.690.819.000	100	1.740.819.000	100	1.790.819.000	100	1.840.819.000	100	1.890.819.000	100	8.954.095.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	70.100.000	100	100.100.000	100	130.100.000	100	160.100.000	100	190.100.000	100	650.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangny (%)	100	100	100	28.890.000	100	38.890.000	100	48.890.000	100	58.890.000	100	68.890.000	100	244.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	21.485.000	100	31.485.000	100	41.485.000	100	51.485.000	100	61.485.000	100	207.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	26.880.000	100	36.880.000	100	46.880.000	100	56.880.000	100	66.880.000	100	234.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	4.800.000.000	100	4.850.000.000	100	4.900.000.000	100	4.950.000.000	100	5.000.000.000	100	24.500.000.000,00	KECAMATAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	224.000.000	100	254.000.000	100	284.000.000	100	314.000.000	100	344.000.000	100	1.420.000.000,00	KECAMATAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	200.000.000	100	900.000.000,00	KECAMATAN
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	192.000.000	100	202.000.000	100	212.000.000	100	222.000.000	100	232.000.000	100	1.060.000.000,00	KECAMATAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	806.913.000	100	856.913.000	100	906.913.000	100	956.913.000	100	1.006.913.000	100	4.534.565.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	59.498.000	100	89.498.000	100	119.498.000	100	149.498.000	100	179.498.000	100	597.490.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	7.301.100	100	17.301.100	100	27.301.100	100	37.301.100	100	47.301.100	100	136.505.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	4.839.500	100	14.839.500	100	24.839.500	100	34.839.500	100	44.839.500	100	124.197.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	474.350.000	100	524.350.000	100	574.350.000	100	624.350.000	100	674.350.000	100	2.871.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	50.000.000	100	80.000.000	100	110.000.000	100	140.000.000	100	170.000.000	100	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangny (%)	100	100	100	65.650.000	100	75.650.000	100	85.650.000	100	95.650.000	100	105.650.000	100	428.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	681.387,500	100	731.387,500	100	781.387,500	100	831.387,500	100	881.387,500	100	3.906.937.500,00	BAPPEDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	117.400.000	100	147.400.000	100	177.400.000	100	207.400.000	100	237.400.000	100	887.000.000,00	BAPPEDA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai (%)	100	100	100	4.200.000	100	14.200.000	100	24.200.000	100	34.200.000	100	44.200.000	100	121.000.000,00	BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidangny (%)	100	100	100	80.560.000	100	90.560.000	100	100.560.000	100	110.560.000	100	120.560.000	100	502.800.000,00	BAPPEDA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	46.400.000	100	56.400.000	100	66.400.000	100	76.400.000	100	86.400.000	100	332.000.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	79.190.000	100	89.190.000	100	99.190.000	100	109.190.000	100	119.190.000	100	495.950.000,00	BAPPEDA



Nomor	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
			Realisasi 2015	Target 2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.815.236.700	100	2.865.236.700	100	2.915.236.700	100	2.965.236.700	100	3.015.236.700	100	14.576.183.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	929.485.000	100	959.485.000	100	989.485.000	100	1.019.485.000	100	1.049.485.000	100	4.947.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentasi Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidang nya (%)	100	100	100	87.500.000	100	97.500.000	100	107.500.000	100	117.500.000	100	127.500.000	100	537.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	132.530.000	100	142.530.000	100	152.530.000	100	162.530.000	100	172.530.000	100	762.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	73.785.000	100	83.785.000	100	93.785.000	100	103.785.000	100	113.785.000	100	468.925.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	854.700.000	100	904.700.000	100	954.700.000	100	1.004.700.000	100	1.054.700.000	100	4.773.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	6.000.000	100	16.000.000	100	26.000.000	100	36.000.000	100	46.000.000	100	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	Program Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran (%)	100	100	100	16.025.000	100	26.025.000	100	36.025.000	100	46.025.000	100	56.025.000	100	180.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH



## **BAB IX    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Cianjur periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi untuk menyajikan kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan target yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



Tabel 9.1  
Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat  
Kabupaten Cianjur

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
<b>1.</b>	<b>Statistik</b>								
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,46	5,72	5,98	6,24	6,50	6,76	7,02	7,02
1.3.	PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.)	11,349.5667	12,528.3678	12,744.0817	12,967.8995	13,132.5527	13,304.4766	13,498.5670	13,498.5670
1.4.	PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.)	14,373.7485	15,866.6505	16,139.8430	16,423.2988	16,631.8252	16,849.5596	17,095.3669	17,095.3669
1.5.	Indeks Gini	0,276	0,271	0,267	0,263	0,258	0,254	0,250	0,250
1.6.	Angka Kemiskinan (%)	12,06	11,45	10,41	9,29	8,99	8,07	7,07	7,07
1.7.	Angka kriminalitas yang tertangani	2,93	2,98	3,03	3,08	3,14	3,20	3,26	3,26
<b>II.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>								
1.1.	Angka melek huruf (%)	98,18	98,28	98,38	98,46	98,54	98,62	98,70	98,70
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,65	6,74	6,83	6,92	7,02	7,11	7,20	7,20
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,9958	0,9960	0,9962	0,9964	0,9966	0,9968	0,9970	0,9970
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	69,18	69,25	69,33	69,40	69,47	69,55	69,62	69,62



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.3.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,10	0,09	0,085	0,082	0,080	0,076	0,070	0,070
<b>3.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>								
3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	65.15	65.16	65.18	65.19	65.21	65.22	65.24	65.24
<b>III.</b>	<b>Seni Budaya dan Olahraga</b>								
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
1.1	Jumlah grup kesenian	872	878	883	888	893	898	903	903
1.2	Jumlah gedung	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2.</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>								
2.1	Jumlah club olahraga	60	60	65	67	68	70	75	75
2.2	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	3	4	5	6	6



Tabel 9.2  
Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Layanan Umum  
Kabupaten Cianjur

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	<b>URUSAN WAJIB</b>								
1.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
1.1.1	<b>PENDIDIKAN</b>								
1	<b>SD/MI</b>								
1	Angka partisipasi sekolah	110,49	110,74	110,99	111,49	111,99	112,49	112,99	112,99
2	Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah	1:33	1:33	1:33	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
3	Rasio guru terhadap murid	1:41	1:41	1:41	1:41	1:40	1:40	1:40	1:40
4	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%)	74,96	77,47	79,97	84,98	89,99	94,99	100,00	100,00
5	Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%)	94,65	95,18	95,72	96,79	97,86	98,93	100,00	100,00
6	Angka partisipasi murni dan paket A (%)	98,96	99,06	99,16	99,36	99,56	99,76	99,96	99,96



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Angka partisipasi kasar (%)	118,90	119,10	119,30	119,70	120,10	120,50	120,90	120,90
<b>II</b>	<b>SMP/MTs</b>								
8	Angka partisipasi sekolah (%)	98,06	98,20	98,33	98,60	98,87	99,14	99,41	99,41
9	Rasio ketersediaan ruang kelas /penduduk usia sekolah	1:55	1:53,5	1:52	1:49	1:46	1:43	1:40	1:40
10	Rasio guru terhadap murid	1:59	1:57	1:55	1:51	1:47	1:43	1:40	1:40
11	Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%)	95,37	95,84	96,30	97,23	98,16	99,07	100	100
12	Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat (%)	80,76	82,69	84,61	88,46	92,30	96,15	100	100
13	Angka partisipasi kasar dan paket B (%)	97,92	98,04	98,16	98,40	98,64	98,88	99,12	99,12
14	Angka partisipasi murni (%)	96,72	96,85	96,97	97,22	97,47	97,72	97,97	97,97
<b>1.1.2</b>	<b>KESEHATAN</b>								
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	92.84%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	89.25%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,27%	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
6	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	3,80%	5%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
7	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	28%	32%	36%	40%	44%	48%	52%	52%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	89%	95%	95,5%	96%	96,50%	97%	98%	98%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87%	95%	95.5%	96%	96,50%	7%	98%	98%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	60%	80%	85%	90%	93%	96%	100%	100%
13	Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan hygiene sanitasi sesuai	70%	72%	75%	78%	80%	82%	85%	85%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	standar								
14	Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit	86.41 %	86.41 %	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %	91 %
<b>1.1.3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
1	Prosentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	35,89	36,35	44	52	60	65	70	70
2	Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah perkotaan (%)	33	32	30	29	28	27	25	25
3	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	1301,697	1301,697	1301,697	1301,697	1301,697	1301,697	1301,697	1301,697
4	Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik (%)	65,33	65,33	66,67	68	69,33	70,67	72	72
5	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	49	49	50	51	52	53	54	54
6	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	43	45	46	47	48	49	50	50



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Panjang Jalan Lingkungan / Jalan Setapak (km)	1848,04	15	50	50	50	50	50	250
8	Jembatan Gantung dan Plat Beton (unit)	86	19	17	17	17	17	17	85
9	Jumlah Pembangunan Gedung Pemerintahan (unit)	48 Unit	9 Unit	27 Unit	13 Unit	12 Unit	8 Unit	7 Unit	67 unit
10	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10,30%	10,50%	11%	11,50%	12,50%	13%	13%	13%
11	Persentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun (%)	65,62	3,12	71,87	78,12	81,25	87,05	100	100
12	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	85	90	90	90	90	90	90	90
<b>1.1.4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih (%)	64,51	67	71,5	76	80,5	85	90	90
2	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi	58,58	60	63,58	68,58	73,58	78,58	83,77	83,77
3	Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	9,3	22,1	37,68	53,26	68,84	84,42	100	100



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Persentase Rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>1.1.5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
1	pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	11 kegiatan	11 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	42 kegiatan
2	pembinaan politik daerah	10 kegiatan	11 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	42 kegiatan
3	Jumlah LSM aktif	162	162	162	164	165	167	170	828
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,08 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,08 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,09 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,10 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,11 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,12 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,13 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,13 / 10 <sup>4</sup> Penduduk
5	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk	0,16 / 10 <sup>4</sup> Penduduk
6	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
7	Penegakan PERDA	70 kasus	80 kasus	90 kasus	100 kasus	110 kasus	120 kasus	130 kasus	550 kasus
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 x patroli dalam sehari							
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	70 kasus	80 kasus	90 kasus	100 kasus	110 kasus	120 kasus	130 kasus	550 kasus
10	Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM	36,65	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25
12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	66,66	75	75	75	75	75	75	75
13	persentase aparatur dan kelompok organisasi masyarakat yg diberi pemahaman wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	100	100	100
14	persentase Aparatur dan kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai Pendidikan Politik	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Pendidikan Pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah	9,09	9,09	9,09	9,09	27,27	27,27	27,27	100
16	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	1,32	2,2	2,20	4,41	6,61	6,61	11,01	31
17	Cakupan Penanggulangan	80	80	93,7	94,2	96	96	98	98



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Bencana Alam								
18	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	5	15	20	24,8	30,6	30,6	50	50
<b>1.1.6</b>	<b>SOSIAL</b>								
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	4	5	10	15	20	25	25
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	8
4	Prosentase potensi permasalahan kesejahteraan sosial (Psk)	33,33	33,33	41,66	41,66	50	50	58,33	58,33
<b>1.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>								
1	Prosentase Penyelesaian kasus Hubungan Indutri yang ditangani	28,0	32,0	15,02	21,68	18,21	10,69	6,36	6,36
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,3	60,34	58,8	57,27	55,74	54,21	52,68	52,68
3	Pencari kerja yang ditempatkan	15	25	32	36	38	38,02	38,05	15.000
4	Tingkat	10,06	10,04	10,02	9,99	9,97	9,95	9,93	9,93



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	pengangguran terbuka								
5	Prosentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan	15	17	20	20	22	24	25	25
<b>1.2.2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	27,52	27,52	27,52	27,55	27,60	27,60	27,65	27,65
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,73	11,2	11,80	12,98	14,24	15,69	17,25	17,25
3	Rasio KDRT	0,010	0	0	0	0	0	0	0
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,10	35,10	35,12	35,14	35,16	35,18	35,20	35,20
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>1.2.3</b>	<b>PANGAN</b>								
1	Skor pola pangan harapan	65,7	67,2	69	70	71	72	73	73
<b>1.2.4</b>	<b>PERTANAHAN</b>								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	10,52%	10,76%	11,10%	11,44%	11,78%	12,12%	12,46%	12,46%
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Penyelesaian izin lokasi	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
<b>1.2.5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1	Persentase penanganan sampah (%)	5	5	10	25	25	25	25	25
2	Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)	6	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	4
3	Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)	85,68	85,68	84,68	83,68	82,68	81,68	80,68	80,68
4	Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)	9,15	9,15	8,65	8,15	7,65	7,15	6,65	6,65
5	Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk Wilayah Perkotaan	25%	5%	11%	10.7%	10.2%	13%	12%	12%
<b>1.2.6</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PECAHANTAN SIPIL</b>								
1	Kepemilikan KTP (%)	83,31	95,65	90	92	95	97	100	100%
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	567,6	50,49	62,5	67	70	72,5	75	75%
3	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Persentase Kepemilikan KK (%)	93.84	93,11	96	97	98	99	100	100%
<b>1.2.7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	360	360	360	360	360	360	360	360
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	42.585	42.585	42.585	42.585	42.585	42.585	42.585	42.585
3	LPM Berprestasi	2	6	6	6	6	7	7	32
4	PKK aktif	360	360	360	360	360	360	360	360
5	Posyandu aktif	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600	24.603.698.600
<b>1.2.8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,62	2,57	2,52	2,46	2,41	2,36	2,34	2,34
2	Akseptor KB baru	97.240	97.240	97.240	97.240	97.240	97.240	97.240	97.240
3	Cakupan peserta KB aktif	66,60	66,60	66,99	67,80	68,20	69,50	69,80	69,80
<b>1.2.9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>								
1	Persentase kendaraan umum laik jalan di Kab. Cianjur (%)	93	94	95	96	97	98	99	99
2	Prosentase ketersediaan	56,58%	59,96%	61,78%	64,05%	66,78%	69,96%	73,60%	73,60%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Fasilitas perlengkapan jalan								
<b>1.2.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	Jumlah jaringan komunikasi	60	60	61	62	63	64	65	65
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	30	31	31	31	31	31	31	31
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	9	9	9	9	9	9	9	9
4	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>1.2.11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
1	Persentase koperasi aktif	32,94%	33,29%	33,98%	34,67%	35,37%	36,06%	36,75%	36,75%
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	42000	42000	42000	4200	4200	4200	4200	4200
3	Jumlah BPR/LKM	9	9	9	9	9	9	9	9
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0,06%	0,07%	0,69%	0,81%	0,92%	1,04%	1,15%	1,15%
<b>1.2.12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>								
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Trilyun)	1,26	1,34	1,38	1,42	1,46	1,5	1,57	1,57
<b>1.2.13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>								
1	Jumlah organisasi pemuda	76	76	80	80	85	85	85	85
2	Jumlah organisasi olahraga	39	39	40	41	41	42	45	45



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	132	135	140	162	162	170	175	175
4	Jumlah kegiatan olahraga	10	15	20	25	30	35	40	40
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	2	3	4	5	6	6
6	Lapangan olahraga	3	3	3	4	5	6	7	7
<b>1.2.14</b>	<b>STATISTIK</b>								
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku "PDRB kabupaten"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Laju pertumbuhan ekonomi	5,46	5,72	5,98	6,24	6,5	6.76	7,02	7,02
4	Angka Kemiskinan (%)	12,06	11,45	10, 41	9,29	8,99	8,07	7,07	7,07
<b>1.2.15</b>	<b>PERSANDIAN</b>								
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>1.2.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>								
1	Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya (event)	6	9	22	26	25	24	24	136
2	Jumlah cagar budaya yang terlestarikan (buah)	38	38	51	66	81	96	111	111



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1.2.17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
1	Jumlah perpustakaan	290	295	300	305	310	315	320	320
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	50.041	50.500	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	340.000
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16.967	17.667	17.967	18.167	18.367	18.567	18.767	18.767
<b>1.2.18</b>	<b>KEARSIPAN</b>								
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	7,35%	7,35%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
2	Jumlah arsiparis (orang)	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>								
<b>2.1</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ton)	131.148	137.206	143.380	149.832	156.575	163.621	170.984	170.984
2	Peningkatan hasil Tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (ton)	1.426	1.492	1.559	1.629	1.703	1.779	1.859	1.859
3	Konsumsi ikan masyarakat (Kg)	25,39	25,9	26,42	26,94	27,48	28,03	28,59	28,59
4	Peningkatan Volume produk olahan hasil perikanan (ton)	1.327	1.353	1.381	1.408	1.436	1.465	1.494	1.494



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Peningkatan Produksi benih ikan (juta ekor)	10,6	10,81	11,02	11,24	11,47	11,7	11,93	11,93
<b>2.2</b>	<b>PARIWISATA</b>								
1	Kunjungan wisata (Orang)	4.484.506	4.932.957	5,426,252	5,919,548	6,511,503	7,162,653	7,878,918	7,878,918
2	Nilai sektor pariwisata terhadap PDRB	2,854	3,1	3,241	3,381	3,522	3,663	3,804	3,804
<b>2.3</b>	<b>PERTANIAN</b>								
1	Produktivitas tanaman pangan : Padi Sawah (Kuintal per hektar)	61,17	61,26	61,34	61,51	61,68	61,85	62	62
2	Produksi padi (ton)	864.358	867.992	871.486	876.614	885.742	892.870	900.000	900.000
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	32,14	31,4	30,68	29,98	29,29	28,61	27,95	27,95
4	Produksi Hasil Peternakan	71.002	74.552	78.282	82.111	86.318	90.644	95.190	95.190
5	Produktifitas tanaman perkebunan (ton/ha/thn)	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,6
6	Produksi tanaman perkebunan (ton/thn)	44.499,11	45.611	46.500	48.500	50.500	52.500	54.500	54.500
<b>2.5</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>								
1	Rumah tangga yang mendapat akses listrik perdesaan (%)	82,74	0	82,82	82,9	82,98	83,06	83,14	83,14
<b>2.6</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,057	6,259	6,546	6,828	7,113	7,397	7,682	7,682
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	23	0	0	20	20	13	20	96
<b>2.7</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>								
1	Nilai sektor Industri terhadap PDRB	1,901,814,9	1,992,377,5	2,082,940,1	2,173,502,7	2,264,026,3	2,354,627,9	2,445,190,5	2,445,190,5
2	Pertumbuhan IKM	0.49	0.23	3.6	3.8	3.4	2.9	1.9	16.32
3	Cakupan bina IKM	26.20	1.2	4	4	4	3.3	2.1	44
<b>2.8</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>								
1	Jumlah keluarga miskin mengikuti transmigrasi	10	10	15	10	10	10	15	60
<b>3</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>3.1</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
1	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Renstra PD yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase Renja PD yang Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase Program Usulan yang Terakomodir dalam RKPD melalui Musrenbang (%)	30	30	30	30	30	30	30	30



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Diakomodir pada Perencanaan Tahunan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase Program dalam RKPD yang Diakomodir dalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3.2</b>	<b>KEUANGAN</b>								
1	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan	31 des	31 des	31 des	31 des	31 des	31 des	31 des	31 des
2	Persentase tertib administrasi aset (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah (Rp.)	123.839.856.050	134.760.440.452	149.588.063.902	160.059.228.375	171.263.374.361	183.251.810.567	196.079.437.306	860.241.914.511
<b>3.3</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
1	Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu	65.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	pelatihan dengan nilai baik								
3	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>3.4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
1	Prosentase Inovasi unggulan daerah yang dihasilkan (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
<b>3.5</b>	<b>INSPEKTORAT</b>								
1	prosentase penurunan temuan/rekomendasi audit eksternal	10	10	10	10	10	10	10	10
2	prosentase penurunan temuan/rekomendasi audit eksternal yang ditindaklanjuti	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Opini audit eksternal atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Prosentase OPD yang menerapkan SPI	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Prosentase Auditor	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	yang bersertifikat								
<b>3.6</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0	0	70,5	75	85	90	95,07	95,07
2	Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%)	56,11	59,71	61,73	67,34	83,75	92,96	100	100
<b>3.7</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
1	Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3.8</b>	<b>KECAMATAN</b>								
1	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	100



**Tabel 9.3**  
**Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah**  
**Kabupaten Cianjur**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I.</b>	<b>Kemampuan Ekonomi</b>								
1.	<b>Statistik</b>								
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita			63,87	64,52	65,18	65,85	66,52	66,52
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita			39,13	40,02	40,93	41,87	42,82	42,82
1.3.	PDRB ADHK (Rp. Miliar)	25.355	26.562	27.770	28.977	30.184	31.392	32.599	32.599
2.	<b>Pertanian</b>								
2.1	Nilai tukar petani			118,74	123,34	128,12	133,09	138,25	138,25
<b>II.</b>	<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
1.	<b>Perhubungan</b>								
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	43.205.101	436.820.000	44.152.527	44.594.052	45.039.992	45.490.392	45.945.296	45.945.296
2.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	8	2	2	2	2	2	2	10
<b>III.</b>	<b>Iklim Berinvestasi</b>								
1	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Penanaman Modal; Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan</b>								
1.1	Angka kriminalitas	2,93	2,98	3,03	3,08	3,14	3,20	3,26	2,93
1.2	Jumlah demo	25	6	5	4	2	3	2	16
1.3	Lama proses perijinan	7	7	7	7	7	7	7	7



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	4	4	4	4	4	4	4	4
1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4	4	4	4	4	4	4	4



## **BAB X** **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Cianjur 2005-2025 pada tahapan ketiga dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa barat 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program dari bupati terpilih, selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Cianjur 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021.

### **10.1 PEDOMAN TRANSISI**

---

Di dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2022. Penyusunan RKPD Tahun 2022 akan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Cianjur serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **10.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil



Bupati merupakan pedoman bagi pemerintahan Kabupaten Cianjur dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra-PD. Oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-PD setiap tahun sejak 2017 sampai dengan 2021.
- b. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur tahun sejak 2017 sampai dengan 2021.
- c. Lembaga eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 sehingga arah kebijakan/prioritas setiap tahunnya dapat dicapai.
- d. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra-PD 2016-2021.



- f. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
- g. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Perda tentang RPJMD 2016-2021.

BUPATI CIANJUR,

ttd

IRVAN RIVANO MUCHTAR